



2019



# **Optimalisasi Peran**



**dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar**



# **OPTIMALISASI PERAN MGMP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MENGAJAR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2019**

# **Optimalisasi Peran MGMP dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar**

## **Tim Penyusun :**

Simon Sili Sabon, M.Si.

Teguh Supriyadi, S.Si., M.Si.

Relisa, SS

Bambang Suwardi Joko, S.Sos., MM

ISBN : 978-602-0792-16-3

## **Penyunting :**

Nur Listiawati, SS, M.Ed.

Dra. Lucia H. Winingsih, MA, Ph.D.

Ir. Yendri Wirda, M.Si.

## **Desain Sampul dan Isi:**

Genardi Atmadiredja, M.Sn.

## **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://puslitjakdibud.kemdikbud.go.id>

Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdibud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Melalui buku ini diharapkan agar diketahui hasil kajian optimalisasi peran MGMP dalam meningkatkan kualitas mengajar. Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,



Muktiono Waspodo

## KATA PENGANTAR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 Ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Upaya peningkatan profesionalisme guru antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Dalam kajian ini fokus upayanya adalah meningkatkan kualitas mengajar terutama untuk materi yang membutuhkan daya nalar tinggi dari siswa.

Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mengingat forum ini dijadikan sebagai tempat melakukan pertemuan bagi guru matapelajaran sejenis.

Kajian ini mengevaluasi program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP dengan mengidentifikasi: (i) profil MGMP penyusun soal USBN; (ii) perencanaan program; (iii) pelaksanaan program; (iv) hasil program; (v) cara peserta mendiseminasikan hasil program; dan (vi) cara peserta mentransfer hasil program kepada peserta didik. Tim kajian ini telah melakukan pengumpulan data di lima lokasi kajian. Data

yang terkumpul baik primer maupun sekunder diolah dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kompetensi dan kinerja guru melalui program penyusunan soal USBN 2017, soal aras tinggi (*high order thinking skills* = HOTS) yang menuntut daya nalar tinggi siswa untuk menyelesaikannya.

Semoga hasil kajian ini yaitu rekomendasi kebijakan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan tentang peningkatan profesionalisme guru melalui MGMP. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kajian ini.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Tujuan Kajian.....	12
C. Sasaran Kajian.....	13
D. Keluaran.....	13
E. Ruang Lingkup/Batasan.....	13
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA	
BERPIKIR.....	15
A. Tinjauan Pustaka.....	15
B. Kerangka Berpikir.....	26
3. METODE KAJIAN.....	30
A. Pendekatan Kajian.....	30
B. Variabel dan Indikator.....	31
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Profil MGMP.....	44
B. Perencanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN.....	99
C. Pelaksanaan Penyusunan Soal USBN.....	124

D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Soal	
USBN .....	161
E. Diseminasi Hasil Kegiatan Penyusunan Soal	
USBN .....	175
F. Cara Mentransfer Hasil Program kepada Peserta	
Didik.....	187
<b>5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>213</b>
A. Simpulan.....	213
B. Rekomendasi Kebijakan.....	230
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>239</b>



# 1

# PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, di mana guru memegang peranan yang sangat vital khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian di dalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut, lebih jauh guru berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan tersebut.

Tugas dan fungsi guru di atas didasari oleh beberapa pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas guru dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni (i) merencanakan pembelajaran; (ii) melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu; (iii) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (iv) membimbing dan melatih peserta didik/siswa; (v) melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (vi) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai; dan (vii) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

Tugas Guru tersebut dijelaskan secara lebih terperinci dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, di antaranya (i) menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; (ii) menyusun silabus pembelajaran; (iii) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (iv) melaksanakan kegiatan pembelajaran; (v) menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; (vi) menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; (vii) menganalisis hasil penilaian pembelajaran; (viii) melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; (ix) melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus guru kelas); (x) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/madrasah dan nasional; (xi) membimbing guru pemula dalam program induksi; (xii) membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses



pembelajaran; (xiii) melaksanakan pengembangan diri, (xiv) melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan (xv) melakukan presentasi ilmiah.

Di atas diuraikan tugas guru, berikut diuraikan fungsi guru. Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan di atas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni (i) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; (ii) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; (iii) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; (iv) memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (v) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guru tidak bisa melaksanakannya secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Diperlukan adanya kerja sama yang baik dan bersinergi antarwarga sekolah, antara lain antara guru dengan rekan kerjanya khususnya yang mengajar mata pelajaran (Mapel) yang sama, guru dengan siswa dan guru dengan para pemangku kepentingan. Terlebih untuk

melaksanakan tugas pengembangan diri guru membutuhkan rekan sejawatnya. Karena belajar dari teman sejawat tidak memerlukan biaya yang besar. Selama ini belajar dari teman sejawat umumnya dilakukan guru lewat wadah Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP). Wadah/organisasi ini dibentuk sebagai forum pertemuan para guru yang mengajar sebagai guru kelas atau mengajar Mapel yang sama untuk saling belajar. Selain itu, juga sebagai sarana silaturahmi serta sebagai organisasi yang menampung berbagai gagasan para guru dan juga sebagai sarana menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing. Ini membuktikan bahwa begitu pentingnya pembentukan MGMP di dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh guru di satuan pendidikan masing-masing. Melalui MGMP diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Peran serta KKG/MGMP dalam proses peningkatan kinerja guru, dituntut untuk melakukan berbagai terobosan untuk membangun pendidikan berkualitas.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pernyataan Undang-Undang di atas pada intinya

mempersyaratkan guru untuk memiliki: (i) kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV; (ii) kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) sertifikat pendidik. Upaya peningkatan profesionalisme guru ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya.

Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di forum Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat SD, atau di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat SMP dan SMA, mengingat forum ini dijadikan sebagai tempat melakukan pertemuan bagi guru kelas atau guru mata pelajaran sejenis. Berkaitan dengan peran forum pertemuan guru di KKG/MGMP yang sangat strategis untuk peningkatan kompetensi guru dan kinerja guru, maka Pemerintah perlu dengan serius memperhatikan pengembangan KKG/MGMP sehingga dapat memberdayakannya untuk mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu guru dan secara tidak langsung mutu pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk memberdayakan forum KKG/MGMP adalah menyusun soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Bina Informatika (2017) menyampaikan bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan tentang begitu pentingnya peran guru dalam menyukseskan USBN. Mendikbud ingin memberi kewenangan kepada guru sebagaimana diatur dalam UU seperti

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa setelah guru mengajar mereka juga berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap siswa. Kata beliau ini sesuai dengan USBN.

Selanjutnya Bina Informatika (2017) menyampaikan pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud di Jakarta, yang mengatakan bahwa bentuk tes akan mendorong metode mengajar guru di sekolah. Menurut beliau, ujian yang dilaksanakan saat ini, baik ujian di kelas, ujian sekolah, maupun ujian nasional, masih terbatas pada menguji ingatan dan aplikasi yang sederhana. Padahal, guru dituntut mengembangkan pembelajaran abad ke-21 dan salah satunya adalah berpikir kritis.

Disampaikan oleh Dirjen GTK bahwa sekarang ini guru diajak untuk tidak lagi mengajar hanya fokus pada ingatan, tetapi mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini nanti dikembangkan dalam soal-soal ujian, mulai dari ulangan harian hingga ujian sekolah, termasuk ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Karena itu, guru mulai dilatih untuk membuat soal yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Dirjen GTK menambahkan bahwa pengembangan kemampuan guru dalam membuat soal-soal ujian yang menuntut kemampuan berpikir tinggi akan dilakukan secara berkesinambungan lewat KKG untuk jenjang SD ataupun MGMP untuk jenjang SMP dan SMA/SMK atau sederajat.

Untuk merealisasikan perhatian pemerintah kepada KKG/MGMP, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memberikan bantuan kepada KKG/MGMP untuk menyusun soal USBN 2017 (Surat Dirjen GTK Nomor 01554/B/GT/2017). Perihal Surat tersebut adalah “Bantuan Pemerintah bagi KKG/MGMP/MKKS”. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa dalam rangka meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 memberikan bantuan pemerintah bagi KKG, MGMP dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bantuan pemerintah kepada KKG/MGMP/MKKS tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan dialokasikan untuk setiap kabupaten/kota minimal satu kelompok kerja di seluruh provinsi. Selanjutnya dihimbau kepada Pemerintah Daerah melakukan replikasi program dimaksud yang dibiayai APBD untuk mata pelajaran yang diujikan dalam USBN sesuai dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya Pemerintah Daerah diharapkan pula melakukan replikasi program untuk Mapel di luar Mapel yang diujikan dalam USBN dengan bobot 70 - 80% untuk pengembangan soal dan 20 sampai dengan 30% untuk Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Narasumber pengembangan soal USBN dan PPK adalah widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK),

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), instruktur yang telah dilatih di tingkat nasional, Guru berprestasi, pemenang Lomba Inovasi Pembelajaran atau lomba lainnya, dan/atau peraih hasil terbaik Uji Kompetensi Guru (UKG).

Untuk penyusunan soal-soal USBN digunakan kisi-kisi yang telah ditetapkan dan ditambah soal-soal yang disiapkan oleh Kemendikbud (*anchor*) sebanyak 25%. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diminta untuk menyampaikan usulan nama KKG/MGMP/MKKS dilampiri informasi profil KKG/MGMP/MKKS guna menerima bantuan/*block grant* untuk menyusun soal USBN.

Idhom (2017a) menulis bahwa di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 17 KKG/MGMP/MKKS yang menerima bantuan dana *Block Grant* dari Ditjen GTK Kemdikbud. Masing-masing kelompok guru menerima dana sebesar Rp 35 juta untuk pembuatan soal USBN. Selanjutnya untuk mempermudah guru dalam menyusun soal USBN maka pemerintah Pusat akan melatih sebanyak 6.000 guru dengan menganggarkan biaya pelatihan sebesar 320 miliar sebagaimana ditulis Idhom (2017b). Jadi, para guru anggota MGMP sebelum ditugaskan menyusun soal USBN perlu dilatih terlebih dahulu. Disampaikan oleh Idhom (2017b) bahwa para guru tersebut akan dilatih membuat soal bernalar tinggi atau soal aras tinggi. Mereka harus terbiasa menyusun tipe/model soal seperti ini. Mereka akan bertugas menyusun soal pilihan ganda dan uraian di USBN.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa sejak 2017 guru-guru sudah mulai dilatih untuk menyusun soal ujian dengan daya nalar tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS). Jika demikian, seharusnya hasil UNBK tahun ini (2018) semestinya lebih baik dari pada tahun-tahun sebelum 2016 dan 2017. Namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Banyak siswa mengeluh tidak bisa mengerjakan soal-soal HOTS. Hasilnya nilai UNBK umumnya turun dari tahun sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam berbagai media masa baik cetak maupun elektronik berikut.

Artha Uly (2018) menulis bahwa untuk SMA, Kemendikbud mencatatkan terjadi penurunan rata-rata nilai Ujian Nasional 2018. Penurunan utamanya terjadi pada mata pelajaran Matematika, Fisika, dan Kimia. Pada Jurusan IPA, mata pelajaran Matematika terkoreksi -4,67 poin, lebih rendah ketimbang tahun 2017 yang terkoreksi -11,62 poin. Fisika sebesar -5,35 poin, pada 2017 terkoreksi -5,74 poin. Sedangkan Kimia sebesar -0,67 poin, lebih tinggi dari 2017 yang sebesar -2,68 poin. Untuk jurusan IPS, Matematika terkoreksi -4,73 poin, lebih rendah dari 2017 yang terkoreksi sebesar -9,97 poin. Sementara, Jurusan Bahasa mencatat Matematika terkoreksi -2,48 poin, lebih rendah ketimbang 2017 sebesar -4,96 poin.

Antara (2018) memberitakan penjelasan Mendikbud, Muhadjir Effendy yang mengatakan bahwa nilai rata-rata hasil UN SMP 2018 mengalami penurunan. Mendikbud menjelaskan bahwa rerata nilai UN SMP mengalami penurunan skor yang sangat

parah karena adanya soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*). Memang soal HOTS mengakibatkan penurunan nilai siswa tapi menurut beliau soal dengan daya nalar tinggi, merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari supaya siswa memiliki kemampuan unggul pada abad 21 ini. Untuk itu, Mendikbud meminta PGRI untuk membantu Kemdikbud melakukan pelatihan guru. Antara (2018) menyampaikan bahwa Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mendukung adanya pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi. PGRI mendukung adanya soal-soal dengan daya nalar tinggi, tapi PGRI berharap tidak hanya pada saat ujian tetapi juga pada saat pembelajaran.

Atriana (2018) menyampaikan bahwa Kemendikbud mencatat rata-rata nilai UNBK SMP 2018 mengalami penurunan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud menyampaikan bahwa jumlah siswa yang mengikuti UNBK 2018 terdiri atas 689.474 siswa MTs dan 2.004.896 siswa SMP. Menurut beliau penurunan nilai bukan karena kualitas kecerdasan siswa yang menurun, tapi lebih pada proses pembelajaran di sekolah yang harus ditingkatkan lagi. Jadi menurutnya proses pembelajaran di sekolah perlu ditingkatkan untuk semua pelajaran. Menurutnya cara belajar yang dilakukan guru saat ini kurang memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik.

Putri (2018) merilis berita dari Kemendikbud bahwa nilai rata-rata UNBK SMP mengalami penurunan. Putri menyampaikan berita penurunan nilai UNBK tersebut berdasarkan paparan



Kepala Balitbang Kemendikbud, yang telah memaparkan hasil UNBK SMP di Perpustakaan Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada Senin 28/5/2018. Dipaparkan bahwa untuk SMP pada tahun 2016, jumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang mengikuti UNBK sebanyak 890, rerata nilainya 65,05; tahun 2017 jumlah sekolah yang mengikuti UNBK sebanyak 8.882 rerata hasilnya 55,51, sedangkan untuk tahun 2018 jumlah sekolah yang mengikuti UNBK sebanyak 17.760 sekolah, rerata hasilnya 52,96.

Meskipun hasilnya secara rerata mengalami penurunan namun di balik itu terjadi kenaikan rerata nilai UNBK khusus untuk Bahasa Inggris. Kepala Balitbang Kemendikbud menjelaskan bahwa pada tahun ini Kemendikbud mengurangi soal berbobot mudah. Soal itu diganti soal berbobot sedang. Hasilnya masih banyak yang belum bisa menjawab soal berbobot sedang-sulit. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan mayoritas anak-anak kita hanya menjawab soal-soal yang (tingkat kesulitannya) mudah ke bawah atau menengah ke bawah.

MGMP sejak 2017 mulai dilibatkan dalam penyusunan soal-soal USBN dengan daya nalar tinggi, sehingga seharusnya guru-guru sudah mulai melakukan pembelajaran dengan mengedepankan/ meningkatkan penyelesaian persoalan menggunakan daya nalar yang sedang hingga tinggi sehingga anak-anak menjadi terbiasa dan dapat menyelesaikan soal ujian dengan daya nalar sedang sampai dengan tinggi, namun kenyataannya hasilnya terus

mengalami penurunan. Untuk itu maka dirumuskan permasalahan kajian ini sebagai berikut:

“Terjadinya penurunan nilai UNBK meskipun MGMP sudah mulai dilibatkan menyusun soal aras tinggi atau soal dengan daya nalar tinggi atau *Higher order thinking skills* (HOTS)”.

## **B. Tujuan Kajian**

Tujuan umum dari kajian ini adalah menghasilkan rekomendasi dan opsi kebijakan pemberdayagunaan MGMP untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran kepada siswa dengan lebih mengedapankan pembelajaran yang mengutamakan menggugah siswa termotivasi untuk berpikir kritis sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang membutuhkan daya nalar sedang hingga tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kajian ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program dengan:

1. Mengetahui profil dan keaktifan MGMP peserta program penyusunan soal USBN.
2. Mengetahui perencanaan program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP.
3. Mengetahui realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN.
4. Mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN.

5. Mengetahui diseminasi hasil pelatihan penyusunan soal USBN.
6. Mengetahui pembelajaran/transfer hasil pelatihan kepada peserta didik.

### **C. Sasaran Kajian**

Sasaran kajian ini adalah semua MGMP Mapel Kurikulum 2013 (K-13) di SMP yang ditunjuk oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat untuk menyusun soal USBN 2017/2018.

### **D. Keluaran**

Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan penelitian dan ringkasan eksekutif tentang optimalisasi peran MGMP dalam meningkatkan kualitas mengajar dan *policy brief* tentang pemberdayaan MGMP untuk peningkatan profesionalisme guru, khususnya kemampuan guru untuk melakukan pembelajaran menggunakan HOTS.

### **E. Ruang Lingkup/Batasan**

Yang pertama, ruang lingkup kajian ini adalah seluruh MGMP Mapel Kurikulum 2013 (K-13) yang terdiri atas 10 Mapel yang dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu:

1. MGMP Mapel non UN penerima bantuan *block grant* dari Pusat (Ditjen GTK) pada 2017 yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
2. MGMP Mapel UN SMP yaitu Matematika (Mat), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia (B. Indo) dan Bahasa Inggris (B. Ing)
3. MGMP Mapel non UN lainnya yaitu Pendidikan Agama Islam/Katholik (PA(I/K)), Pendidikan Jasmani dan Olahraga (PJOK), Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dan Prakarya.

Selanjutnya ruang lingkup penelitian ini dibatasi khusus untuk MGMP Mapel K-13 untuk SMP yang ditunjuk dinas pendidikan kabupaten/kota setempat untuk menyusun soal USBN. Ruang lingkup kajian ini dibatasi khusus SMP karena memudahkan peneliti dalam mengurus ijin administrasi pengumpulan data karena keterbatasan waktu untuk melakukan verifikasi data. Jika lingkup kajian ditambah dengan SMA/SMK maka peneliti harus mengurus ijin administrasi pengumpulan data ke dinas pendidikan provinsi, dan ini akan mengurangi waktu verifikasi data. Selain itu oleh karena kemiripan kegiatan MGMP untuk SMP dan SMA/SMK maka rekomendasi kajian ini dapat juga dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemberdayagunaan MGMP Mapel K-13 di SMA/SMK. Lingkup kajian ini tidak termasuk SD karena capaian SD di kabupaten/kota yang satu tidak bisa dibandingkan dengan capaian SD di kabupaten/kota lainnya karena di SD tidak ada UNBK.

# 2

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Evaluasi program

Stufflebeam dalam Tayibnafis (2000) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan untuk mendorong administrator membuat keputusan. Fitzpatrick, Sanders, & Worthen dalam Darodjat dan Wahyudhiana (2015), menyatakan evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu obyek evaluasi (nilai/manfaat) berkaitan dengan kriteria tersebut.

Darodjat dan Wahyudhiana menulis bahwa terdapat banyak model evaluasi, salah satunya adalah model evaluasi Context, Input, Process and Product (CIPP). Model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*The Elementary and Secondary Education Act*). Tujuan penting evaluasi model ini

adalah untuk melakukan perbaikan sebagaimana, dikatakan: "*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve*". Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: (i) *context*, (ii) *input*, (iii) *process*, dan (iv) *product*, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan (Darodjat dan Wahyudhiana, 2015). Empat macam keputusan pendidikan dalam model evaluasi CIPP, yakni: (i) evaluasi *context* (konteks), membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program, (ii) evaluasi input, mendorong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya, (iii) evaluasi proses, membantu mengimplementasikan keputusan, sampai sejauh mana rencana telah diterapkan, dan (iv) evaluasi produk, menolong keputusan selanjutnya (Tayibnafis, 2000).

## **2. Kompetensi guru**

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Tugas keprofesionalan guru adalah

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hamalik dalam Novauli (2015) menyatakan bahwa: "Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelas, sehingga pembelajaran peserta didik berada pada tingkat optimal."

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara

mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat.

### **3. Kinerja/performa guru**

Menurut Mangkunegara (2009), istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Senada dengan pendapat di atas, Rusman (2012) menyatakan bahwa kinerja adalah *Performance* atau unjuk kerja. Kinerja juga dapat diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja.

### **4. Kepemimpinan guru**

Guru sebagai pemimpin pendidikan harus sering memberikan contoh kepada peserta didik bukan hanya penjelasan. Eggen dan Don Kauchak dalam Wardani (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengajaran pribadi menggambarkan keyakinan guru pada kemampuan mereka untuk membuat semua peserta didik berhasil dan belajar tanpa peduli latar belakang atau kondisi rumah dan sekolah peserta didik.

### **5. MGMP**

MGMP adalah forum/wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran. Lembaga ini bersifat nonstruktural namun memiliki



struktur yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai sekolah (Yunusshofa dalam Mahmud (2013)). MGMP ini merupakan suatu perkumpulan yang digunakan oleh guru untuk memecahkan segala permasalahan dalam proses belajar mengajar di sekolah. MGMP berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.

MGMP menurut Mulyasa dalam Husna (2016) adalah salah satu forum/wadah yang dimanfaatkan guru bidang studi sejenis untuk pengembangan diri. Guru yang mengikuti MGMP akan bersama-sama belajar mengembangkan kompetensi guru, salah satunya adalah kompetensi profesional guru. Dalam forum tersebut, guru saling memberi masukan bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang benar, pembuatan soal, dan program pengembangan diri yang bermanfaat. Saat ini hampir semua guru kelas maupun guru bidang studi di kota maupun kabupaten sepakat mendirikan dan mengikuti KKG/MGMP. Organisasi tersebut telah berjalan dan memiliki program-program. Dalam perkembangan yang semakin pesat, guru-guru telah sadar bahwa pengembangan diri dan wawasan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bekal menjalankan tugasnya.

Firman (2016) menyatakan MGMP adalah forum/wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran. Organisasi tersebut

dibentuk sebagai forum pertemuan para guru mata pelajaran, selain itu juga sebagai sarana silaturahmi serta sebagai organisasi yang menampung berbagai gagasan para guru dan juga sebagai sarana menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing. Ini membuktikan bahwa begitu pentingnya pembentukan MGMP di dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh guru di satuan pendidikan masing-masing. Melalui MGMP diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran serta MGMP dalam proses peningkatan kinerja guru, dituntut untuk melakukan berbagai terobosan yang akan membangun pendidikan berkualitas.

## **6. Dasar hukum MGMP**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dharmawan (2014) mengemukakan bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di MGMP, mengingat

forum/wadah ini dijadikan sebagai tempat melakukan pertemuan ilmiah bagi guru mata pelajaran sejenis.

Berkaitan dengan peran forum MGMP yang sangat strategis untuk peningkatan kompetensi guru dan kinerja guru, maka pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan MGMP. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru, antara lain melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan instruktur, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen MGMP. Salah satu program pemerintah yang paling mutakhir dengan memberdayakan MGMP adalah program pelatihan guru untuk menyusun soal USBN aras tinggi, dan pemberian *block grant* kepada MGMP untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Dharmawan (2014) menyampaikan pula bahwa dari laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan MGMP disebutkan bahwa masih banyak MGMP yang belum menunjukkan peningkatan kinerja yang berarti. Di beberapa daerah peningkatan kinerja MGMP cukup menggembirakan, namun di sebagian besar daerah lainnya masih memprihatinkan.

## **7. Prosedur operasional standar MGMP**

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional Kemendikbud (2010) menyampaikan bahwa forum/wadah pembinaan guru yang sudah ada saat ini masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak menghadapi berbagai kendala. Agar kegiatan pembinaan guru di MGMP lebih

terarah, maka disusun rambu-rambu pengembangan dan penyelenggaraan MGMP.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja MGMP telah disusun standar pengembangan MGMP yang memuat tujuh komponen pengembangan, yaitu: (i) organisasi, (ii) program dan kegiatan, (iii) sumber daya manusia, (iv) sarana dan prasarana, (v) pengelolaan, (vi) pembiayaan, serta (vii) pemantauan dan evaluasi. Semua itu tersaji dalam Buku 1 yaitu Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan MGMP. Untuk mengoperasionalkan pengembangan kegiatan tersebut maka disusun Buku 2 yaitu Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan MGMP yang merupakan jabaran dari ketujuh komponen pengembangan kegiatan MGMP. Para pengelola MGMP disarankan untuk mempelajari kedua buku itu secara berurutan agar idenya tertangkap secara utuh. Dalam implementasi di daerah para pengelola MGMP diharapkan dapat mengembangkan kreativitas seluas-luasnya, dengan tetap mengacu pada Buku 1 dan Buku 2 tersebut, sehingga tujuan MGMP dapat tercapai. Berikut uraian singkat tentang komponen-komponen pengembangan MGMP:

- a. Organisasi penyelenggaraan KKG/MGMP meliputi prosedur pembentukan Tim Pengembang Tingkat Nasional, Tim Pengembang Tingkat Provinsi, Tim Pengembang Tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus MGMP, Keanggotaan dan Prosedur Pembentukan Pengurus MGMP serta Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

- b. Penyusunan Program MGMP pada dasarnya merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan aktivitas KKG atau MGMP. Program tersebut senantiasa merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan MGMP terdiri dari anggota, instruktur, pemandu/tutor/fasilitator, pengawas sekolah, widyaiswara, dosen (LPTK/Perguruan Tinggi), serta pejabat struktural dan pejabat non-struktural di dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan Pusat. SDM dimaksud dapat difungsikan sebagai pembina, pelatih, tutor, atau nara sumber dalam pelaksanaan kegiatan di KKG dan MGMP.
- d. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus tersedia dan terstandar, agar pelaksanaan kegiatan MGMP berjalan sebagaimana mestinya serta berkualitas. Ada dua kelompok yaitu (i) sarana dan prasarana utama (standar minimal) dan (ii) tambahan. Sarana dan prasarana utama adalah komputer, OHP/LCD proyektor, dan telepon, sedangkan sarana dan prasarana tambahan adalah Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, *Micro Teaching*, Perpustakaan, *Audio Visual Aid (AVA)*, *handycam*, kamera digital, jaringan internet, dan Davinet (*Digital audio visual network*).

- e. Pengelolaan: ada tiga jenis program yang dapat dirancang untuk kegiatan di MGMP, yaitu program umum, program inti (program rutin dan program pengembang) dan program penunjang. Program tersebut harus rinci memuat sejumlah kegiatan untuk setiap pertemuan. Program untuk satu tahun sekurang-kurangnya memuat 12 kegiatan. Dalam penyusunan program MGMP dipilih program yang menjadi prioritas, baik program rutin maupun program pengembangan.
- f. Pembiayaan: merupakan salah satu komponen penting untuk terlaksananya program MGMP sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya mengumpulkan dana dari berbagai sumber sudah semestinya dilakukan MGMP. Beberapa sumber dana yang mungkin dapat dimanfaatkan antara lain: iuran anggota, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBN, APBD, komite sekolah/dewan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, LPMP, P4TK, direktorat terkait, donatur yang tidak mengikat, unit produksi, hasil kerjasama, masyarakat, atau sponsor yang sah dan tidak mengikat.
- g. Pemantauan dan Evaluasi: MGMP telah merancang program kegiatan sekurang-kurangnya sebanyak 12 kegiatan per tahun. Sudah semestinya MGMP memiliki beberapa kegiatan untuk mencapai dan mengembangkan standar kompetensi guru, seperti: persiapan pembelajaran, pemecahan masalah pembelajaran, pengembangan silabus, RPP, bahan ajar, metode, media dan alat peraga, serta evaluasi dan penilaian

yang sesuai dengan standar kompetensi pada mata pelajaran terkait. Di samping kegiatan-kegiatan dimaksud, MGMP harus merancang kegiatan terkait dengan pengembangan profesi, pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif, serta merancang kegiatan untuk menjaga profesionalisme secara berkelanjutan.

## **8. Cara menyusun soal USBN aras tinggi**

Bertema.com (2017) salah satu laman yang memuat informasi terkait dunia pendidikan menyampaikan bagaimana cara menyusun soal aras tinggi. Dikatakan bahwa soal aras tinggi mengukur dimensi metakognitif yaitu kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (*problem solving*), mampu memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (*discovery*) metode baru, berargumen (*reasoning*), dan mengambil keputusan yang tepat. Di dalam laman tersebut dirangkum langkah-langkah di dalam menyusun soal aras tinggi sebagai berikut:

- a. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal-soal aras tinggi. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua KD dapat dibuat model soal aras tinggi;
- b. menyusun kisi-kisi soal untuk membantu para guru dalam menulis butir soal aras tinggi;
- c. memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang menarik umumnya baru, sedangkan stimulus

- kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan guru dalam menemukan stimulus merupakan indikator yang bermutu;
- d. menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan yang disusun sama dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada aspek materi.
  - e. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dan kunci jawaban disusun untuk mempermudah dalam pengkoreksian.

## **B. Kerangka Berpikir**

Keberhasilan MGMP dalam meningkatkan kualitas mengajar khususnya dalam pembelajaran HOTS kepada siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang memerlukan daya nalar tinggi, ditentukan oleh tujuh variabel, yaitu: (i) organisasi, (ii) program dan kegiatan, (iii) sumber daya manusia, (iv) sarana dan prasarana, (v) pengelolaan, (vi) pembiayaan, serta (vii) pemantauan dan evaluasi. Ketujuh variabel tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan program yang diinginkan dapat terwujud. Kegiatan MGMP khusus untuk menyusun soal USBN aras tinggi dikatakan memberikan hasil atau efektif jika tujuan penyusunan soal USBN tercapai yaitu guru-guru anggota MGMP mampu memahami materi untuk menyusun soal aras tinggi, guru-guru mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal aras

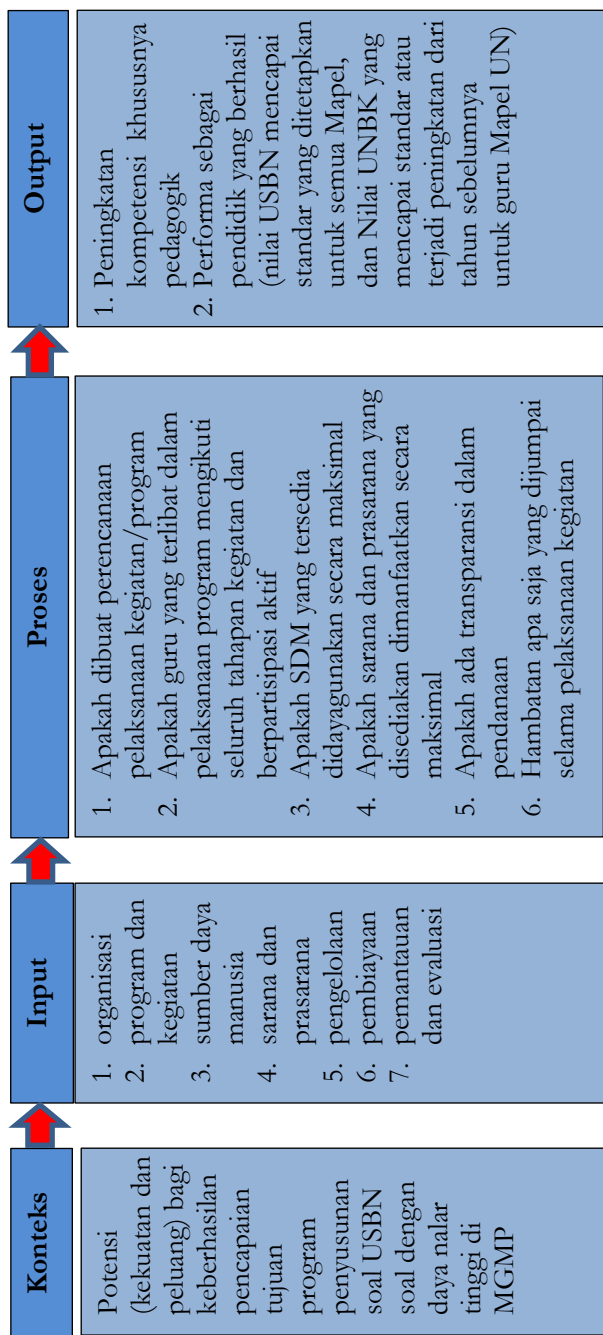


tinggi, dan guru-guru mampu menyusun soal USBN aras tinggi. Kegiatan MGMP ini akan kian berhasil atau efektif apabila guru yang ikut kegiatan menyusun soal aras tinggi mendiseminasikan ilmu yang didapatnya kepada rekan sejawatnya, dan guru-guru mampu mentransfer ilmunya kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu menjawab soal-soal ujian baik ulangan harian, ujian akhir semester, USBN dan UNBK. Oleh karena yang bisa dibandingkan adalah nilai UNBK maka kegiatan MGMP akan berhasil apabila terjadi peningkatan nilai UNBK mencapai standar yang ditetapkan, atau setidaknya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu pelaksanaan program penyusunan soal USBN di MGMP harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan atau tujuan yang hendak dicapai. Program MGMP dalam menyusun soal USBN yang penyelesaiannya membutuhkan daya nalar tinggi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yakni mentransfer ilmunya kepada peserta didik agar dapat berpikir kritis dalam menghadapi soal-soal yang penyelesaiannya membutuhkan daya nalar yang tinggi. Guru sendiri akan dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal ujian dengan daya nalar tinggi yang diindikasikan oleh keberhasilan siswa mencapai nilai UNBK sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini tidak hanya menunjukkan guru berhasil mentransfer ilmunya kepada

peserta didik, tapi juga menunjukkan keberhasilan MGMP melaksanakan program penyusunan soal.

Tentunya untuk mengetahui keberhasilan program MGMP dalam menyusun soal USBN perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Model evaluasi yang digunakan dalam kajian ini adalah evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process and Product*). Ilustrasi evaluasi model CIPP dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Kajian

# 3

## METODE KAJIAN

### A. Pendekatan Kajian

Kajian ini mempunyai enam tujuan, yakni: i) mengidentifikasi perencanaan program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP; (ii) mengidentifikasi pelaksanaan program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP; dan (iii) mengidentifikasi hasil program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP, (iv) mengidentifikasi cara diseminasi hasil program oleh peserta program/kegiatan; (v) mengidentifikasi cara guru mentransfer hasil program kepada peserta didik; Untuk menjawab tujuan tersebut, kajian akan melakukannya dengan pendekatan evaluasi melalui evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process and Product*).

## B. Variabel dan Indikator

Tabel 3.1 Tujuan, Variabel, dan Indikator Kajian

Tujuan	Variabel	Indikator
1. Mengetahui profil dan keaktifan MGMP peserta program penyusunan soal USBN	➤ Profil MGMP	a. Lama berdiri b. Jumlah sekolah yang terlibat c. Jumlah anggota d. Sumber pendanaan dan bersarnya serta pola pembiayaan kegiatan e. Struktur organisasi f. Kepemilikan rencana kegiatan g. Sarana dan fasilitas yang dimiliki h. Instruktur/mentor/fasilitator yang dimiliki berikut kriterianya i. Pengawasan kegiatan
2. Mengidentifikasi perencanaan program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP	➤ Input program	a. Organisasi
		b. Program dan kegiatan
		c. Peserta, fasilitator dan SDM lainnya
		d. Sarana dan peralatan pendukung (termasuk materi)
		e. pengelolaan
		f. Dana atau anggaran atau pembiayaan
		g. Pemantauan dan evaluasi
3. Mengidentifikasi pelaksanaan program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP	➤ Proses pelaksanaan program	a. Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
		b. Apakah peserta yang terlibat kegiatan mengikuti seluruh tahapan kegiatan selama program berlangsung dan komit menyuksekannya

Tujuan	Variabel	Indikator
		c. Apakah SDM yang tersedia didayagunakan secara maksimal
		d. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal
		e. Hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program
4. Mengidentifikasi hasil program/kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP, termasuk di dalamnya mengidentifikasi:	➤ Produk program	a. Apakah tersusun soal USBN dengan daya nalar tinggi
		b. Apakah terjadi peningkatan kompetensi khususnya pedagogik
		c. Apakah peserta didik mencapai hasil yang diharapkan (peningkatan kepemimpinan guru bagi peserta didiknya)
5. Mengidentifikasi cara diseminasi hasil program	➤ Dampak tambahan program	a. Adakah cara/konsep baru untuk diseminasi hasil program
		b. Hambatan apa saja yang dijumpai dalam diseminasi program
6. Mengidentifikasi cara guru mentransfer hasil program kepada peserta didik	➤ Cara transfer hasil ke peserta didik	a. Adakah metode baru dalam mentrasfer hasil program kepada peserta didik
		b. Hambatan apa saja yang dijumpai dalam transfer hasil ke peserta didik

### C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah ketua MGMP Mapel K-13 di SMP yang mengikuti program penyusunan soal USBN di MGMP. Penetapan sampel MGMP diawali dengan penetapan sampel

kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota sampel ditetapkan sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Penetapan sampel tersebut dilakukan melalui beberapa tahap:

Seluruh kabupaten/kota di Indonesia dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori berdasarkan nilai UNBK SMP tahun 2017/2018. Caran mengelompokkan kabupaten/kota tersebut adalah kabupaten/kota diurutkan berdasarkan nilai UNBK mulai dari tertinggi sampai ke terendah. Karena semuanya ada 514 kabupaten kota maka  $514:5=103$ , masing-masing kelompok terdiri atas 103 kabupaten/kota. Berikut ini disajikan lima kelompok kabupaten/kota dengan penamaan kelompok atau kategorinya.

Tabel 3.2 Pengelompokkan Kabupaten/Kota Berdasarkan Peringkat UNBK

No.	Nama Kelompok	Interval Peringkat UNBK
1.	Kelompok UNBK paling tinggi	001-103
2.	Kelompok UNBK tinggi	104-206
3.	Kelompok UNBK sedang	207 - 309
4.	Kelompok UNBK rendah	310 - 412
5.	Kelompok UNBK paling rendah	413 - 515

Tabel 3.3 Peringkat 20 Besar Tertinggi dan 20 Besar Terendah  
Kabupaten/Kota Menurut Capaian UNBK 2018

Peringkat	Kab/Kota	Nilai	Peringkat	Kab/Kota	Nilai
1	Kab Paniai	73,28	495	Kab Batubara	39,77
2	Kab Intan Jaya	71,65	496	Kota Subulussalam	39,56
3	Kab Sorong Selatan	70,64	497	Kab Aceh Barat Daya	39,41
4	Kab Lanny Jaya	70,16	498	Kab Bolmong Utara	39,31
5	Seram Bagian Timur	69,94	499	Kab Aceh Timur	39,25
6	Kab Buton Utara	69,43	500	Kab Majene	39,25
7	Kab Yalimo	69,07	501	Kab Tapanuli Utara	39,25
8	Kab Kepulauan Sula	68,80	502	Kab Lombok Utara	39,24
9	Kab Puncak	68,74	503	Kab Pidie	39,05
10	Kab Jayawijaya	67,79	504	Penual Abab Lematang Ilir	38,90
11	Kab Yahukimo	67,55	505	Kab Landak	38,87
12	Kab Tolikara	67,34	506	Kab Kepulauan Yapen	38,62
13	Kab Mamberamo Tengah	66,70	507	Kab Sampang	38,59



Peringkat	Kab/Kota	Nilai	Peringkat	Kab/Kota	Nilai
14	Kab Buru	66,69	508	Kab Dompu	38,49
15	Kab Buru Selatan	66,66	509	Kab Supiori	38,39
16	Kab Konawe Kepulauan	66,40	510	Kab Gayo Lues	38,36
17	Kab Seram Bagian Barat	66,37	511	Kab Bireuen	38,18
18	Kab Bulukumba	66,33	512	Kota Bima	37,48
19	Kab Nduga	66,15	513	Empat Lawang	37,04
20	Kab Mamberamo Raya	65,85	514	Kab Aceh Tenggara	36,42

*Sumber: Diolah dari Data UNBK SMP 2018 (Pusat Penilaian Pendidikan, 2018)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa banyak kabupaten/kota di wilayah Timur Indonesia seperti di Papua yang rerata nilai UNBK SMP-nya paling tinggi. Terlihat tak satupun kabupaten/kota di dalam Jawa yang berada di peringkat 20 besar. Kabupaten/kota di Jawa dengan peringkat tertinggi adalah Kota Magelang di peringkat 23 dengan capaiannya 64,18. Tentunya kita penasaran kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat berapa. Ternyata kabupaten/kota di Provinsi DKI dengan peringkat tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan yang berada di peringkat 77 dengan capaiannya 56,36. Dari sini terlihat bahwa capaian UNBK sama sekali tidak menunjukkan mutu pendidikan. Namun oleh karena belum ada ukuran mutu

pendidikan yang lain yang teradministrasi rapi secara nasional maka terpaksa digunakan capaian UNBK untuk menetapkan sampel lokasi.

### 1. Penetapan lokasi kajian

Pada langkah kedua, dari setiap kategori kabupaten/kota ditetapkan satu lokasi kajian. Penetapan lokasi tersebut tetap memperhatikan kemajuan ekonomi dan perwakilan wilayah. Berikut disajikan sampel lokasi yang ditetapkan.

Tabel 3.4 Penetapan Lokasi Kajian

Kelompok Kab/Kota Menurut UNBK	Sampel	Peringkat sampel	Rerata nilai	Perwakilan Wilayah
1. Tertinggi	Kota Bekasi Jabar	043	60,53	Jawa dan Bali
2. Tinggi	Kab. 50 kota Sumbar	187	50,71	Sumatera
3. Sedang	Kab. Flores Timur NTT (selanjutnya disingkat menjadi Flotim)	278	47,96	Nusa Tenggara, Maluku, Papua
4. Rendah	Kota Kendari Sultra	401	43,56	Sulawesi
5. Terendah	Kab Kapuas Hulu Kalbar	423	42,78	Kalimantan

## **2. Satuan pendidikan dan MGMP yang menjadi sasaran kajian**

Satuan pendidikan yang menjadi sasaran kajian adalah SMP. Mengapa SMP? Karena nilai UNBK SMP yang terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Padahal pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu SMP dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada MGMP agar melatih anggotanya (gurunya) memahami dan menerapkan K-13 dan juga bantuan (*block-grant*) kepada MGMP agar melatih gurunya menyusun soal yang menuntut siswa berpikir aras tinggi dalam menyelesaikannya. Berikut disajikan MGMP di kabupaten/kota sampel yang mendapat *block grant* tahun 2017 dari Pusat untuk menyusun soal USBN aras tinggi; soal yang penyelesaiannya menuntut siswa berpikir tingkat tinggi. MGMP ini akan dijadikan sampel. Bantuan Pusat hanya diberikan kepada dua MGMP Mapel non UN yaitu PKn dan IPS, Sedangkan MGMP Mapel lainnya yaitu Mapel UN: Mat, IPA, B. Indo dan B. Ing, dan Mapel non UN lainnya yaitu: PA (I/K), PJOK, SBK dan Prakarya. Ke delapan MGMP Mapel ini mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Penentuan MGMP Mapel lain ini untuk dijadikan sampel diserahkan kepada dinas pendidikan setempat karena dinas pendidikan setempat yang mengetahui dan menetapkan MGMP untuk menyusun soal USBN aras tinggi.

Tabel 3.5 MGMP yang Dapat Bantuan Dari Pusat

Sampel	Nama MGMP	Alamat		Nama Ketua MGMP
		Nama Jalan	Kecamatan	
Kota Bekasi	1. MGMP IPS Kota Bekasi	Jl. Pulo Sirih Timur Raya, Taman Galaxi Indah I	Kec. Bekasi Selatan	Jajang, M.Pd.
	2. MGMP PPKn Kota Bekasi	Jl.P. Sumatera Raya No. 1 Perumnas 3	Kec. Bekasi Timur	Iing Kartiwan, M.Pd
Kab. Lima Puluh Kota	1. MGMP IPS SMP/MTs Kab Lima Puluh Kota	SMPN 1 Kecamatan Harau Jl. Raya Km.7 Tanjung PatI	Kec. Harau	Harnieti, S. Pd
	2. MGMP PKN SMP/MTs Kab Lima Puluh Kota	Jalan Tanmalaka Nagari Simalanggang	Kec. Payakumbuh	Syofyardi, S.Pd
Kab. Flores Timur	1. MGMP IPS Rayon Wulanggintang	Wulanggintang	Kec. Wulang Gitang	Gaspar Lakebelek Tukan, S.Pd
	2. MGMP PKN Korwil Adonara I	Jl. Trans Adonara	Kec. Adonara Timur	Tala Donatus, S.Pd.PKN
Kota Kendari	1. MGMP IPS Kota Kendari	Jalan Sao-Sao lrg. SMP9 No. 3	Kec. Kadia	Hamsir, S.Pd
	2. MGMP PPKn SMP Kota Kendari	Jl. Mekar Jaya I	Kec. Kadia	La Halisi, S.Pd
Kab. Kapuas Hulu	1. MGMP Kab. Kapuas Hulu	Jalan D.I Panjaitan Putussibau	Kec. Putussibau Utara	Mila Prihartini, S.Pd

Sampel	Nama MGMP	Alamat		Nama Ketua MGMP
		Nama Jalan	Kecamatan	
	2. MGMP PKn SMP Kab. Kapuas Hulu	Jl. Lintas Selatan	Kec. Putussibau Selatan	Anita Yuliati, S.Pd

*Sumber data: Ditjen GTK, 2018.*

### 3. Responden kajian dan jumlahnya

Responden utama kajian adalah ketua MGMP. Selain itu kepala dinas pendidikan atau yang mewakili misalnya kepala bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) atau kepala seksi PTK juga akan menjadi responden. Berikut disajikan tabel tentang kriteria responden, jumlah responden per kabupaten/kota dan cara pengumpulan datanya.

Tabel 3.6 Kriteria Responden, Jumlah Responden dan Cara Pengumpulan Data

No.	Kriteria Responden	Sumber <i>Block grant</i>		Jumlah Orang	Cara pengumpulan data		
		Pusat	Daerah		DKT	Wawancara	Kuesioner
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kepala bidang PTK / Kepala Seksi PTK			1		√	
2.	Ketua MGMP PKn	√		1	√		√

No.	Kriteria Responden	Sumber <i>Block grant</i>		Jumlah Orang	Cara pengumpulan data		
		Pusat	Daerah		DKT	Wawancara	Kuesioner
3.	Ketua MGMP IPS	√		1	√		√
4.	Ketua MGMP Mat		√	1	√		√
5.	Ketua MGMP IPA		√	1	√		√
6.	Ketua MGMP B. Indo		√	1	√		√
7.	Ketua MGMP B. Ing		√	1	√		√
8.	Ketua MGMP PA(I/K))		√	1	√		√
9.	Ketua MGMP PJOK		√	1	√		√
10.	Ketua MGMP SBK		√	1	√		√
11.	Ketua MGMP Prakarya		√	1	√		√
	Jumlah			12			

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk keperluan kajian ini ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Sebelum dilakukan pengumpulan data primer ke lokasi kajian maka terlebih dahulu dikumpulkan data sekunder untuk keperluan penetapan sampel dan juga untuk diverifikasi ketika dilakukan pengumpulan data. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain.

Tabel 3.7 Data Sekunder yang Diperlukan

Jenis Data Sekunder	Sumber Data
1. Data UNBK kabupaten/kota	Puspendik Balitbang Dikbud
2. Data MGMP penerima <i>block grant</i> penyusunan soal USBN 2017	Ditjen GTK
3. Data MGMP <i>best practice</i>	Ditjen GTK dan Internet
4. Data PKG	Ditjen GTK
5. Hasil kajian terdahulu tentang MGMP	Internet, Perpustakaan
6. Panduan kegiatan dan dasar hukum pembentukan MGMP	Ditjen GTK dan Internet
7. Panduan pelaksanaan penyusunan soal USBN	Ditjen GTK dan Internet

Selain data sekunder, dikumpulkan pula data primer. Jenis data primer yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan kuesioner, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau *Focus Group Discussion (FGD)* dan juga melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT): Diskusi dilakukan dengan ketua MGMP seluruh Mapel K-13. Ada 10 Mapel K-13 yaitu yang dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu:
  - 1) MGMP Mapel non UN Penerima *block grant* dari Pusat untuk menyusun soal USBN aras tinggi yakni:

- a) Pendidikan Kewarganegaraan PKN)
  - b) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- 2) MGMP Mapel UN Penerima *block grant* dari Pemda setempat (dinas pendidikan untuk menyusun soal USBN aras tinggi:
- a) Matematika (Matematika)
  - b) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
  - c) Bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia)
  - d) Bahasa Inggris (Bahasa Inggris)
- 3) MGMP non Mapel UN Penerima *block grant* dari Pemda setempat (Dinas Pendidikan untuk menyusun soal USBN aras tinggi;
- a) Pendidikan Agama Islam/Katholik (PA(I/K))
  - b) Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan (PJOK)
  - c) Seni Budaya dan Keterampilan (SBK)
  - d) Prakarya

DKT akan dilakukan di hari kedua pelaksanaan pengumpulan data dengan lokasinya di kantor dinas pendidikan atau di sekolah. Lokasi DKT disiapkan oleh dinas pendidikan. Pelaksanaan DKT akan menggunakan panduan DKT yang telah disiapkan oleh tim kajian.

- b. Wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili misalnya kepala bidang PTK atau kepala seksi PTK. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan pada hari pertama pengumpulan data ketika melakukan koordinasi dengan



dinas pendidikan. Pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara.

- c. Pengisian kuesioner Ketua MGMP oleh seluruh peserta DKT. Tim kajian juga menyiapkan kuesioner ketua MGMP. Kuesioner akan diemail terlebih dahulu ke kontak person di dinas pendidikan. Kontak person diminta untuk meneruskan kuesioner tersebut untuk diisi terlebih dahulu oleh ketua MGMP dan diserahkan kepada tim pengumpul data pada saat pelaksanaan DKT.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan terhadap data kuantitatif secara univariat maupun bivariat. Secara univariat data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan distribusi frekuensi dan secara bivariat dengan tabulasi silang.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut: (i) merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait dengan upaya optimalisasi peran MGMP, (ii) penyajian data tentang upaya-upaya tersebut beserta tingkat keberhasilannya dan penyebab ketidak berhasilannya, serta (iii) penarikan simpulan dan verifikasi terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan beserta tingkat keberhasilannya dan dari situ ditemukan upaya-upaya yang masih harus dilakukan.

# 4

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil MGMP

Pada bagian ini disajikan profil penerima bantuan *block grant* dari Pemerintah Pusat (melalui Ditjen GTK) dan yang tidak mendapat bantuan *block grant* dari Pusat, namun mendapat dukungan/bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menyusun soal USBN. Dalam rangka meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah, Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk *block grant* bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tertentu pada jenjang SMP, melalui Surat Dirjen GTK dengan Nomor 011554/B/GT/2017 yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia. Bantuan pemerintah dimaksud untuk mendukung pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dialokasikan untuk setiap kabupaten/kota minimal satu

kelompok kerja sebagaimana tersebut di atas di seluruh provinsi. Program ini sebenarnya untuk memancing/memicu pemerintah daerah agar melakukan replikasi program dimaksud yang dibiayai APBD untuk mata pelajaran yang diujikan dalam USBN sesuai dengan ketersediaan anggaran di daerah. Pemerintah daerah diharapkan pula melakukan replikasi program untuk mata pelajaran di luar mata pelajaran yang diujikan dalam USBN dengan bobot 70 – 80 persen untuk pengembangan soal dan 20 – 30 persen untuk PPK.

Besarnya bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk *block grant* pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp.35.000.000,- dan hanya ditujukan untuk MGMP PKn dan IPS, karena sesuai Surat Edaran Ditjen GTK Kemendikbud MGMP yang mendapat bantuan *block grant* dari Pemerintah Pusat adalah dua MGMP Mapel non UN yaitu PKn dan IPS. MGMP yang berhak mendapat bantuan *block grant* tersebut ditunjuk oleh dinas pendidikan setempat. Semua daerah sampel yang dikunjungi telah menerima *block grant* tersebut. Di atas disebutkan salah satu tujuan pemberian *block grant* tersebut adalah untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Pada tahun 2017/2018 semua Mapel baik yang masih menggunakan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan = KTSP) maupun yang sudah menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) akan diujikan dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). MGMP mendapat kepercayaan untuk mengembangkan soal USBN untuk tujuan pelaksanaan ujian tersebut. Salah satu tujuan

pemberian *block grant* adalah untuk menyusun soal USBN. Dengan demikian maka MGMP Mapel PKn dan IPS telah memiliki dana untuk menyusun soal USBN. Lantas bagaimana dengan Mapel lainnya? MGMP Mapel lainnya akan mendapat dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk mereplikasi program Pusat dan menyusun soal USBN. Seperti apa profil MGMP yang ditunjuk oleh dinas pendidikan yang mendapat bantuan *block grant* dari Pusat dan MGMP Mapel K-13 lainnya yang mendapat tugas menyusun soal USBN, beberapa komponen profilnya dibahas dalam paragraf berikut.

### **1. Lama berdiri atau keberadaan MGMP**

Semakin lama MGMP terbentuk, maka semakin banyak pula guru melakukan pengembangan dan pemanfaatan wadah/forum pertemuan guru tersebut. Dengan waktu yang cukup, guru yang mengikuti MGMP diharapkan dapat bersama-sama belajar mengembangkan kompetensinya, khususnya kompetensi profesional dan pedagogik. Dalam forum MGMP tersebut, guru saling memberi masukan bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang benar, pembuatan soal, dan program pengembangan diri lainnya yang bermanfaat

Tabel 4.1 Lama (tahun) Berdiri/Keberadaan MGMP Penyusun Soal USBN

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	>5 tahun	>5 tahun	5 tahun	>5 tahun	>5 tahun
2. IPS	>5 tahun	>5 tahun	>5 tahun	>5 tahun	>5 tahun
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	>5 tahun	>5 tahun	2 Tahun	>5 tahun	4 tahun
2. IPA	>5 tahun	>5 tahun	4 Tahun	>5 tahun	--
3. B. Indo	>5 tahun	>5 tahun	1 Tahun	>5 tahun	>5 tahun
4. B. Ing	>5 tahun	>5 tahun	4 Tahun	>5 tahun	>5 tahun
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	>5 tahun	>5 tahun	4 Tahun	>5 tahun	>5 tahun
2. PJOK	>5 tahun	>5 tahun	5 Tahun	3 tahun	1 Tahun
3. SBK	>5 tahun	>5 tahun	4 Tahun	3 Tahun	1 Tahun
4. Prakarya	3 tahun	>5 tahun	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat umumnya sudah 5 atau lebih dari 5 tahun berdiri. Jadi tidak ada satupun MGMP yang baru berdiri yang ditunjuk dinas pendidikan menerima *block grant* dari Pusat, (ii) untuk MGMP Mapel UN: 14 dari 20 orang (70%) ketua MGMP menyampaikan bahwa keberadaan MGMP yang dipimpinnya sudah lebih dari atau sama dengan 5 tahun. Ada lima MGMP (25%) yang keberadaannya belum sampai 5 tahun dan ada satu MGMP, ketuanya tidak tahu kapan MGMP tersebut mulai ada,

(iii) Untuk MGMP Mapel non UN lainnya: terdapat 10 dari 19 orang (52,6%) ketua MGMP menyampaikan MGMP yang dipimpinnya keberadaannya sudah lebih dari atau sama dengan 5 tahun. Selanjutnya ada 7 dari 19 orang (36,8%) ketua MGMP menyampaikan bahwa MGMP yang dipimpinnya keberadaannya belum sampai 5 tahun, dan ada dua dari 19 MGMP (10,5%), ketuanya tidak tahu kapan MGMP yang dipimpinnya mulai ada.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebagian besar (34 dari 49 MGMP = 69,4%) MGMP yang ditunjuk untuk menyusun soal USBN keberadaannya sudah lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

## **2. Jumlah sekolah yang terlibat dalam MGMP**

Jumlah sekolah yang terlibat dalam MGMP dapat memberikan gambaran berapa banyak anggota dari MGMP tersebut. Jumlah sekolah yang terlibat bisa terdiri atas SMP negeri maupun swasta serta MTs negeri maupun swasta. Semakin banyak sekolah yang terlibat memang semakin bagus bagi pengembangan diri guru, namun juga ada dampak negatifnya yaitu mengakibatkan kegiatan yang diadakan menjadi kurang efektif. Bandingkan dengan besar kelas di SMP untuk pembelajaran yang efektif sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan minimal di SMP yaitu besar kelas ditetapkan berkisar antara 20-32 orang. Jika besar kelasnya di atas standar pelayanan minimal maka pembelajaran menjadi kurang efektif. Sebaliknya jika besar

kelasnya terlalu kecil juga akan kurang efektif karena biayanya terlalu besar.

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah/Madrasah yang Terlibat dalam MGMP

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	123	44	14	34	21
2. IPS	49	56	10	30	20
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	108	55	9	35	16
2. IPA	154	52	11	20	--
3. B. Indo	113	57	8	27	14
4. B. Ing	109	54	4	30	20
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	249	47	14	20	--
2. PJOK	198	52	3	32	14
3. SBK	147	5	20	18	--
4. Prakarya	101	22	5	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: Jumlah sekolah yang terlibat dalam MGMP berkisar dari 10 sekolah hingga 123 sekolah, (ii) untuk MGMP Mapel UN: jumlah sekolah berkisar dari empat sekolah hingga 154 sekolah sedangkan (iii) untuk Mapel non UN lainnya jumlah sekolah yang terlibat berkisar dari tiga sekolah hingga 249 sekolah.

Dari jumlah sekolah yang terlibat kita dapat membayangkan besar atau kecil suatu MGMP. Untuk yang jumlah sekolahnya besar jika per sekolah ada satu guru saja yang menjadi anggota MGMP, sudah pasti kelasnya akan besar dan untuk menyelenggarakan pertemuan tentunya membutuhkan suatu ruang pertemuan yang besar pula seperti aula. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk memperkecil jumlah sekolah yang terlibat agar kegiatan yang dilakukan lebih efektif. Kita dapat menggunakan patokan jumlah siswa SMP per kelas berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dimana disebutkan bahwa jumlah peserta didik per rombel minimal 20 dan maksimal 32 orang. Patokan ini dapat digunakan untuk menetapkan jumlah sekolah yang dilibatkan dalam sebuah MGMP.

### **3. Keanggotaan MGMP yang terdaftar dan aktif**

Salah satu tujuan dibentuknya MGMP adalah membantu guru untuk memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Selain itu untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, *classroom action research*, referensi, dan lain-lain ada kegiatan profesional yang membahas hasil-hasil tersebut bersama-sama.

Untuk pembelajarannya yang efektif maka jumlah anggota MGMP yang ikut kegiatan agar dibatasi, karena apabila kelasnya



terlalu besar maka pembelajaran menjadi kurang efektif. Jadi jumlah anggota bolehlah banyak tetapi ketika melaksanakan pertemuan sebaiknya dibagi dalam beberapa kelas dengan besar kelasnya dapat mengikuti besar rombel di SMP berdasarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 dimana disebutkan bahwa jumlah peserta didik per rombel minimal 20 dan maksimal 32 orang. Tapi bisa juga MGMP yang sudah ada dibuat menjadi beberapa sub rayon, dimana masing-masing sub rayon melingkupi sejumlah sekolah yang lokasinya berdekatan satu dengan yang lain.

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa: (1) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat; jumlah anggota MGMP terdaftar berkisar dari 15 - 518 orang. Jumlah anggota yang aktif berkisar antar 36,4 - 00 persen.

Tabel 4.3 Jumlah Anggota MGMP yang Terdaftar (Nominal) dan Aktif (Dalam %)

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	243 (41,2%)	95(42,1%)	20(100%)	73(54,8%)	25(100%)
2. IPS	518(--)	120(87,5%)	15(100%)	110(36,4%)	130(--)
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	--	80(100%)	25(100%)	158(100%)	16(--)
2. IPA	361(19,9%)	116(44,8%)	--	95(78,9%)	25(--)
3. B. Indo	200(52,0%)	116(58,6%)	11(63,6%)	125(48,0%)	--
4. B. Ing	441(27,2%)	170(70,6)	19(--)	189(--)	--

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	250(80%)	68(73,5%)	20(100%)	75(53,3%)	--
2. PJOK	190(63,3%)	57(52,6%)	3(100%)	56(80,4%)	14(100%)
3. SBK	147(81,6%)	8(100%)	50(72,0%)	18(27,8%)	--
4. Prakarya	101(24,8%)	23(87,0%)	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Terlihat bahwa ada dua MGMP (20 %) yang ketuanya tidak dapat memperkirakan jumlah anggota yang aktif, (2) untuk MGMP Mapel UN: jumlah anggota yang terdaftar berkisar antara 11 – 441 orang. Jumlah anggota yang aktif berkisar antara 19,9 – 100 persen. Terlihat bahwa ada empat dari 20 MGMP (20%) yang ketuanya tidak dapat memprediksi jumlah anggota yang aktif. Kemudian terdapat juga 4 dari 20 MGMP (20%) yang ketua MGMP-nya samasekali tidak mendata jumlah anggota MGMP-nya. Data terakhir ini menunjukkan bahwa MGMP tersebut manajemen administrasinya kurang bagus, (3) untuk MGMP Mapel non-UN lainnya: jumlah anggota yang terdaftar berkisar antara 3 – 250 orang. Jumlah anggota yang aktif berkisar antara 24,8-100 persen. Terlihat bahwa ada empat dari 19 MGMP (21,1%) yang ketua MGMP-nya sama sekali tidak mendata jumlah anggota MGMP-nya. Data terakhir ini menunjukkan bahwa MGMP tersebut manajemen administrasinya kurang bagus.

Dari data tentang jumlah anggota MGMP ini ada yang jumlah anggotanya sangat besar sampai ratusan orang. Jika semua anggota MGMP ini hadir mengikuti pertemuan, tentunya diperlukan suatu ruangan yang besar seperti aula, dan kenyataannya tidak semua sekolah memiliki aula, sehingga ada baiknya MGMP yang besar jumlah anggotanya ini dimekarkan menjadi beberapa sub rayon MGMP sehingga memudahkan dalam pengadaan pertemuan dan meningkatkan daya serap pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Caranya sebagaimana disampaikan sebelumnya beberapa sekolah yang lokasinya berdekatan membentuk sebuah sub rayon MGMP.

#### **4. Sumber dana**

Pendanaan kegiatan merupakan salah satu komponen penting untuk terlaksananya program MGMP sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya mengumpulkan dana dari berbagai sumber sudah semestinya dilakukan MGMP. Beberapa sumber dana yang mungkin dapat dimanfaatkan antara lain (Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kepada KKG/MGMP, Ditjen GTK, 2017):

##### ***a. Iuran anggota:***

Iuran anggota sudah mulai banyak diterapkan di banyak MGMP. Ketika MGMP tidak memiliki sumber dana untuk melaksanakan kegiatan atau sumber dana yang tersedia tidak mencukupi maka MGMP menarik iuran anggota sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 MGMP yang Menerapkan Iuran Anggota (Rp/tahun)

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	--	100.000	--	--	--
2. IPS	--	240.000	--	--	--
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	--	220.000	--	--	--
2. IPA	--	120.000	--	--	--
3. B. Indo	--	140.000	--	--	--
4. B. Ing	--	480.000	--	240.000	
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	120.000	240.000	--	--	--
2. PJOK	120.000	360.000	120.000	--	--
3. SBK	240.000	120.000	120.000	--	--
4. Prakarya	600.000	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Terlihat dari Tabel 4.4 bahwa banyak guru mulai sadar akan pentingnya pengembangan diri untuk meningkatkan profesionalismenya, terbukti dari kebersediaan mereka untuk membayar iuran sebagai anggota MGMP yang besarnya bervariasi dari Rp 100.000,-/tahun hingga Rp 600.000,- per tahun. Kabupaten Limapuluh Kota yang paling semarak dalam menerapkan iuran anggota MGMP. Mereka harus menarik iuran anggota MGMP karena kegiatan mereka dilakukan di gedung pertemuan yang sengaja disewa di tengah Kota Payakumbuh. Ini terpaksa dilakukan karena letak geografis wilayah Kabupaten

Limapuluh Kota mengelilingi Kota Payakumbuh. Dengan demikian, untuk memberikan rasa adil kepada setiap anggota MGMP, mereka mencari lokasi pertemuan yang memberikan kemudahan akses kepada setiap anggota.

Selain itu Kota Bekasi juga mulai banyak menerapkan iuran anggota. Hanya saja Ketua MGMP Kota Bekasi menyarankan agar penarikan iuran anggota MGMP untuk menopang keberhasilan kegiatan MGMP tersebut perlu dibuatkan landasan hukum atau regulasi untuk mengaturnya agar tidak dianggap menyalahi aturan. Hal tersebut dirasa dapat menjadi masalah di kemudian hari karena uang yang dikeluarkan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Yang menarik perhatian juga adalah bahwa MGMP PJOK di Kabupaten Flores Timur yang menarik iuran anggota Rp 10.000,-/bulan atau Rp 120.000,-/tahun. Mereka menaruh harapan besar pada forum MGMP yang diyakini dapat membantu meningkatkan profesionalisme guru. Ini merupakan salah satu praktek baik yang perlu dicontoh daerah lain. Kabupaten Kapuas Hulu sepertinya masih banyak berharap bantuan dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan MGMP, terlihat dari tidak diterapkannya iuran apapun untuk mendanai kegiatan MGMP.

***b. Dana bantuan operasional sekolah (BOS):***

Di Flores Timur sudah mulai diterapkan adanya bantuan dana BOS untuk mengoperasionalkan kegiatan MGMP. Berkat kerja sama yang baik antara Ketua MGMP Matematika dan PJOK

dengan kepala sekolah, kepala sekolah akhirnya bersedia mendanai kegiatan MGMP menggunakan dana BOS dengan formulanya sebagai berikut. Dari setiap anak diambilkan/dianggarkan dana BOS sebesar Rp 5.000,-/siswa per tahun.

**c. APBN:**

Melalui Ditjen GTK pada tahun 2017 MGMP PKn dan IPS mendapat bantuan *block grant* sebesar Rp 35.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan penyusunan soal USBN dan penguatan pendidikan karakter.

**d. APBD:**

Melalui dinas pendidikan semua MGMP Mapel K-13 yang tidak mendapat bantuan *block grant* mendapat bantuan dana untuk penyusunan soal USBN. Hanya saja dana ini lebih cenderung dibayarkan langsung sebagai honor kepada anggota MGMP yang ditugaskan untuk menyusun soal USBN, sebagaimana kasus di Kabupaten Kapuas Hulu.

**e. Komite sekolah/dewan pendidikan:**

Di Flores Timur MGMP PJOK berhasil menegosiasi komite sekolah dan kepala sekolah untuk membantu membiayai kegiatan MGMP. Besar bantuan dana yang diberikan kepada MGMP PJOK adalah sebesar Rp 500.000,- per tahun.

***f. Donatur yang tidak mengikat:***

Praktek baik ini perlu dicontoh di wilayah lain: MGMP Pendidikan Agama Katholik (PAK) Kabupaten Flores Timur sering mendanai kegiatan MGMP-nya dengan mengajukan proposal pelaksanaan kegiatan. Dana yang biasanya diajukan per kegiatan adalah sebesar 5 juta rupiah. Pengalaman mereka umumnya proposal pendanaan kegiatan MGMP mereka biasanya disetujui Kantor Kementerian Agama.

***g. Sumber dana MGMP lainnya:***

UPTD dinas pendidikan kabupaten (di kecamatan), LPMP, P4TK, unit produksi, hasil kerja sama, masyarakat dan sponsor lain yang sah dan tidak mengikat: Belum ada MGMP sampel yang mendapat bantuan dari sumber yang ada.

**5. Pola pembiayaan kegiatan MGMP**

Dalam pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah kepada MGMP, Ditjen GTK (2017) disampaikan bahwa dana yang diperoleh MGMP dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pengembangan melalui mekanisme penggunaan sesuai ketentuan. Semua dana yang telah dan masih dimiliki MGMP harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota melalui pelaporan kegiatan/keuangan yang disampaikan dalam rapat yang dihadiri anggota MGMP.

Dalam pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah kepada MGMP, Ditjen GTK, 2017, dirincikan komponen pembiayaan kegiatan MGMP sebagai berikut:

- a. Honor: bantuan pemerintah kepada MGMP dapat digunakan untuk membiayai honor pengarah, nara sumber dan panitia.
- b. Biaya transportasi: bantuan pemerintah kepada MGMP dapat digunakan untuk membiayai transportasi:
  - 1) pengarah;
  - 2) nara sumber;
  - 3) peserta; dan
  - 4) panitia;
- c. Biaya konsumsi dan akomodasi: bantuan pemerintah kepada MGMP dapat digunakan untuk membiayai:
  - 1) konsumsi panitia, nara sumber, dan peserta;
  - 2) akomodasi nara sumber, jika diperlukan.
- d. Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. Bahan, dan
- f. Biaya pelaporan.

Berikut disampaikan salah satu pola pendanaan kegiatan MGMP yang diterapkan MGMP PKn Kabupaten Limapuluh Kota. Pola pembiayaan ini bisa menjadi acuan dalam membuat panduan pendanaan kegiatan MGMP.



Tabel 4.5 Pola Pembiayaan Kegiatan MGMP (Contoh Dari MGMP PKn Kabupaten Limapuluh Kota)

No.	Komponen Biaya	% dari total biaya
1.	Honor instruktur dari luar MGMP	8,0
2.	Transport instruktur luar MGMP	1,2
3.	Intensif instruktur dari internal MGMP	9,0
4.	Pengadaan sarana/media pembelajaran	0,2
5.	Perawatan sarana/media pembelajaran	0,8
6.	Foto copy bahan/materi	1,5
7.	Pengadaan ATK	1,4
8.	Insentif pengurus MGMP	10,0
9.	Konsumsi pertemuan	34,4
10.	Transport peserta	28,6
11.	Honor dan transport pengarah	2,0
12.	STTP	1,4
13.	Dokumentasi dan penyusunan laporan	1,5
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa persentase pengeluaran yang paling tinggi adalah untuk konsumsi, diikuti di peringkat kedua adalah transport peserta.

## 6. Struktur organisasi MGMP

Dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan MGMP (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), disebutkan bahwa

organisasi MGMP di dalam pelaksanaan kegiatan memiliki kepengurusan organisasi dengan contoh sebagai berikut.

- a. Ketua KKG/MGMP merangkap anggota.
- b. Sekretaris KKG/MGMP merangkap anggota.
- c. Bendahara KKG/MGMP merangkap anggota.
- d. Bidang-bidang kepengurusan merangkap anggota.
- e. Anggota.

Anggota MGMP berasal dari guru mata pelajaran yang sama dari beberapa SMP/MTs/SMPLB. Keanggotaan MGMP diawali dengan pengisian biodata peserta yang selanjutnya setelah diisi diserahkan kepada pengurus MGMP. Pengurus menghimpun biodata anggota sebagai database keanggotaan MGMP di wilayahnya. Ketua MGMP dipilih oleh anggota dalam rapat anggota dan disahkan melalui surat keputusan dinas pendidikan kabupaten/kota.



Gambar 4.1 Contoh Struktur Organisasi MGMP

Setelah pemilihan Ketua MGMP, selanjutnya dilakukan penyusunan kepengurusan MGMP. Kepengurusan MGMP ini dapat meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing MGMP. Setelah pengurus terpilih dan susunan pengurus telah lengkap, ketua terpilih mengusulkan susunan pengurus MGMP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Kepengurusan MGMP memiliki masa kerja selama empat tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa kerja selesai. Bila memperhatikan struktur organisasi KKG/MGMP, adanya ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang, semua MGMP pada dasarnya telah memenuhi ketentuan tersebut serta MGMP Mapel di daeran sasaran sudah terpenuhi, yaitu adanya Ketua, sekretaris dan bendahara. Berikut disajikan kenyataan tentang struktur organisasi MGMP baik yang menerima maupun yang tidak menerima bantuan *block grant* Pusat.

Tabel 4.6a Struktur Organisasi MGMP PKn (Penerima *Block Grant* Pusat)

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
1. Ketua	√	√	√	√	√
2. Sekretaris	√	√	√	√	√
3. Bendahara	√	√	√	√	√
4. Ketua bidang perencanaan dan	√	√	√	√	√

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
pelaksanaan program					
5. Ketua bidang organisasi, adm, sarpras	√	√	√	√	√
6. Ketua bidang humas dan kerja sama	√	--	√	√	√
7. Wakil ketua	--	--	--	--	--

Dari Tabel 4.6a terlihat bahwa struktur organisasi MGMP PKn di lima lokasi kajian (sebagai perwakilan MGMP Mapel non UN penerima *block grant* dari Pusat) hampir seluruhnya memiliki struktur organisasi yang sama yang terdiri atas 6 unsur pengurus yaitu (i) Ketua, (ii) Sekretaris, (iii) Bendahara, (iv) Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program, (v) Ketua bidang organisasi, administrasi, sarana prasarana, dan (vi) Ketua bidang Humas dan kerja sama. Sangat disayangkan bahwa MGMP PKn Kabupaten Limapuluh Kota ternyata tidak memiliki pengurus MGMP yang membidangi Humas dan kerjasama.

Tabel 4.6b Struktur Organisasi MGMP Matematika (Mapel UN)

Struktur Organisasi	MGMP Matematika				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
1. Ketua	√	√	√	√	√
2. Sekretaris	√	√	√	√	√
3. Bendahara		√	√	√	√

Struktur Organisasi	MGMP Matematika				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
4. Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program	√	--	--	--	√
5. Ketua bidang organisasi, adm, sarpras	√	--	--	--	√
6. Ketua bidang humas dan kerja sama	√	--	--	--	√
7. Wakil ketua	--	--	--	--	--

Dari Tabel 4.6b terlihat bahwa struktur organisasi MGMP Matematika di lima lokasi kajian (sebagai perwakilan MGMP Mapel UN non penerima *block grant* dari Pusat) hanya dua dari lima lokasi kajian memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu terdiri atas enam unsur kepengurusan yaitu (i) Ketua, (ii) Sekretaris, (iii) Bendahara, (iv) Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program, (v) Ketua bidang organisasi, administrasi, sarana prasarana, dan (vi) Ketua bidang humas dan kerja sama. Sedangkan tiga dari lima MGMP Matematika tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap. Ketiga MGMP Mat ini yaitu dari Limapuluh Kota, Flores Timur dan Kota Kendari, yang hanya memiliki tiga unsur kepengurusan yaitu (i) Ketua, (ii) Sekretaris, (iii) Bendahara.

Tabel 4.6c Stuktur Organisasi MGMP PA(I/K) (Mapel non UN)

Struktur Organisasi	MGMP PA(I/K)				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
1. Ketua	√	√	√	√	√
2. Sekretaris	√	√	√	√	√
3. Bendahara	√	√	√	√	√
4. Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program	√	--	--	√	√
5. Ketua bidang organisasi, adm, sarpras	√	--	--	√	√
6. Ketua bidang humas dan kerja sama	√	--	--	√	√

Dari Tabel 4.6c terlihat bahwa struktur organisasi MGMP PA(I/K) di lima lokasi kajian (sebagai perwakilan MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat), hanya tiga dari lima lokasi kajian memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu terdiri atas enam unsur kepengurusan yaitu (i) Ketua, (ii) Sekretaris, (iii) Bendahara, (iv) Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program, (v) Ketua bidang organisasi, administrasi, sarana prasarana, dan (vi) Ketua bidang Humas dan kerja sama. Sedangkan dua dari lima MGMP PA(I/K) tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap. Kedua MGMP PA(I/K) ini

yaitu dari Limapuluh Kota, dan Flores Timur, yang hanya memiliki 3 unsur kepengurusan saja yaitu (i) Ketua, (ii) Sekretaris, (iii) Bendahara.

Jadi terlihat bahwa struktur organisasi MGMP penerima *block grant* dari Pusat umumnya lebih lengkap daripada MGMP non penerima *block grant* dari Pusat. Sehingga pihak yang berwenang agar lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang struktur organisasi kepengurusan MGMP agar mengikuti standar yang telah dibuat.

## 7. Kepemilikan perencanaan kegiatan tahun sebelumnya

Pada bagian ini disajikan kepemilikan perencanaan program tahun sebelumnya. Perencanaan memang sangat penting karena perencanaan yang mantap akan sangat membantu kelancaraan pelaksanaan kegiatan rutin MGMP.

Tabel 4.7 Kepemilikan Rencana Kegiatan Tahun Sebelumnya

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2. IPS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
2. IPA	Ya	Ya	Ya	Ya	--
3. B. Indo	Ya	Ya	Tidak	Ya	--

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
4. B. Ing	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	--	Ya	Ya	--	--
2. PJOK	ya	Ya	Ya	Ya	tidak
3. SBK	Ya	Ya	tidak	Ya	tidak
4. Prakarya	Ya	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa seluruh (100%) MGMP penerima *block grant* Pusat memiliki perencanaan kegiatan. Kepemilikan perencanaan kegiatan tahunan ini sangat membantu pelaksanaan MGMP agar pelaksanaan dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Besar harapan semoga setelah MGMP tidak lagi menerima *block grant*, kegiatan perencanaan tersebut selalu dibuat/disusun, jadi dengan/tanpa bantuan *block grant* setiap MGMP harus selalu membuat rencana kegiatan.

Terlihat dari tabel 4.7 bahwa untuk MGMP Mapel UN; ternyata 16 dari 20 orang (80%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka membuat perencanaan kegiatan tahunan. Ada dua dari 20 orang (10%) ketua MGMP yang menyampaikan mereka tidak membuat rencana kegiatan, dan juga ada dua dari 20 orang (10%) ketua MGMP tidak yakin dalam membuat rencana kegiatan tahunan. Dengan demikian, totalnya ada empat dari 20 orang (20%) ketua MGMP yang melaksanakan kegiatan tanpa rencana. Tentunya ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah



agar lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan MGMP.

Terlihat pula bahwa 10 dari 19 orang (52,6%) Ketua MGMP Mapel non UN lainnya menyampaikan bahwa mereka memiliki perencanaan kegiatan tahunan. Sebanyak tiga dari 19 orang (15,8%) ketua MGMP menyampaikan memiliki perencanaan kegiatan, sedangkan enam dari 19 orang (31,6%) ketua MGMP tidak yakin menyiapkan rencana kegiatan tahunan sehingga secara keseluruhan ada 47,4 persen ketua MGMP Mapel non UN lainnya melaksanakan kegiatan tanpa perencanaan yang jelas. Ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar lebih aktif lagi dalam mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan MGMP sehingga pelaksanaan kegiatan MGMP menjadi lebih baik.

#### **8. Penyusun perencanaan kegiatan tahunan MGMP**

Penyusun rencana kegiatan tahunan MGMP menjadi tanggung jawab ketua MGMP. Dengan demikian, jika ketua MGMP berhalangan maka penyusun rencana tahunan dapat ditugaskan kepada pengurus MGMP lainnya atau anggota MGMP yang kompeten. Dalam tabel berikut disajikan siapa penyusun rencana kegiatan tahunan MGMP.

Tabel 4.8 Penyusun Rencana Kegiatan Tahunan MGMP

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	Pengurus & anggota MGMP, kasek sekolah inti	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus MGMP	Pengurus MGMP
2. IPS	Pengurus MGMP	Pengurus MGMP	anggota MGMP	Pengurus MGMP	Pengurus MGMP
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
3. Mat	Pengurus MGMP	Pengurus & anggota MGMP, pengawas	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus & anggota MGMP
4. IPA	Ketua MGMP	Pengurus & anggota MGMP	Ketua MGMP	Pengurus & anggota MGMP	--
5. B. Ind	Pengurus MGMP	Pengurus & anggota MGMP	--	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus MGMP
6. B. Ing	Pengurus MGMP	Pengurus MGMP	Pengurus & kasek sekolah inti	Pengurus & kasek sekolah inti	Pengurus MGMP
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus & anggota MGMP, pengawas	anggota MGMP	Pengurus & kasek sekolah inti	Pengurus MGMP

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
2. PJO	Pengurus MGMP	Pengurus & anggota MGMP	Pengurus MGMP	Pengurus & anggota MGMP	--
3. SBK	Pengurus MGMP	Pengurus MGMP	Pengurus & anggota MGMP	--	Pengurus MGMP
4. Prakarya	Pengurus MGMP	Pengurus & anggota MGMP	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: sembilan dari 10 orang (90%) ketua MGMP menyampaikan bahwa yang menyusun rencana tahunan kegiatan MGMP adalah ketua atau pengurus MGMP; ada yang dibantu oleh anggota MGMP dan ada juga yang dibantu oleh kepala sekolah (kasek) sekolah inti, dan ada pula yang dibantu oleh anggota MGMP dan kasek sekolah inti. Ada satu dari 10 orang (10%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa yang menyusun rencana kegiatan tahunan adalah anggota MGMP. Sebenarnya tidak masalah siapa yang menyusun rencana kegiatan tahunan MGMP, yang terpenting adalah perencanaan itu ada karena dengan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lancar dan terkontrol. Namun tentunya yang bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan kegiatan adalah tetap ketua MGMP. (ii) Untuk

MGMP Mapel UN: terlihat bahwa 18 dari 20 orang (90%) ketua MGMP menyampaikan bahwa yang menyusun rencana tahunan kegiatan MGMP adalah ketua atau Pengurus MGMP; hanya dua dari 20 orang (10%) ketua MGMP yang melaksanakan kegiatan MGMP tanpa ada perencanaan, (iii) Untuk MGMP Mapel non UN lainnya non penerima *block grant* Pusat: 13 dari 19 orang (73,7%) ketua MGMP menyampaikan bahwa yang membuat perencanaan kegiatan tahunan MGMP adalah ketua atau pengurus MGMP; salah satu dari 19 orang (5,3%) ketua MGMP menyampaikan bahwa yang membuat rencana tahunan kegiatan MGMP adalah anggota MGMP; kemudian empat dari 19 orang (21,1%) ketua MGMP melaksanakan kegiatan MGMP tanpa direncanakan terlebih dahulu (tidak membuat dokumen perencanaan). Di atas telah disebutkan bahwa penyusun rencana kegiatan memang seharusnya ketua MGMP, namun masih saja ada ketua MGMP yang menyampaikan bahwa yang menyusun rencana tahunan kegiatan adalah anggota MGMP. Namun hal ini masih lebih baik daripada tidak membuat perencanaan kegiatan sama sekali.

## **9. Ketersediaan Instruktur**

Ketersediaan instruktur di MGMP sangat penting karena kegiatan akan lebih lancar terlaksana apabila ada instruktur. Jika MGMP ada sumber dana tentunya akan lebih baik lagi untuk mendatangkan instruktur eksternal, karena harus membayar honor dan transport instruktur eksternal tersebut, namun jika

MGMP tidak memiliki sumber dana yang memadai untuk operasional kegiatan, maka instruktur internal sudah bisa membantu pelaksanaan kegiatan MGMP. Berikut disajikan tabel tentang kepemilikan instruktur internal.

Tabel 4.9 Jumlah Instruktur Internal yang Dimiliki

Lokasi Kajian	Penerima Block GRANT		Mapel UN					Mapel Bukan UN Lainnya			
	PKn	IPS	MAT	IPA	B. INDO	B. ING	PAI	PJOK	SBK	PRK	
Bekasi	Ya, 3 org	Ya, 16 org	--	Ya, 2 org	Ya, 17 org	Ya, 16 org	Ya, 1 org	Ya, 3 org	Ya, 2 org	--	
50 Kota	Ya, 1 org	Ya, 3 org	--	Ya, 5 org	Ya, 5 org	Ya, 2 org	Ya, 2 org	Ya, 2 org	Ya, 4 org	Ya, 2 org	
Flotim	--	--	Ya, 1 org	--	--	Ya, 11 org	Ya, 3 org	Ya, 3 org	Ya, 3 org	--	
Kendari	Ya, 4 org	Ya, 3 org	Ya, 5 org	Ya, 2 org	Ya, 3 org	Ya, 6 org	Ya, 3 org	Ya, 2 org	Ya, 3 org	--*)	
Kapuas Hulu	Ya, 2 org	Ya, 2 org	--	--	--	Ya, 2 org	Ya	--	Ya, 2 org	--	

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: delapan dari 10 orang (80%) ketua MGMP menyampaikan MGMP yang dipimpinnya memiliki instruktur, bahkan ada yang memiliki lebih dari 10 instruktur internal seperti MGMP IPS Kota Bekasi yang memiliki sampai 16 orang. Terdapat dua dari 10 orang (20%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa MGMP yang dipimpinnya tidak memiliki instruktur internal. Informasi ini patut menjadi perhatian pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam menyeleksi MGMP penerima *block grant*.

Mungkin kepemilikan instruktur internal dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam seleksi MGMP penerima bantuan *block grant*. (ii) Selanjutnya untuk MGMP Mapel UN: ada 13 dari 20 orang (65%) ketua MGMP menyampaikan bahwa MGMP yang dipimpinnya memiliki instruktur internal. Sisanya sebanyak 7 dari 20 orang (35%) ketua MGMP tidak memiliki instruktur internal, (iii) lebih lanjut untuk MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* Pusat: sebanyak 15 dari 19 orang (78,9%) ketua MGMP menyampaikan bahwa MGMP yang dipimpinnya memiliki instruktur internal, sisanya sebanyak 4 dari 19 orang (21,1%) menyampaikan bahwa MGMP yang dipimpinnya tidak memiliki instruktur internal. Situasi dimana suatu MGMP tidak memiliki instruktur internal sebenarnya cukup memprihatinkan karena instruktur sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan di MGMP. Sebaiknya

pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kebutuhan instruktur internal di MGMP, karena tanpa instruktur kegiatan MGMP sulit terlaksana. Pemerintah dapat merekrut per MGMP satu orang anggota untuk dilatih menjadi instruktur internal.

#### **10. Mekanisme pemilihan instruktur internal**

Dalam hal mekanisme pemilihan instruktur, masing-masing daerah dari lima daerah sasaran mekanisme pemilihannya berbeda-beda baik pada kelompok MGMP penerima *block grant*, kelompok MGMP Mapel UN, maupun MGMP Mapel non UN lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 4.10 Mekanisme Pemilihan Instruktur Internal

MGMP	Kabupaten/Kota				Kendari	Kapuas Hulu
	Bekasi	50 Kota	Flotim			
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat						
1. PKn	Dimusyawarahkan oleh anggota, kemudian calon terpilih diusulkan kepada kepala dinas lalu ditetapkan jadi instruktur	Ditunjuk ketua MGMP, kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh kepala dinas	--	Dimusyawarahkan oleh anggota, kemudian calon terpilih diusulkan kepada kepala dinas lalu ditetapkan	Penunjukan anggota yang pernah ikut pelatihan instruktur	
2. IPS	Dipilih di antara anggota berdasarkan tingkatan kompetensinya	Dimusyawarahkan oleh anggota, kemudian calon terpilih diusulkan kepada kepala dinas, lalu ditetapkan	Penunjukkan anggota yang pernah mengikuti Diklat guru matapelajaran tingkat nasional	Dimusyawarahkan oleh anggota, kemudian calon terpilih diusulkan kepada kepala dinas, lalu ditetapkan. Bila ada anggota yang jadi instruktur nasional maka akan kangsung ditunjuk	Diusulkan oleh pengurus MGMP	
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat						
1. Mat	Ditunjuk oleh Ketua MGMP, diusulkan untuk	Ditentukan oleh Dinas	Ditunjuk K3S	Dimusyawarahkan oleh anggota kemudian calon	Dimusyawarahkan oleh anggota	

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
	ditetapkan oleh Kepala Dinas			terpilih diusulkan untuk ditetapkan oleh kepala dinas	kemudian calon terpilih diusulkan untuk ditetapkan oleh kepala dinas
2. IPA	Instruktur nasional akan langsung ditunjuk menjadi instruktur	Instruktur K-13 dijadikan instruktur internal oleh pengurus	--	--	--
3. B. Indo	Ditunjuk oleh ketua MGMP kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh kepala dinas	Ditunjuk oleh ketua dan pengurus MGMP	--	Mengikuti hasil musyawarah MGMP	Ditunjuk langsung kepada anggota yang pernah pelatihan jadi instruktur
4. B. Ing	Ditunjuk oleh ketua MGMP kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh kepala dinas	Ditunjuk anggota menjadi instruktur kabupaten K-13	Dimusyawarahkan oleh anggota kemudian calon terpilih diusulkan dan ditetapkan kepala dinas	Ditetapkan berdasarkan nilai UKG	diusulkan oleh pengurus MGMP
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	Dimusyawahkan oleh pengurus dan anggota	--	--	Dimusyawahkan oleh anggota kemudian calon	Dimusyawahkan oleh anggota

MGMP	Kabupaten/Kota			
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari
				Kapas Hulu kemudian calon terpilih diusulkan dan ditetapkan kepala dinas
2. P/OK	Ditunjuk ketua MGMP	Dimusyawarahkan anggota	Ditunjuk dinas pendidikan	Dimusyawarahkan bersama --
3. SBK	penunjukan pengurus MGMP yang memiliki tugas sebagai instruktur nasional atau instruktur kabupaten/kota	Dimusyawarahkan oleh anggota kemudian calon terpilih diusulkan dan ditetapkan kepala dinas	Ditunjuk oleh Ketua MGMP kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh kepala dinas	Dimusyawarahkan oleh anggota kemudian calon terpilih diusulkan dan ditetapkan kepala dinas
4. Prakarya	Dimusyawarahkan oleh anggota kemudian calon terpilih diusulkan dan ditetapkan kepala dinas	Dimusyawarahkan oleh anggota kemudian calon terpilih diusulkan dan ditetapkan kepala dinas	--  --*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa baik untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, MGMP Mapel UN maupun MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat, terlihat bahwa dalam hal pemilihan anggota menjadi instruktur tidak dilakukan melalui suatu mekanisme pemilihan yang baku. Untuk itu perlu dibuatkan mekanisme baku bagaimana seorang anggota dapat ditetapkan menjadi instruktur internal. Mekanisme yang paling demokratis adalah penentuan calon dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh anggota, lalu calon terpilih diusulkan kepada kepala dinas pendidikan untuk ditetapkan dengan surat keputusan.

#### **11. Sarana prasarana yang dibutuhkan MGMP dan status kepemilikannya**

Tim kajian ini berhasil mengidentifikasi sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh MGMP agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Selama ini MGMP lebih banyak menggunakan sarana dan prasarana sekolah. Ini merupakan solusi sementara yang tepat karena sarana prasarana sekolah merupakan barang milik negara, sehingga apabila dimanfaatkan oleh MGMP maka secara otomatis mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan. Berikut disajikan kenyataan tentang kepemilikan sarana dan prasarana pada MGMP penerima maupun non penerima *block grant* Pusat sebagai berikut.

Tabel 4.11a Fasilitas yang Dibutuhkan MGMP Penerima *Block Grant* Pusat dan Status Kepemilikan

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. MGMP PKn					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis/ <i>flip chart</i>	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. In-focus	Milik sekolah	Milik MGMP	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
4. Printer	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik pribadi
5. Wi-Fi/internet	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik pribadi
6. Laptop	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik pribadi
7. Komputer	--	--	--	--	--
B. MGMP IPS					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis/ <i>flip chart</i>	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. In-focus	Milik sekolah	Milik MGMP	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah
4. Printer	Milik sekolah	Milik MGMP	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik pribadi
5. Wi-Fi/internet	Milik sekolah	--	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik sekolah

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
6. Laptop	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik pribadi
7. Komputer	Milik sekolah	--	--	Milik pribadi	Milik pribadi

Tabel 4.11 menyajikan status kepemilikan sarana parsarana pada MGMP. Terlihat bahwa umumnya fasilitas yang dibutuhkan MGMP adalah milik sekolah. Fasilitas yang digunakan yang status kepemilikannya milik MGMP jumlahnya sangat terbatas, yaitu *in-focus* dan printer. Untuk *in-focus*, dua dari 10 orang (20%) ketua MGMP; dan untuk printer hanya satu dari 10 orang (10%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa fasilitas tersebut milik MGMP. Ada pula fasilitas yang digunakan merupakan milik pribadi namun jumlahnya juga sangat terbatas. Contohnya: laptop dan komputer.

Selain itu ada fasilitas yang digunakan MGMP disewa sebagaimana terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota dan di Kota Kendari. Di Kabupaten Limapuluh Kota: fasilitas ruang pertemuan dan papan tulis yang digunakan MGMP PKn disewa. Hal ini dilakukan karena letak geografis Kabupaten Limapuluh Kota yang mengelilingi Kota Payakumbuh menyebabkan jarak satu sekolah dengan sekolah lainnya berjauhan sehingga diputuskan untuk menyewa ruang pertemuan di pusat Kota Payakumbuh agar setiap anggota MGMP yang ikut kegiatan

mengeluarkan biaya transportasi yang kurang lebih sama. Selanjutnya MGMP IPS di Kota Kendari menyewa *in-focus* untuk melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya dalam tabel berikut disajikan status kepemilikan fasilitas yang digunakan MGMP Mapel UN di seluruh daerah sampel.

Tabel 4.11b Fasilitas yang Dibutuhkan MGMP Mapel UN non Penerima *Block Grant* Pusat dan Satus Kepemilikan

Struktur Organisasi	MGMP Matematika				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. MGMP Mat					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. <i>In-focus</i>	Milik sekolah	Milik MGMP	--	Milik sekolah	Milik sekolah
4. Printer	--	Milik pribadi	--	Milik sekolah	Milik pribadi
5. Wi-Fi / internet	--	Milik Pribadi	--	Milik sekolah	Milik sekolah
6. Laptop	Milik sekolah	Milik Pribadi	--	Milik sekolah	Milik pribadi
7. Komputer	--	Milik pribadi	--	Milik sekolah	--
B. MGMP IPA					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	--	--

Struktur Organisasi	MGMP Matematika				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
2. Papan tulis	Milik sekolah	Milik sekolah	--	--	--
3. <i>In-focus</i>	Milik sekolah	Milik MGMP	--	--	--
4. Printer	Milik MGMP	Milik MGMP	Milik sekolah	--	--
5. Wi-Fi / internet	Milik sekolah	Milik pribadi		--	--
6. Laptop	Milik pribadi	Milik MGMP	Milik sekolah	--	--
7. Komputer	Milik sekolah		Milik sekolah	--	--
C. MGMP B. Indo					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. <i>In-focus</i>	Milik sekolah	Milik MGMP	Milik sekolah		Milik MGMP
4. Printer	Milik sekolah	Milik MGMP	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik MGMP
5. Wi-Fi / internet	Milik sekolah	--	Milik sekolah	Milik sekolah	--
6. Laptop	Milik pribadi	Milik MGMP	Milik sekolah	--	Milik MGMP
7. Komputer	Milik pribadi	--	Milik sekolah	--	--
D. MGMP B. Ing					



Struktur Organisasi	MGMP Matematika				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
1. Ruang pertemuan	sewa	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis	sewa	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. <i>In-focus</i>	sewa	Milik MGMP	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik sekolah
4. Printer	Milik MGMP	Milik MGMP	Milik sekolah	Milik pribadi	--
5. Wi-Fi / internet	Milik sekolah	--	--	Milik pribadi	--
6. Laptop	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik MGMP
7. Komputer	Milik pribadi	--	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik sekolah

Sama seperti di MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, dari Tabel 4.11b terlihat pula bahwa umumnya fasilitas yang dibutuhkan MGMP Mapel UN adalah milik sekolah. Kasus di Kabupaten Limapuluh Kota: ruang pertemuan dan papan tulis yang digunakan disewa yaitu kasus pada MGMP Mat, B. Indo dan B. Inggris. Sedangkan kasus di Kota Bekasi ruang pertemuan serta papan tulis dan *in-focus* khusus pada MGMP B. Ing disewa. Untuk kasus di Kabupaten Limapuluh Kota penyewaan ruang pertemuan dan papan tulis ini dilakukan karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya letak geografis Kabupaten Limapuluh Kota yang mengelilingi Kota Payakumbuh menyebabkan jarak

satu sekolah dengan sekolah lainnya berjauhan sehingga diputuskan untuk menyewa ruang pertemuan di pusat Kota Payakumbuh agar setiap anggota MGMP yang ikut kegiatan mengeluarkan biaya transportasi yang kurang lebih sama.

Terdapat beberapa jenis fasilitas lainnya yang digunakan seperti printer, wifi, laptop, komputer dan *in-focus* adalah milik pribadi namun jumlahnya terbatas. Sebagai contoh printer yang digunakan merupakan milik pribadi disampaikan oleh empat dari 20 orang (20 persen) ketua MGMP. Contoh lainnya *in-focus* yang digunakan merupakan milik pribadi disampaikan oleh 3 dari 20 orang (15 persen) ketua MGMP, sedangkan laptop milik pribadi yang digunakan disampaikan oleh tujuh dari 20 orang (35 persen) ketua MGMP.

Lebih lanjut terdapat pula fasilitas yang digunakan yang merupakan milik MGMP namun jumlahnya juga masih sangat terbatas. Contoh: *In-focus* disampaikan oleh lima dari 20 orang (25 persen) ketua MGMP. Laptop disampaikan oleh empat dari 20 orang (20 persen) ketua MGMP. Printer disampaikan oleh enam dari 20 orang (30 persen) ketua MGMP. Selanjutnya dalam tabel berikut disajikan status kepemilikan fasilitas yang digunakan MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* Pusat di seluruh daerah sampel.

Tabel 4.11c Fasilitas yang Dibutuhkan MGMP Mapel non UN  
Lainnya non Penerima *Block Grant* Pusat dan  
Satus Kepemilikan

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. MGMP PA(I/A)					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis	Milik sekolah	Sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. In-focus	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
4. Printer	Milik MGMP	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
5. Wi-Fi / Internet	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
6. Laptop	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik sekolah
7. Komputer	--	Milik sekolah	--	Milik sekolah	--
B. MGMP PJOK					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	--
2. Papan tulis	Milik sekolah	sewa	Milik sekolah	Milik sekolah	--
3. In-focus	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik Pribadi	--
4. Printer	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik Pribadi	--

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
5. Wi-Fi / Internet	--	Milik sekolah	--	Milik Sekolah	--
6. Laptop	--	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik Pribadi	--
7. Komputer	--	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik Pribadi	--
C. MGMP SBK					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
2. Papan tulis	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
3. In-focus	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik sekolah
4. Printer	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik pribadi	Milik sekolah	Milik sekolah
5. Wi-Fi / Internet	Milik pribadi	-	Milik sekolah	Milik sekolah	Milik sekolah
6. Laptop	Milik pribadi	Milik Pribadi	Milik pribadi	Milik pribadi	Milik sekolah
7. Komputer	Milik pribadi	-	Milik pribadi	-	Milik sekolah
D. MGMP Prakarya					
1. Ruang pertemuan	Milik sekolah	Milik sekolah	--	--	--
2. Papan tulis	Milik sekolah	Milik sekolah	--	--	--
3. <i>In-focus</i>	Milik sekolah	Milik sekolah	--	--	--

Struktur Organisasi	MGMP PKn				
	Kota Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
4. Printer	--	Milik sekolah	--	--	--
5. Wi-Fi / internet	--	Milik sekolah	--	--	--
6. Laptop	Milik pribadi	Milik pribadi	--	--	--
7. Komputer	--	--	--	--	--

Sama seperti di MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat dan MGMP Mapel UN, dari tabel 4.11c terlihat pula bahwa umumnya fasilitas yang dibutuhkan MGMP Mapel non UN lainnya untuk melancarkan pelaksanaan kegiatannya adalah milik sekolah. Kasus di Kabupaten Limapuluh Kota: ruang pertemuan dan papan tulis yang digunakan disewa yaitu kasus pada MGMP PA(I/K) dan PJOK. Untuk kasus di Kabupaten Limapuluh Kota penyewaan ruang pertemuan dan papan tulis ini dilakukan karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya letak geografis Kabupaten Limapuluh Kota yang mengelilingi Kota Payakumbuh menyebabkan jarak satu sekolah dengan sekolah lainnya berjauhan sehingga diputuskan untuk menyewa ruang pertemuan di pusat Kota Payakumbuh agar setiap anggota MGMP yang ikut kegiatan mengeluarkan biaya transportasi yang kurang lebih sama.

Terdapat beberapa jenis fasilitas lainnya yang digunakan seperti printer, laptop dan *in-focus* adalah milik pribadi namun

jumlahnya terbatas. Sebagai contoh printer yang digunakan merupakan milik pribadi disampaikan oleh tiga dari 19 orang (15 persen) ketua MGMP. Contoh lainnya *in-focus* yang digunakan merupakan milik pribadi disampaikan oleh 1 dari 20 orang (5 persen) ketua MGMP, sedangkan laptop milik pribadi yang digunakan disampaikan oleh 10 dari 20 orang (50 persen) ketua MGMP. Lebih lanjut terdapat pula fasilitas yang digunakan yang merupakan milik MGMP namun jumlahnya juga masih sangat terbatas. Contoh: printer disampaikan oleh satu dari 20 orang (5 persen) ketua MGMP.

Dari uraian di atas diketahui bahwa fasilitas yang dibutuhkan MGMP umumnya milik sekolah, meski ada sebagian kecil milik pribadi, milik MGMP atau disewa. Namun sesungguhnya MGMP perlu memiliki fasilitas tersebut agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lancar. Fasilitas yang perlu dimiliki sendiri oleh MGMP adalah: laptop dan printer untuk memudahkan pembuatan laporan, kemudian *in-focus* juga perlu dimiliki sendiri oleh MGMP. Fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan MGMP.

## **12. Jumlah pertemuan MGMP per tahun**

Ditjen PMPTK Ditjen Dikti Kemendiknas (2010) mengungkapkan bahwa ada tiga jenis program yang dapat dirancang untuk kegiatan MGMP, yaitu program umum, program inti (terdiri dari program rutin dan program

pengembangan) dan program penunjang. Program tersebut memuat secara rinci sejumlah kegiatan untuk setiap pertemuan. Diungkapkan pula bahwa program hasil analisis kebutuhan dituangkan dalam jadwal pertemuan untuk satu tahun dan sekurang-kurangnya memuat 12 kegiatan yang dituangkan dalam 12 kali pertemuan dalam satu tahun. Berikut ini disajikan jumlah pertemuan per tahun dari setiap MGMP yang menjadi sasaran kajian.

Tabel 4.12 Frekuensi Pertemuan MGMP di Daerah Sasaran Tahun 2017

Lokasi Kajian	Penerima <i>Block grant</i>		Mapel UN				Mapel non UN lainnya			
	PKn	IPS	MAT	IPA	3. IND	B. ING	PAI	PJOK	SBK	PRK
Kota Bekasi	8 kali	8 kali	4 kali	8 kali	4 kali	8 kali	3 kali	--	8 kali	4 kali
Kab 50 Kota	16 kali	24 kali	24 kali	23 kali	20 kali	25 kali	23 kali	22 kali	24 kali	24 kali
Kab Flotim	--	1 kali	5 kali	3 kali	--	2 kali	6 kali	3 kali	2 kali	--
Kota Kendari	10 kali	10 kali	20 kali	4 kali	--	12 kali	7 kali	12 kali	10 kali	--*)
Kab Kapuas Hulu	10 kali	10 kali	--	--	--	--	2 kali	--	--	--

\*) MGMP prakarya di Kota Kendari belum terbentuk

Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: MGMP yang paling sering dan aktif melakukan pertemuan adalah MGMP IPS di Kabupaten Limapuluh Kota. MGMP IPS di Kabupaten Flores Timur paling sedikit melaksanakan kegiatan yaitu hanya satu kali dalam setahun melakukan pertemuan. Meskipun hanya satu kali melakukan pertemuan, namun umumnya pertemuannya dilakukan dalam beberapa hari sekaligus.

Terlihat dari tabel bahwa MGMP PKn Flores Timur tidak tahu secara pasti jumlah pertemuan yang telah dilakukannya pada tahun 2017. Jika berpatokan pada panduan bahwa ada 12 kali pertemuan dalam setahun, maka hanya dua dari 10 MGMP (20%) yang memenuhi ketentuan yang dibuat, yaitu MGMP PKn dan IPS Kabupaten 50 Kota, (ii) untuk MGMP Mapel UN: terdapat lima dari 20 MGMP Mapel UN (25%) yang jumlah pertemuannya mencapai ketentuan jumlah pertemuan per tahun yang ditetapkan. Sebanyak enam dari 20 orang (30%) ketua MGMP yang tidak yakin MGMP-nya telah melaksanakan kegiatan rutin pada tahun 2017, (iii) untuk MGMP Mapel non UN lainnya: sebanyak 6 dari 19 MGMP (31,6%) yang jumlah pertemuan rutinnnya mencapai ketentuan jumlah pertemuan rutin per tahun. Terlihat pula bahwa enam dari 19 orang (26,3%) ketua MGMP yang meragukan MGMP-nya telah melakukan pertemuan rutin pada tahun 2017. Dari uraian ini terlihat bahwa masih banyak MGMP (> 50 persen) yang jumlah pertemuan



rutinnya tidak sesuai dengan jumlah standar pertemuan yang ditetapkan per tahun yaitu 12 pertemuan per tahun. Jumlah pertemuan yang diadakan cenderung kurang dari 12 kali per tahun.

### 13. Lama waktu pertemuan

Berikut disajikan lama pertemuan untuk setiap pertemuan yang diadakan MGMP. Dari lama pertemuan tersebut dapat diketahui seberapa serius MGMP melaksanakan kegiatannya.

Tabel 4.13 Lama Waktu (Jam Per Sekali Pertemuan) Pertemuan MGMP di Daerah Sasaran Tahun 2017

Lokasi Kajian	Penerima <i>Block grant</i>		Mapel UN				Mapel non UN lainnya			
	PKn	IPS	MAT	IPA	B. Indo	B. Ing	PAI	PJOK	SBK	PRK
Bekasi	8	10	7	8	8	8	--	--	8	8
50 Kota	8	4	3	4	4	5	--	--	8	--
Flotim	--	8	3	8	--	6	--	--	3	--
Kendari	--	8	10	5	--	3	--	--	--	--*)
Kapuas Hulu	8	8	--	--	--	--	--	--	8	--

\*) MGMP prakarya di Kota Kendari belum terbentuk

Terlihat dari Tabel 4.13 bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: lama pertemuan per sekali pertemuan mengikuti suatu pola tertentu yaitu 8 jam. Terdapat enam dari 10 orang (60%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa lama pertemuan MGMP-nya adalah 8 jam per sekali

pertemuan. Ada dua dari 10 orang (20%) ketua MGMP yang tidak mengetahui secara pasti rerata lama pertemuan per sekali pertemuan di MGMP-nya, (ii) untuk MGMP Mapel UN: pola lama pertemuannya mirip dengan lama pertemuan MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat yaitu 8 jam per hari meskipun hanya empat dari 20 orang (20%) ketua MGMP Mapel UN yang menyampaikan bahwa lama pertemuan di MGMP-nya 8 jam per sekali pertemuan. Terlihat enam dari 20 orang (30%) ketua MGMP yang tidak mengetahui rerata lama pertemuan di MGMP per sekali pertemuan, (iii) MGMP Mapel non UN lainnya: Pola lama pertemuan juga hampir sama dengan pola lama pertemuan MGMP Mapel penerima *block grant* dan MGMP Mapel UN yaitu 8 jam per sekali pertemuan, meski hanya 4 dari 19 orang (21,1%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa lama pertemuan per sekali pertemuan adalah 8 jam. Terlihat 14 dari 19 orang (73,7%) ketua MGMP yang tidak mengetahui rerata lama pertemuan per sekali pertemuan.

#### **14. Pengawasan kegiatan MGMP**

Suatu kegiatan akan berjalan dengan lebih baik apabila ada yang melakukan pengawasan. Demikian pula halnya dengan pengawasan kegiatan MGMP. Pengawasan kegiatan MGMP perlu dilakukan misalnya oleh kepala sekolah karena kepala sekolah memberikan surat tugas kepada guru mengikuti kegiatan MGMP, maka kepala sekolah atau atasan kepala sekolah seperti pihak dinas pendidikan perlu untuk melakukan pengawasan

terhadap kegiatan yang dilakukan di MGMP. Berikut disajikan tabel tentang pengawasan terhadap kegiatan MGMP.

Tabel 4.14 Pengawasan Kegiatan di MGMP

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	pengawas	pengawas	pengawas	--	pengawas
2. IPS	kasek	kasek, pengawas	--	kasek	pengawas
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	kasek	kasek	--	kasek, pengawas	--
2. IPA	kasek, pengawas	kasek, pengawas	kasek, pengawas	kasek, pengawas	--
3. B. Indo	kasek, pengawas	--	--	kasek, pengawas	--
4. B. Ing	kasek, pengawas	pengawas	kasek	kasek, pengawas	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	pengawas	Pengawas Kemenag	Pengawas Kemenag	pengawas	--
2. PJOK	kasek, pengawas	kasek, pengawas	kasek	kasek	--
3. SBK	kasek	kasek, pengawas	pengawas	--	--
4. Prakarya	--	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: sebanyak delapan dari 10 orang (80 persen) ketua MGMP menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di MGMP-nya diawasi oleh pengawas saja, kepala sekolah saja atau pengawas dan kepala sekolah. Terdapat dua dari 10 orang (20%) ketua MGMP yang tidak yakin pelaksanaan kegiatan di MGMP-nya diawasi, (ii) untuk MGMP Mapel UN: sebanyak 13 dari 20 orang (65%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di MGMP-nya diawasi oleh pengawas saja, kepala sekolah saja atau pengawas dan kepala sekolah. Terdapat tujuh dari 20 orang (35%) ketua MGMP yang tidak yakin pelaksanaan kegiatan di MGMP-nya diawasi, (iii) untuk MGMP Mapel non UN lainnya: sebanyak 9 dari 19 orang (47,4%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di MGMP-nya diawasi oleh pengawas saja atau kepala sekolah saja atau pengawas dan kepala sekolah. Sedangkan 10 dari 19 orang (52,6%) ketua MGMP tidak yakin pelaksanaan kegiatan di MGMP-nya diawasi. Dari uraian di atas diketahui bahwa pengawasan terhadap kegiatan di MGMP belum dilakukan secara maksimal. Untuk itu diharapkan kepada pihak yang berwenang agar memperhatikan pengawasan terhadap kegiatan MGMP.

## **15. Pembuatan laporan keuangan**

Dalam Ditjen PMPTK Ditjen Dikti Kemendiknas (2010), disampaikan bahwa dana yang diperoleh MGMP dapat

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pengembangan melalui mekanisme penggunaan sesuai ketentuan. Semua dana yang telah dan masih dimiliki MGMP harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota melalui pelaporan kegiatan/keuangan yang disampaikan dalam rapat yang dihadiri anggota MGMP. Berikut disajikan tabel tentang penyusunan laporan keuangan oleh pengurus MGMP.

Tabel 4.15 Pembuatan Laporan Tahun 2017

Lokasi Kajian	Penerima <i>Block Grant</i>		Mapel UN				Mapel Bukan UN			
	PKn	IPS	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing	Pai	PJOK	SBK	Prk
Kota Bekasi	Ya	Ya	Ya	--	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
50 Kota	Ya	Tidak	--	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Flores Timur	Tidak	Tidak	Tidak	--	--	Tidak	Ya	Ya	Ya	--
Kota Kendari	--	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	tidak	tidak	--*)
Kapuas Hulu	Ya	Ya	--	--	--	--	Tidak	tidak	tidak	--

\*) MGMP *Prakarya* di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: sebanyak enam dari 10 orang (60%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka membuat laporan keuangan; sebanyak tiga dari 10 orang (30%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka tidak membuat laporan keuangan

dan satu orang (10%) ketua MGMP tidak yakin bahwa MGMP yang dipimpinnya telah membuat laporan keuangan, (ii) Untuk MGMP Mapel UN: sebanyak sembilan dari 20 orang (45%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka membuat laporan keuangan, sebanyak tiga dari 20 orang (15%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka tidak membuat laporan keuangan dan delapan orang (40%) ketua MGMP tidak yakin bahwa MGMP yang dipimpinnya telah membuat laporan keuangan, (iii) Untuk MGMP Mapel non UN lainnya: sebanyak delapan dari 19 orang (42,1%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka membuat laporan keuangan, sebanyak sembilan dari 19 orang (47,4%) ketua MGMP menyampaikan bahwa mereka tidak membuat laporan keuangan dan dua orang (10,5%) ketua MGMP tidak yakin bahwa MGMP yang dipimpinnya telah membuat laporan keuangan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa masih banyak MGMP yang tidak membuat laporan keuangan kegiatannya; bahkan ada MGMP yang mendapat bantuan *block grant* dari Pusat pun tidak membuat laporan keuangannya. Untuk itu maka pihak yang berwenang agar memperhatikan kewajiban MGMP untuk membuat laporan keuangan karena pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat membangun kepercayaan dan motivasi anggota MGMP dalam mengikuti kegiatan.

## 16. Transparansi laporan keuangan

Di atas telah disampaikan bahwa MGMP harus membuat laporan keuangan dan disampaikan pertanggung jawabannya kepada anggota MGMP. Berikut disajikan transparansi laporan keuangan MGMP.

Tabel 4.16 Transparansi Laporan Keuangan MGMP

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	Ya	Tidak	--	--	Ya
2. IPS	Tidak	Tidak	--	Ya	Ya
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	Tidak	--	--	Tidak	--
2. IPA	Tidak	Ya	Ya	Tidak	--
3. B. Indo	Tidak	Ya	--	Ya	--
4. B. Ing	Tidak	Ya	Ya	Ya	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	Tidak	--	Ya	Ya	Tidak
2. PJOK	tidak	ya	Tidak	tidak	tidak
3. SBK	Tidak	--	Ya	Ya	--
4. Prakarya	Ya	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.16. terlihat bahwa: (i) untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: sebanyak empat dari 10 orang (40%) ketua MGMP menyampaikan bahwa laporan keuangan mereka transparan untuk umum, sebanyak tiga dari 10 orang (30%)

ketua MGMP menyampaikan bahwa laporan keuangan mereka tidak terbuka untuk umum dan tiga orang (30%) ketua MGMP tidak yakin bahwa laporan keuangan mereka terbuka untuk umum, (ii) Untuk MGMP Mapel UN: sebanyak tujuh dari 20 orang (35%) ketua MGMP menyampaikan bahwa laporan keuangan mereka terbuka untuk umum, sebanyak enam dari 20 orang (30%) ketua MGMP menyampaikan bahwa laporan keuangan mereka tidak terbuka untuk umum dan tujuh orang (35 persen) ketua MGMP tidak yakin bahwa laporan keuangan yang dibuatnya terbuka untuk umum, (iii) Untuk MGMP Mapel non UN lainnya: sebanyak enam dari 19 orang (31,6%) ketua MGMP menyampaikan bahwa laporannya terbuka untuk umum, sebanyak tujuh dari 19 orang (36,8%) ketua MGMP menyampaikan bahwa laporan keuangan tidak terbuka untuk umum dan enam orang (31,6%) ketua MGMP tidak yakin bahwa laporannya terbuka untuk umum.

Dari uraian di atas terlihat bahwa laporan keuangan MGMP belum sepenuhnya terbuka atau transparan untuk umum. Tentunya hal ini tidak akan memotivasi anggota MGMP untuk mengikuti kegiatan MGMP. Untuk itu pihak yang berwenang agar mensosialisasikan perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan MGMP minimal kepada anggota MGMP sehingga dapat membangun kepercayaan anggota kepada pengurus MGMP dan mereka termotivasi dan semangat untuk mengikuti kegiatan MGMP.



## **B. Perencanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN**

Program MGMP merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan MGMP. Program yang disusun biasanya merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Penyusunan perencanaan kegiatan merupakan salah satu tahap awal dalam penyelenggaraan kegiatan MGMP. Menurut panduan Penyelenggaraan KKG/MGMP oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2010) beberapa kegiatan direncanakan dalam satu tahun yang terdiri dari tiga jenis program yaitu program umum, program rutin, dan program penunjang.

Secara fungsinya, MGMP memiliki peran dalam salah satu kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Keterlibatan atau peran MGMP dalam USBN adalah sebagai penyusun soal USBN. MGMP yang menyusun soal USBN ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

### **1. MGMP penerima *block grant***

MGMP PKn dan IPS merupakan MGMP Mapel non UN yang memperoleh bantuan *block grant* untuk penyusunan soal USBN. Kedua MGMP dari beberapa daerah sampel merencanakan kegiatan penyusunan soal USBN. Dari data yang diperoleh, seluruh MGMP PKn menyusun perencanaan penyusunan soal USBN sedangkan tidak seluruh MGMP IPS merencanakan penyusunan soal USBN. Pada dasarnya perencanaan pada penyusunan soal merupakan hal yang paling penting. Secara

definisi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan capaian, artinya dalam penyusunan soal sangat diperlukan perencanaan. Guna perencanaan penyusunan soal USBN agar penyusunan soal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu pencapaian penilaian yang berstandar nasional. Dikhawatirkan jika tidak ada perencanaan bagaimana guru-guru dapat menyusun soal USBN secara baik dan benar. Dalam lampiran peraturan Dirjen Dikdasmen, peran MGMP dalam penyelenggaraan USBN adalah:

- a. menyusun soal USBN sebanyak 75-80 persen dalam sejumlah paket soal yang diperlukan untuk masing-masing mata pelajaran berikut kelengkapannya (format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, kunci jawaban untuk pilihan ganda, pakta integritas, tata tertib, daftar hadir, dan berita acara) dibawah koordinasi dinas pendidikan sesuai kewenangannya
- b. menerima 20-50 persen soal USBN dari dinas pendidikan
- c. merakit soal USBN dalam sejumlah paket soal yang diperlukan;
- d. menyerahkan naskah soal USBN berikut kelengkapannya ke MKKS dengan diketahui oleh dinas provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan peran tersebut, MGMP IPS dan Pkn harus menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun soal USBN

agar sesuai dengan peran yang ditugaskan MGMP dalam penyusunan soal USBN.

Tabel 4.17 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penulisan Soal MGMP Penerima Bantuan *Block Grant* Pusat

Kabupaten/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Bekasi	Ya	Ya
50 Kota	Ya	Tidak
Flores Timur	Ya	Ya
Kendari	Ya	Tidak
Kapuas Hulu	Ya	Ya

Pelibatan unsur/pihak yang berkepentingan dalam MGMP dalam perencanaan penyusunan soal USBN untuk masing-masing MGMP berbeda satu dengan yang lain. Dari segi jumlah orang unsur yang terlibat bervariasi, ada yang lengkap terdiri dari 4 unsur yaitu ketua, anggota, instruktur eksternal maupun internal dan ada yang hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu anggota MGMP. Pada MGMP PKn keterlibatan unsur di MGMP lebih lengkap dibandingkan MGMP IPS. Pada MGMP IPS Kota Bekasi, unsur yang terlibat dalam perencanaan penyusunan soal lengkap terdiri dari Ketua, Instruktur internal, dan pengawas.

Ketidak seragaman unsur yang terlibat dalam perencanaan penyusunan soal USBN dapat diartikan bahwa MGMP IPS dan Pkn belum memahami Prosedur Operasional Standar (POS)

Penyelenggaraan KKG & MGMP yang disusun oleh Direktorat PMPTK tahun 2010, dimana diatur mengenai prosedur penyusunan program yang disusun oleh pengurus. Pengurus merencanakan penyusunan soal USBN yang nantinya perencanaan tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten. Dari tabel dibawah ini, rencana penyusunan soal USBN tidak sama antara MGMP PKn dan IPS.

Idealnya penyusun rencana kegiatan seharusnya oleh Ketua MGMP dengan memanfaatkan masukan dari anggota dan nara sumber yang kompeten misalnya pengawas, instruktur eksternal MGMP, dan lainnya seperti pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Jadi penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan adalah ketua MGMP, jika ketua MGMP berhalangan maka ditugaskan kepada pengurus MGMP lainnya seperti Wakil ketua MGMP, sekretaris, bendahara atau ketua bidang yaitu (i) bidang perencanaan dan pelaksanaan program, (ii) bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana, atau (iii) bidang Humas dan kerja sama.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir di semua MGMP PKn dan IPS di lima lokasi kajian menyampaikan bahwa yang menyusun rencana kegiatan adalah ketua MGMP, kecuali di Kabupaten Flores Timur, dimana yang menyusun rencana kegiatan adalah instruktur internal untuk MGMP PKn dan anggota MGMP untuk MGMP IPS.

Jadi, sebaiknya sebagaimana disebutkan di atas, penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan adalah ketua MGMP dengan dibantu oleh jajaran pengurus MGMP lainnya dan anggota MGMP. Tentunya rencana yang dibuat akan menjadi lebih baik apabila mendapat masukan dari nara sumber seperti instruktur eksternal, pengawas/jajaran pimpinan dinas pendidikan yang kompeten di bidangnya, kepala sekolah yang juga kompeten di bidangnya dan sebagainya.

Tabel 4.18 Unsur yang Terlibat dalam Menyusun Perencanaan Penyusunan Soal USBN oleh MGMP Penerima Bantuan *Block Grant* dari Pusat

Kabupaten/ Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Bekasi	Ketua MGMP, instruktur eksternal dan pengawas	Pengurus MGMP, instruktur internal dan eksternal serta pengawas
50 Kota	Instruktur internal	Pengurus MGMP dan anggota MGMP
Flores Timur	Ketua MGMP	Anggota MGMP
Kendari	Ketua MGMP	Ketua MGMP dan anggota MGMP
Kapuas Hulu	Ketua MGMP dan Kasie Dinas	Ketua MGMP dan anggota MGMP

Untuk Mapel UN, terlihat bahwa perencanaan penyusunan soal USBN tidak dilakukan dengan baik dan matang. Terbukti dari adanya 9 MGMP dari keseluruhan 20 MGMP (sebanyak 45%) yang tidak dapat melakukan penyusunan rencana kegiatan

penyusunan soal USBN dengan baik. Jadi sangat berbeda dengan MGMP yang menerima bantuan *block grant* dari Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa harapan dari Pusat agar Daerah membantu MGMP yang tidak menerima bantuan *block grant* dari Pusat tidak sepenuhnya ditindaklanjuti Daerah.

Dari Tabel 4.18 terlihat bahwa MGMP IPA merupakan MGMP dengan perencanaan kegiatan paling tidak baik karena dari lima lokasi pengumpulan data, hanya ada satu lokasi yaitu Kota Bekasi yang melakukan perencanaan kegiatan. Dengan demikian sebanyak empat MGMP IPA (80%) yang tidak memiliki perencanaan kegiatan dengan baik. MGMP lainnya yang juga dengan perencanaan kegiatannya kurang baik adalah MGMP Bahasa Inggris, karena dari lima lokasi kajian, hanya dua lokasi yang melakukan penyusunan rencana kegiatannya; jadi sebanyak 60% MGMP Bahasa Inggris tidak memiliki perencanaan kegiatan dengan baik. Untuk MGMP Mapel UN lainnya yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia, masing-masing ada satu MGMP (20%) yang tidak memiliki perencanaan kegiatan dengan baik.

Tabel 4.19 Unsur yang Terlibat dalam Menyusun Perencanaan Penyusunan soal USBN oleh MGMP Mapel UN

Kabupaten/ Kota	MGMP Mapel UN			
	Matematika	IPA	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Bekasi	Ketua MGMP, Pengawas	Ka.Sie GTK	Instruktur internal	--
50 Kota	Tim Penyusun soal USBN	--	Ketua dan anggota MGMP	Pengurus MGMP
Flores Timur	Pengurus MGMP	--	--	--
Kendari	--	--	Ketua MGMP	Pengawas, pihak dinas
Kapuas Hulu	Ketua dan anggota MGMP	--	Ketua dan anggota MGMP	--

Selanjutnya dari Tabel 4.19 terlihat pula bahwa lokasi dengan UN tinggi bukan berarti MGMP-nya memiliki perencanaan kegiatan yang baik. Kota Bekasi yang merupakan lokasi perwakilan UN tertinggi salah satu MGMP Mapel UN-nya tidak menyusun perencanaan kegiatannya dengan baik. Kemudian Kabupaten Limapuluh Kota yang menjadi perwakilan daerah UN tinggi, salah satu MGMP-nya juga tidak membuat perencanaan kegiatan dengan baik yaitu MGMP IPA. Lalu Kabupaten Flores Timur yang merupakan perwakilan lokasi UN sedang ternyata perencanaan kegiatan di MGMP sangat tidak baik, karena ada

tiga MGMP Mapel UN (75%) yang tidak membuat perencanaan kegiatan dengan baik yaitu MGMP IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Nilai UN Kabupaten Flores Timur justru lebih tinggi daripada Kota Kendari dan Kabupaten Kapuas Hulu. Padahal faktanya Flores Timur hanya memiliki satu MGMP Mapel UN yang memiliki perencanaan kegiatan, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Kendari masing-masing memiliki dua MGMP Mapel UN (50%) yang memiliki perencanaan kegiatan. Manfaat MGMP untuk meningkatkan nilai UN tidak terlihat di sini, karena daerah dengan UN tinggi ternyata MGMP-nya tidak merencanakan penyusunan kegiatan dengan baik. Sebaliknya daerah dengan banyak MGMP Mapel UN-nya tidak memiliki perencanaan kegiatan dengan baik, justru nilai UN-nya lebih tinggi daripada daerah yang banyak MGMP-nya memiliki perencanaan kegiatan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh waktu perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN umumnya dilakukan di awal semester genap atau di akhir semester ganjil. Waktu perencanaan ini disesuaikan dengan kalender akademik dan jadwal pelaksanaan USBN. Tiap daerah memiliki kalender akademik pendidikan yang tidak jauh berbeda dalam penetapan kegiatan. Umumnya kalender akademik dibagi menjadi dua tahap yaitu semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil biasanya ditetapkan sekitar bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan untuk semester genap ditetapkan pada bulan Januari sampai dengan



Juni. Pada MGMP PKn, direncanakan akan dilaksanakan pada akhir semester ganjil s.d. awal semester genap. Sebenarnya secara perhitungan bulan kalender, perencanaan yang ditetapkan di akhir semester ganjil dan awal semester genap pelaksanaannya hampir mendekati bulan yang sama sekitar bulan Desember – Januari.

Dapat diartikan, penetapan waktu perencanaan sesuai dengan yang diatur dalam POS Penyelenggaraan USBN Tahun 2017, yaitu kegiatan penetapan MGMP yang akan menyusun soal USBN berikut kelengkapannya ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten selama maksimal 10 hari. Pada tahap tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota menetapkan MGMP yang akan menyusun soal USBN pada bulan Desember - Januari. Waktu perencanaan disusun setelah MGMP menerima SK Penetapan MGMP yang menyusun soal USBN dari dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten. MGMP PKn Kota Bekasi, Kabupaten Limapuluh kota, Kota Kendari, dan Kabupaten Flores Timur menetapkan waktu perencanaan sesuai dengan POS Penyelenggaraan USBN, akan tetapi MGMP PKn Kabupaten Kapuas Hulu dan MGMP IPS Kota Bekasi tidak menetapkan waktu perencanaan penyusunan soal USBN. MGMP yang mendapatkan bantuan harusnya memiliki perencanaan waktu penyusunan soal yang jelas dan tepat dibandingkan dengan MGMP mata pelajaran lain yang tidak memperoleh bantuan dari Pusat.

Waktu perencanaan kegiatan penyusunan soal harus disesuaikan dengan beberapa tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan USBN meliputi:

- a. Penyusunan 75-80 persen soal USBN berikut kelengkapannya selama 20 hari
- b. Perakitan soal USBN berikut kelengkapannya selama 10 hari
- c. Penyerahan naskah berikut kelengkapannya oleh MKKS ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

Tabel 4.20 Waktu Perencanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN  
MGMP Penerima *Block Grant* Pusat

Kabupaten/ Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Bekasi	Awal semester genap	-
Limapuluh Kota	Awal Semester Genap	Awal semester ganjil
Flores Timur	Akhir semester ganjil	Awal semester genap
Kendari	Awal semester ganjil	Awal semester genap
Kapuas Hulu	-	Akhir semester ganjil

*Ket: Semester ganjil (Bulan Juli-Desember), semester genap (Bulan Januari – Juni)*

Pada MGMP non penerima bantuan, waktu perencanaan tidak ditetapkan secara jelas seperti MGMP penerima bantuan *block grant* Pusat. Hanya MGMP Pendidikan Agama yang menetapkan waktu perencanaan kegiatan pada akhir semester ganjil.

Perencanaan kegiatan didasari pada beberapa hal, salah satunya yaitu jumlah anggota/peserta yang akan diundang dalam penyusunan soal USBN. Ketentuan jumlah anggota sebagai penyusun soal USBN tidak diatur ketat dalam POS Penyelenggaraan USBN akan tetapi yang diperbolehkan untuk menyusun soal USBN adalah guru-guru yang terdaftar sebagai anggota MGMP.

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa MGMP penerima *block grant* dapat merencanakan jumlah anggota yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN dibandingkan dengan MGMP non penerima *block grant*. Jumlah anggota/peserta yang akan diundang berdasarkan pada ketersediaan dana dan hasil penunjukkan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Makin banyak anggota yang diundang menunjukkan kesiapan anggota MGMP dalam menyusun soal USBN.

Terlihat pada anggota MGMP PKn di Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 50 orang guru yang akan diundang untuk mengikuti penyusunan soal USBN. Hal ini jauh berbeda pada Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya akan mengundang 2 orang yang direncanakan akan diikutkan penyusunan soal USBN. Fenomena ini menunjukkan bahwa anggota MGMP IPS Kabupaten Kapuas Hulu belum banyak memiliki guru-guru yang memiliki kompetensi menyusun soal USBN. Makin banyak guru yang terlibat dalam penyusunan soal USBN makin bervariasi

butir-butir soal yang dihasilkan karena guru dianggap memiliki kemampuan di dalam menyusun butir soal ulangan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

MGMP Mapel UN non penerima *block grant* merencanakan akan mengikutsertakan anggota dalam penyusunan soal lebih dari sepuluh orang. Beberapa MGMP tidak merencanakan mengikutsertakan anggota untuk mengikuti kegiatan penyusunan soal seperti MGMP Mapel UN di Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Kendari, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini sedikit berbeda pada MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* Pusat, di mana beberapa daerah merencanakan anggotanya untuk terlibat dalam perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN.

Tabel 4.21 Jumlah Anggota yang Dilibatkan dalam Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Jumlah Anggota yang Akan Dilibatkan				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	12	50	32	32	2
2. IPS	9	12	15	20	2
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	100	--	--	--	--
2. IPA	69	--	36	--	--
3. B. Indo	10	--	--	--	--
4. B. Ing	--	5	--	--	--

MGMP	Jumlah Anggota yang Akan Dilibatkan				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	80	--	20	5	--
2. PJOK	150	50	--	10	2
3. SBK	--	--	18	18	--
4. Prakarya	6	--	--	--*)	--

Perencanaan pelaksanaan penulisan soal USBN diperkirakan dilaksanakan selama beberapa hari. Sebagian MGMP baik penerima *block grant* maupun tidak rata-rata mengalokasikan beberapa hari dan ada juga yang memperkirakan dengan perhitungan jam. Perencanaan pelaksanaan minimal dilaksanakan lebih dari dua hari. Hal ini terbukti dari alokasi waktu yang ditetapkan oleh masing-masing MGMP lebih dari 24 jam. Pada MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, hanya MGMP PKN yang tidak mengalokasikan waktu perencanaan pelaksanaan kegiatan, artinya perencanaan pada MGMP PKN tidak bagus dibandingkan dengan perencanaan pada MGMP IPS. Hal yang sama dengan beberapa MGMP Mapel UN dan non UN yang tidak merencanakan lama pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN. Maksimal kegiatan penyusunan soal USBN dilaksanakan selama delapan hari, seperti yang disampaikan oleh BSNP (2009). Data lengkap terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22 Rencana Lama Waktu (Dalam Jam) Pelaksanaan Kegiatan Peyusunan soal USBN

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	60	48	82	82	--
2. IPS	100	32	1	40	48
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	28	--	--	--	--
2. IPA	24	--	16	--	--
3. B. Indo	32	--	--	--	--
4. B. Ing	--	4	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	5	--	5	6	--
2. PJOK	3	32	10	15	--
3. SBK	--	--	7	10	--
4. Prakarya	24	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kota Kendari belum terbentuk

Tabel 4.23 Rencana Pelibatan Instruktur Eksternal dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Jumlah Instruktur Eksternal MGMP				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	8	2	2	3	1
2. IPS	1	1	--	1	--

MGMP	Jumlah Instruktur Eksternal MGMP				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	1	--	--	--	--
2. IPA	13	--	--	--	--
3. B. Indo	4	--	--	--	--
4. B. Ing	--	--	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	2	--	2	2	--
2. PJOK	2	2	--	2	--
3. SBK	--	--	--	--	--
4. Prakarya	3	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kota Kendari belum terbentuk

Tim pengembang MGMP atau biasanya disebut sebagai instruktur eksternal dan internal. Instruktur eksternal merupakan bagian dari tim pengembang MGMP yang berperan mengembangkan penerapan kebijakan-kebijakan KKG dan MGMP di tingkat provinsi/kabupaten/kota, mensosialisasikan kebijakan atau modul-modul untuk peningkatan mutu guru melalui aktivitas di KKG dan MGMP yang dikembangkan oleh tim pusat maupun tim provinsi. Setiap MGMP rata-rata merencanakan melibatkan 2-8 orang instruktur. Makin banyak instruktur yg dilibatkan menunjukkan bahwa MGMP tersebut memiliki tim pengembang yang baik karena dapat memberikan arahan baik dalam substansi mata pelajaran maupun kebijakan umum terkait pembelajaran.

Dari segi ketersediaan jumlah instruktur eksternal, jumlah instruktur pada MGMP IPS lebih sedikit dibandingkan MGMP PKn. Hal ini terjadi pada seluruh MGMP di daerah sampel. Untuk daerah Kota Bekasi, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Kendari hanya akan melibatkan satu orang instruktur eksternal. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan perencanaan pelibatan anggota yang akan diikuti. Pada perencanaan, jumlah anggota yang akan dilibatkan minimal 10 orang. Fungsi instruktur eksternal adalah untuk memberikan pengembangan serta pengetahuan tentang materi pada matapelajaran.

Selain instruktur eksternal, MGMP juga memiliki instruktur internal. Biasanya instruktur internal adalah guru senior/berprestasi yang merupakan anggota dari MGMP tersebut. Keterlibatan instruktur internal juga tidak banyak melebihi dari jumlah instruktur eksternal yang dilibatkan. Keterbatasan instruktur menjadi permasalahan tersendiri. Untuk MGMP IPS penerima *block grant* hanya melibatkan 1-2 instruktur internal. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah instruktur internal di MGMP PKn.

Untuk MGMP Mapel UN non penerima *block grant*, banyak MGMP tidak melibatkan instruktur internal pada kegiatan penyusunan soal USBN. Beberapa daerah seperti di Flores Timur ketersediaan instruktur internal sangat sedikit dan cenderung tidak ada. Ketersediaan instruktur internal dan eksternal dibutuhkan sebagai tim pengembang MGMP dalam penerapan



kebijakan-kebijakan pelatihan dan modul-modul untuk peningkatan mutu guru.

Tabel 4.24 Rencana Pelibatan Instruktur Internal dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Jumlah Instruktur Internal yang Dilibatkan				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	4	1	--	2	2
2. IPS	2	1	--	1	--
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	1	--	--	--	--
2. IPA	--	--	--	--	--
3. B. Indo	6		--	--	--
4. B. Ing	--	2	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	4	--	3	2	--
2. PJOK	2	2	--	2	--
3. SBK	--	--	--	2	--
4. Prakarya	--	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kota Kendari belum terbentuk

Setelah pelibatan instruktur internal dan eksternal, perencanaan pada penyiapan materi untuk kegiatan penyusunan soal USBN menjadi penentu dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan beberapa unsur dalam perencanaan penyiapan dari segi materi yang diberikan menggambarkan kematangan dalam perencanaan. Unsur-unsur yang terlibat merupakan tim pengembang yang

memang memiliki kompetensi serta kepakaran tertentu. Penyiapan materi kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru/anggota MGMP dalam menyusun butir soal sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang diberikan. Variasi unsur keterlibatan dalam penyiapan materi menunjukkan bahwa MGMP dapat menganalisis kebutuhan materi dan analisis dalam penyusunan soal. Masing-masing MGMP memiliki perencanaan yang berbeda. Untuk Kota Bekasi sendiri terdapat perbedaan dalam menentukan siapa yang akan terlibat dalam penyiapan materi. Di MGMP PKn Kota Bekasi yang akan menyiapkan materi adalah instruktur eksternal dan pengawas, sedangkan MGMP IPS melibatkan hampir seluruh unsur yang ada di MGMP yaitu ketua, instruktur internal dan eksternal, serta anggota.

Hal yang sama terjadi di MGMP di Kabupaten Limapuluh Kota, keterlibatan unsur sebagai penyiap materi lebih lengkap pada MGMP IPS dibandingkan di MGMP PKn. MGMP PKn hanya melibatkan instruktur internal saja. Untuk Kabupaten Flores Timur dan Kota Kendari memiliki pola yang sama yaitu hanya melibatkan satu unsur saja untuk penyiap materi. Berbeda dengan MGMP PKn di Kota Bekasi dan Kabupaten Kapuas Hulu yang melibatkan lebih dari satu unsur. Perencanaan pelibatan unsur-unsur untuk menyiapkan materi penyusunan soal USBN tidak sama antara MGMP penerima *block grant* dari Pusat dan juga MGMP non penerima *block grant* dari Pusat.

Tabel 4.25 Rencana Penyiapan Materi Penyusunan Soal USBN pada MGMP Penerima *Block Grant* Pusat

Kabupaten/ Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Bekasi	Instruktur eksternal dan pengawas	Ketua, Instruktur eksternal /internal, anggota MGMP
50 Kota	Instruktur internal	Instruktur eksternal /internal, anggota MGMP
Flores Timur	Instruktur eksternal	Anggota MGMP
Kendari	Instruktur eksternal dan internal	Ketua MGMP
Kapuas Hulu	Ketua, Instruktur eksternal/internal	Dinas

Tabel 4.26 Rencana Penyiapan Materi Penyusunan Soal USBN pada MGMP Non Penerima *Block Grant* Pusat

Kab/Kota	MGMP						
	Mat	IPA	Bhs. Indo	Bhs. Ing	PA	PJOK	PRK
Bekasi	Ketua & anggota MGMP	Pengawas	Instruktur internal	-	Ketua MGMP, instruktur eksternal/internal	Ketua MGMP	Ketua, anggota & pengawas
50 Kota	-	-	Anggota MGMP	-	-	Ketua & anggota MGMP	-
Flotim	-	Pengawas	-	Ketua & anggota MGMP	Ketua & anggota MGMP,	anggota MGMP	-

Kab/Kota	MGMP						
	Mat	IPA	Bhs. Indo	Bhs. Ing	PA	PJOK	PRK
					instruktur eksternal/ internal		
Kendari	-	Ketua & anggota MGMP, instruktur eksternal/ internal	-		Instruktur eksternal	-	-
Kapuas Hulu	-	-	Ketua MGMP	-	-	Ketua MGMP	-

### Perencanaan lokasi pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN:

Menurut MGMP penerima *block grant* Pusat perencanaan pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN dilaksanakan di sekolah. Dilihat dari tingkat kenyamanan dan keamanan pemilihan sekolah sebagai tempat penyusunan soal USBN sangat tidak pas dikarenakan dalam kegiatan penyusunan soal oleh guru-guru, lingkungan harus dalam keadaan yang mendukung seperti tidak bising sehingga guru-guru dapat berkonsentrasi penuh untuk dapat menghasilkan butir soal yang *valid* dan reliabel. MGMP Penerima *block grant* IPS dan PKn menyatakan perencanaan pelaksanaan akan dilakukan di sekolah, akan tetapi

MGMP PKn tidak menginformasikan tempat yang akan digunakan.

Tabel 4.27 Perencanaan Tempat Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Perencanaan				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	Sekolah	-	Sekolah	Sekolah	Sekolah
2. IPS	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	Sekolah	-	-	-	Sekolah
2. IPA	Sekolah	-	Sekolah	Sekolah	-
3. B. Indo	Sekolah	-	-	Sekolah	-
4. B. Ing	-	-	Sekolah	-	-
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	Sekolah	-	Sekolah	-	-
2. PJOK	-	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah
3. SBK	--	--	Sekolah	Sekolah	--
4. Prakarya	Sekolah	--	--	--	--

### Metode pelatihan yang direncanakan:

Beberapa metode yang direncanakan dalam pelatihan penyusunan soal USBN menjadi pilihan dari MGMP PKn dan IPS. Pilihan kerja kelompok dan diskusi menjadi pilhan yang terbanyak diterapkan. Selain kedua jenis metode tersebut, ada dua metode lain yang bisa digunakan yaitu kerja individu atau ceramah.

Berdasarkan teori setiap metode yang diberikan dalam pelatihan memiliki tujuan masing-masing. Jenis metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode ceramah, metode ini memberikan uraian atau penjelasan kepada peserta pelatihan. Dengan kata lain, metode ini adalah sebuah metode pelatihan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta pelatihan yang umumnya mengikuti secara pasif dan penyampaian informasi yang dilakukan umumnya dengan komunikasi satu arah.
2. Metode kerja kelompok adalah metode yang mengkondisikan guru dalam suatu group atau kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut agar mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok.
3. Metode diskusi, metode ini para peserta mempelajari bahwa terdapat banyak cara atau pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang begitu rumit.
4. Metode yang terakhir adalah metode kerja individu yaitu metode penugasan merupakan penunjukan individu untuk mengetahui capaian pada tujuan pelatihan yang diberikan.

Berdasarkan teori tersebut, MGMP PKn memilih metode yang akan diterapkan dalam pelatihan yaitu dengan diskusi dan kerja kelompok. Empat daerah yaitu kota Bekasi, Kabupaten

Limapuluh Kota, Kabupaten Flores Timur, dan Kota Kendari hanya memilih kerja kelompok sebagai metode yang tepat dalam kegiatan penyusunan soal USBN, sedangkan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Kapuas Hulu memilih metode diskusi dalam pelatihan penyusunan soal USBN. Ketepatan dalam memilih metode yang digunakan akan memberikan hasil yang maksimal dalam pelatihan penyusunan soal.

Pilihan perencanaan metode yang digunakan masing-masing MGMP memiliki ciri khas. Pada kelompok MGMP IPS dan PKn kecenderungan memilih metode kerja kelompok dan diskusi sebagai metode yang digunakan dalam pelatihan. Hal ini dapat diartikan bahwa MGMP IPS dan PKn lebih menerima materi penyusunan soal melalui diskusi dan kerja kelompok. Sedangkan MGMP matapelajaran UN dan Non UN lainnya, pemilihan metodenya lebih bervariasi, seperti diskusi kelompok, kerja individu, dan ceramah tergantung pada kebutuhan dan kedalaman materi yang diberikan.

Tabel 4.28 Perencanaan Metode Pembelajaran yang Digunakan dalam Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Kabupaten/Kota				Kendari	Kapas Hulu
	Bekasi	50 Kota	Flotim			
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat						
1. PKn	Kerja kelompok	Diskusi, kerja kelompok	Kerja kelompok	Kerja kelompok	Diskusi	
2. IPS	Diskusi, kerja kelompok + ceramah	Kerja kelompok + ceramah	Kerja kelompok	Diskusi, kerja kelompok/individu + ceramah	Diskusi	
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat						
1. Mat	Kerja kelompok + ceramah	--	--	--	Diskusi dan kerja individu	
2. IPA	Kerja kelompok		Diskusi	--	--	
3. B. Indo	Kerja kelompok	Diskusi, kerja Individu/ kelompok	--	Diskusi dan kerja individu	Diskusi	
4. B. Ing		Diskusi	Kerja kelompok	Diskusi	--	
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat						
1. PA(I/K)	Diskusi dan kerja kelompok	--	Diskusi, kerja kelompok/individu + ceramah	Kerja kelompok	Kerja kelompok	



MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
2. PJOK	Kerja kelompok	Ceramah	Diskusi	--	Diskusi
3. SBK	--	--	Diskusi, kerja kelompok/individu	--	--
4. Prakarya	Kerja Kelompok	--	--	--	--

### C. Pelaksanaan Penyusunan Soal USBN

Suatu kegiatan akan berhasil baik apabila disiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan matang. Penyusun rencana pelaksanaan kegiatan dalam hal ini pengurus MGMP akan dikatakan berhasil apabila rencana yang dibuat terlaksanakan atau terealisasi, artinya tanpa ada perubahan dari perencanaan yang telah dibuat. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana realisasi perencanaan yang telah disusun untuk mengimplementasikan kegiatan penulisan soal USBN aras tinggi. Di sini dicoba dibandingkan realisasi perencanaan yang dilakukan oleh tiga kelompok MGMP yaitu (1) kelompok MGMP Mapel non UN penerima *block grant* 2017 untuk menyusun soal USBN aras tinggi dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), (2) kelompok MGMP Mapel UN non penerima *block grant* dari Pusat, dan (3) kelompok MGMP Mapel non UN lainnya non penerima *block grant* dari Pusat. Kedua kelompok MGMP terakhir ini sesuai informasi dari GTK mendapat bantuan penyusunan soal USBN aras tinggi dari pemerintah daerah (dalam hal ini dinas pendidikan setempat). Pemerintah Pusat menghimbau secara tertulis kepada Pemerintah Daerah agar memberikan bantuan kepada MGMP lainnya yang tidak dibantu *block grant* Pusat agar mereka dapat menyiapkan soal USBN.

Kelompok MGMP yang menerima bantuan *block grant* dari Pusat untuk menyusun soal USBN aras tinggi adalah MGMP Mapel Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sedangkan kedua kelompok MGMP lainnya menyusun soal USBN memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah daerah. Kelompok ini terdiri atas kelompok MGMP Mapel UN yakni : Matematika (Mat), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia (B. Indo), Bahasa Inggris (B. Ing) dan MGMP Mapel non UN lainnya yaitu Pendidikan Agama Islam/Katholik (PA(I/K)), Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), dan Prakarya.

### 1. Penyusun/pembuat rencana kegiatan MGMP

Dalam tabel berikut disajikan pembuatan rencana kegiatan MGMP khususnya penyusunan soal USBN pada MGMP penerima *block grant* dari Pusat.

Tabel 4.29a Penyusun Rencana Kegiatan Penulisan Soal USBN pada MGMP Penerima *Block Grant* Pusat

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Kota Bekasi	Ketua MGMP, instruktur eksternal & pengawas	Pengurus MGMP, instruktur internal /eksternal & pengawas
50 Kota	Instruktur internal	Pengurus & anggota MGMP

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Flotim	Ketua MGMP	Anggota MGMP
Kota Kendari	Ketua MGMP	Ketua & anggota MGMP
Kapuas Hulu	Ketua MGMP & Kasie GTK	Ketua & anggota MGMP

Dari Tabel 4.29a terlihat bahwa dari 10 MGMP penerima *block grant* dari Pusat, semuanya (100%) membuat perencanaan kegiatan penulisan soal USBN. Terlihat bahwa penyusunan rencana kegiatan penulisan soal USBN tidak selalu dilakukan oleh ketua MGMP. Karena di MGMP PKn Kabupaten Limapuluh Kota yang menyusun rencana kegiatan adalah instruktur internal, sedangkan di MGMP IPS Kabupaten Flores Timur yang menyusun rencana kegiatan adalah anggota MGMP. Idealnya penyusun rencana kegiatan seharusnya memang ketua MGMP dengan memanfaatkan masukan dari anggota dan nara sumber yang kompeten misalnya pengawas, instruktur esternal MGMP, pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan lainnya sebagainya. Jadi sebaiknya penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan adalah ketua MGMP, jika ketua MGMP berhalangan baru ditugaskan kepada pengurus MGMP lainnya seperti wakil ketua MGMP, sekretaris, bendahara atau ketua bidang yaitu (i) bidang perencanaan dan pelaksanaan program, (ii) bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana, atau (iii) bidang Humas dan kerja sama.

Jadi, sebaiknya sebagaimana disebutkan di atas, penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan adalah ketua MGMP dengan dibantu oleh jajaran pengurus MGMP lainnya dan anggota MGMP. Tentunya rencana yang dibuat akan menjadi lebih baik apabila mendapat masukan dari nara sumber seperti instruktur eksternal, pengawas atau jajaran pimpinan dinas pendidikan yang kompeten di bidangnya, serta kepala sekolah yang juga berkompeten di bidangnya dan sebagainya. Selanjutnya dalam tabel berikut disajikan realisasi pembuat perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN pada kelompok MGMP Mapel UN.

Tabel 4.29b Penyusun Rencana Kegiatan Penulisan Soal USBN pada MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	Ketua MGMP & Pengawas	Kasie GTK	Instruktur internal	--
50 Kota	Tim Penyusun soal USBN	--	Ketua & anggota MGMP	Pengurus & anggota MGMP
Flotim	Pengurus MGMP	--	--	--
Kota Kendari	--	--	Ketua MGMP	Pengawas & pihak dinas
Kapuas Hulu	Ketua & anggota MGMP	--	Ketua & anggota MGMP	--

Untuk MGMP Mapel UN, terlihat dari Tabel 4.29b bahwa tidak semua MGMP telah menyusun perencanaan kegiatan penulisan soal USBN. Fakta lapangan menunjukkan bahwa 9 dari keseluruhan 20 MGMP Mapel UN (45%) tidak membuat rencana kegiatan penulisan soal USBN. Jadi sangat berbeda dengan MGMP penerima *block grant* dari Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa harapan dari Pusat agar Daerah membantu MGMP yang tidak menerima bantuan *block grant* dari Pusat tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Daerah.

Dari Tabel 29.b terlihat bahwa MGMP IPA merupakan MGMP yang paling banyak tidak membuat rencana penulisan soal USBN karena hanya ada satu lokasi yaitu Kota Bekasi yang membuat perencanaan kegiatan. Jadi, sebanyak empat MGMP IPA (80 persen) tidak membuat perencanaan kegiatan. MGMP lainnya yang juga cukup banyak tidak menyusun perencanaan kegiatannya adalah MGMP Bahasa Inggris, karena dari lima lokasi kajian, hanya dua lokasi yang menyusun perencanaan kegiatan; jadi sebanyak 60 persen MGMP Bahasa Inggris tidak menyusun perencanaan kegiatan. Untuk MGMP Mapel UN lainnya yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia, masing-masing ada satu MGMP (20%) yang tidak membuat perencanaan kegiatan.

Selanjutnya dari Tabel 4.29b terlihat pula bahwa lokasi dengan UN tinggi bukan berarti semua MGMP Mapel UN-nya membuat perencanaan kegiatan. Kota Bekasi yang merupakan lokasi

perwakilan UN tertinggi, salah satu MGMP Mapel UN-nya tidak menyusun perencanaan kegiatan. Kemudian Kabupaten Limapuluh Kota yang menjadi perwakilan daerah UN tinggi, salah satu MGMP-nya juga tidak membuat perencanaan kegiatan yaitu MGMP IPA. Lalu Kabupaten Flores Timur yang merupakan perwakilan lokasi UN sedang ternyata hanya ada satu MGMP Mapel UN (25%) yang membuat perencanaan kegiatan yaitu MGMP Matematika. Rerata nilai UN SMP Kabupaten Flores Timur justru lebih tinggi daripada Kota Kendari dan Kabupaten Kapuas Hulu padahal kedua lokasi ini masing-masing memiliki dua MGMP Mapel UN yang membuat perencanaan kegiatan. Dengan demikian maka dari aspek perencanaan kegiatan, peran MGMP untuk meningkatkan nilai UN tidak terlihat di sini, karena daerah dengan UN lebih tinggi (kasus Kabupaten Flores Timur) ternyata hanya 25 persen MGMP Mapel UN membuat perencanaan kegiatan. Sebaliknya daerah dengan banyak MGMP Mapel UN-nya membuat perencanaan kegiatan (Kasus untuk Kota Kendari dan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana masing-masingnya 50 persen MGMP Mapel UN membuat perencanaan kegiatan), justru nilai UN-nya lebih rendah.

Dari Tabel 4.29b terlihat bahwa penyusun perencanaan kegiatan adalah ketua MGMP di sebagian besar MGMP Mapel UN. Di atas disebutkan bahwa idealnya memang ketua MGMP menjadi penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan. Namun

demikian, ada MGMP yang masih mempercayakan penyusunan rencana kegiatan bukan kepada ketua MGMP tetapi kepada pihak dinas pendidikan atau anggota MGMP yang menjadi instruktur MGMP internal atau pengawas. Sebenarnya tidak masalah siapa menjadi penyusun rencana kegiatan MGMP, hanya saja yang menjadi penanggung jawabnya seharusnya tetap ketua MGMP, artinya Ketua MGMP menyerahkan atau menugaskan stafnya untuk menyusun rencana kegiatan, jika beliau berhalangan.

Tabel 4.29c Penyusun Rencana Kegiatan Penulisan Soal USBN pada MGMP Mapel Non UN Non Penerima *Block Grant* dari Pusat

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya*)
Kota Bekasi	Disdik	Ketua MGMP	--	Ketua & anggota MGMP, pengawas
50 Kota	--	--	--	--
Flotim	Pengawas	Anggota MGMP	Ketua & anggota MGMP, pengawas	--
Kota Kendari	Ketua MGMP	Pengawas	pengawas	Belum ada MGMP-nya
Kapuas Hulu	Pengawas	Ketua MGMP	pengawas	--



Sama seperti MGMP Mapel UN yang tidak menerima *block grant* dari Pusat, MGMP Mapel non UN lainnya yang juga tidak menerima *block grant* dari Pusat, perencanaan kegiatannya tidak sebaik MGMP PKn dan IPS yang mendapat bantuan *block grant* dari Pusat. Dari 20 MGMP ada satu MGMP yang belum terbentuk yaitu MGMP Prakarya di Kota Kendari dan ada tujuh dari 19 MGMP (sebanyak 36,8%) yang tidak membuat perencanaan kegiatan. Persentasenya sedikit lebih kecil daripada MGMP-UN. Artinya dari aspek penyusunan rencana kegiatan Berdasarkan Mapel, MGMP Mapel Prakarya merupakan MGMP yang paling banyak tidak membuat perencanaan kegiatan. Tiga dari empat MGMP Prakarya (75%) tidak membuat perencanaan kegiatan MGMP. Untuk Mapel SBK, terdapat dua dari lima MGMP (40%) yang tidak membuat perencanaan kegiatan. Untuk Mapel PA(I/K) dan PJOK, masing-masing ada satu dari lima MGMP (20%) yang tidak membuat perencanaan kegiatan.

## **2. Realisasi perencanaan kegiatan**

### ***a. Jumlah peserta penyusun soal USBN***

Mengenai jumlah peserta yang ikut menyusun soal USBN ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa guru yang terlibat dalam penyusunan soal USBN. Semakin banyak jumlah anggota MGMP yang terlibat dalam penyusunan soal USBN dapat menunjukkan bahwa semakin banyak guru siap menularkan ilmunya kepada peserta didik terutama dalam hal menyelesaikan

soal-soal aras tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan siswa untuk mengikuti UN yang sebagian soalnya merupakan soal aras tinggi, yakni membutuhkan daya nalar yang tinggi untuk menyelesaikannya.

Tabel 4.30 Jumlah Anggota MGMP Peserta Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	12 (4,9%)	41 (43,2%)	30(100%)	32 (43,8%)	2 (8%)
2. IPS	6(1,2%)	12(10%)	15(100%)	30(23,1%)	2(--)
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	60(--)	8(10%)	--	--	--
2. IPA	69(15,6%)	--	--	--	--
3. B. Indo	10(2,8%)	--	--	--	2(8,0%)
4. B. Ing	--	5(4,3%)	--	--	--
Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	80(32%)	--	20(100%)	4(5,3%)	--
2. PJOK	80(42,1%)	--	20(100%)	4(7,1%)	--
3. SBK	--	--	18(36%)	3(16,7%)	--
4. Prakarya	--	6(26,1%)	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.30 terlihat bahwa jumlah anggota MGMP yang dilibatkan dalam menyusun soal USBN berbeda-beda. Tidak terlihat pola tertentu misalnya suatu angka yang pasti misalnya melibatkan minimal sekian persen dari anggota terdaftar dan sebagainya. Terlihat bahwa MGMP penerima *block grant* dari

Pusat pun tidak mengikuti suatu pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa bantuan *block grant* tidak mempersyaratkan MGMP untuk melibatkan sejumlah anggota MGMP tertentu.

Untuk Mapel penerima *block grant* dari Pusat, terlihat bahwa ada yang melibatkan seluruh anggota MGMP-nya seperti di Flores Timur, dan ada yang melibatkan hanya sebagian kecil saja seperti MGMP IPS kota Bekasi yang hanya melibatkan 1,2 persen anggota MGMP. Dari analisis ini terlihat bahwa bantuan *block grant* kepada MGMP tidak mempersyaratkan berapa jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan. Bahkan di Kabupaten Kapuas Hulu kegiatan hanya melibatkan dua orang saja baik untuk MGMP PKn maupun untuk MGMP IPS. MGMP IPS Kabupaten Kapuas Hulu sendiri meskipun mendapat bantuan *block grant* dari Pusat namun MGMPnya tidak mendata jumlah anggota MGMP IPS di kabupaten Kapuas Hulu; ini merupakan indikasi bahwa MGMP IPS di Kabupaten Kapuas Hulu belum aktif.

Untuk MGMP Mapel UN: 15 dari 20 MGMP (sebanyak 75 persen) belum mendata jumlah anggota MGMP di wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar MGMP Mapel UN kurang aktif atau belum melaksanakan kegiatannya dengan rutin dan terencana. Di kabupaten Flores Timur dan Kota Kendari MGMP Mapel UN-nya sama sekali belum melaksanakan kegiatan dengan baik. Dalam menyusun soal USBN *range* jumlah anggota MGMP yang dilibatkan mulai dari

3 orang untuk MGMP SBK di Kota Kendari hingga 80 orang untuk MGMP IPA Kota Bekasi. Jumlah anggota yang terlibat hanya 2 orang, terlampau sedikit, sedangkan jumlah yang terlibat sampai 69 orang juga mungkin terlalu besar untuk melakukan koordinasi.

Untuk MGMP Mapel non UN lainnya: karena MGMP Prakarya belum terbentuk, maka sebanyak 10 dari 19 MGMP (52,6%) belum mendata jumlah anggota MGMP di wilayahnya. Angka ini sedikit lebih rendah daripada MGMP Mapel UN yang mencapai 75 persen. Meskipun angkanya lebih rendah, namun ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar MGMP Mapel non UN lainnya juga masih kurang aktif atau belum melaksanakan kegiatannya dengan rutin dan terencana. Di kabupaten Kapuas Hulu MGMP Mapel non UN-nya yang tidak menerima bantuan dari Pusat, sama sekali belum melaksanakan kegiatan MGMP dengan baik. Dalam menyusun soal USBN *range* jumlah anggota MGMP yang dilibatkan mulai dari 3 orang untuk MGMP SBK di Kota Kendari hingga 80 orang untuk MGMP PAI dan PJOK Kota Bekasi. Jumlah anggota yang terlibat hanya 3 orang, terlampau sedikit, sedangkan jumlah yang terlibat sampai 80 orang juga mungkin terlalu besar untuk melakukan koordinasi.

Untuk MGMP Mapel UN yang menjadi indikator mutu pendidikan saat ini, ternyata sebanyak 75 persen belum melaksanakan kegiatannya dengan baik, meskipun begitu pemerintah mengharapkan agar nilai UN harus meningkat dari

tahun ke tahun atau minimal mempertahankan prestasi tahun sebelumnya. Namun dengan banyaknya MGMP Mapel UN yang belum melaksanakan kegiatannya dengan baik sehingga tentunya harapan Pemerintah Pusat tidak akan tercapai. Kali ini Pemerintah Pusat mungkin terlalu banyak mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memang hanya memberikan bantuan kepada dua MGMP Mapel non UN, dan menghimbau Pemerintah Daerah mereplikasi program Pemerintah Pusat dengan memberikan bantuan kepada MGMP Mapel lainnya baik Mapel UN maupun non UN. Namun kenyataannya tidak semua Daerah selalu memprioritaskan pembangunan pendidikan terbukti dari banyaknya MGMP Mapel UN maupun non UN yang belum melaksanakan kegiatannya dengan baik. Jadi Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan agar apa yang diharapkan dapat terwujud.

***b. Lama waktu penyusunan soal USBN***

Penyusunan soal USBN tentunya membutuhkan waktu. Untuk itu perlu direncanakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun soal USBN. Dalam tabel berikut disajikan lama waktu yang diperlukan untuk melakukan penulisan soal USBN aras tinggi.

Tabel 4.31 Lama Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Soal USBN (dalam jam)

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	60	80	92	82	72
2. IPS	100	32	8	80	72
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	28	--	--	--	--
2. IPA	3	--	--	--	--
3. B. Indo	32	24	--	--	3
4. B. Ing	--	32	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	5	--	5	6	--
2. PJOK	5	--	5	6	--
3. SBK	--	--	7	10	--
4. Prakarya	24	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.31 terlihat bahwa tidak ada keseragaman antara lama waktu yang diperlukan untuk menyusun soal USBN. Pertama-tama kita perhatikan berapa lama waktu penyusunan soal USBN untuk Mapel non UN yang menerima bantuan *block grant* dari Pusat. Untuk Mapel PKn terlihat lama waktunya memiliki pola cukup menarik yaitu dengan *range* waktunya dari 60 hingga 92 jam. Dan ini masuk akal karena sangat tergantung kepada kemampuan guru dalam menyusun soal. Untuk Mapel IPS, polanya kurang menarik karena *range* waktunya terlalu lebar

yaitu dari hanya 8 jam hingga 100 jam. Analisis ini menunjukkan bahwa belum ada prediksi/perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyusun soal USBN aras tinggi.

Untuk MGMP Mapel UN dan non UN non penerima *block grant* dari Pusat: untuk MGMP Mapel UN terdapat 14 dari 20 MGMP (70%) sedangkan untuk MGMP Mapel non UN lainnya terdapat 10 dari 19 MGMP (52,6%) sama sekali tidak bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Selanjutnya untuk MGMP yang dapat menghitung jumlah waktu yang diperlukan untuk menyusun soal USBN aras tinggi, *range* waktunya tidak memiliki pola yang menarik. Untuk MGMP Mapel UN: *range*-nya dari hanya 3 jam untuk MGMP IPA Kota Bekasi dan juga MGMP B. Indo Kabupaten Kapuas Hulu hingga 32 jam untuk MGMP B. Indo Kota Bekasi; tentunya waktu 3 jam terlalu sedikit sedangkan 32 jam mungkin juga masih terlalu sedikit, jika kita bandingkan dengan MGMP Mapel PKn dengan *range* waktu 60-92 jam. Selanjutnya untuk Mapel non UN lainnya: *range* waktunya juga tidak memiliki suatu pola yang menarik jika kita bandingkan dengan *range* waktu Mapel PKn. *Range* waktunya mulai dari 5 jam hingga 24 jam. Tentunya waktu ini mungkin terlalu rendah. Dari uraian ini dapat dilihat bahwa Pemerintah belum dapat memprediksi/menentukan jumlah waktu minimal yang diperlukan untuk menyusun soal USBN aras tinggi untuk berbagai Mapel K-13.

**c. Pemberdayaan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN**

Pemberdayaan instruktur eksternal akan meningkatkan mutu soal USBN yang disusun. Apalagi kalau instrukturnya sudah pernah mengikuti pelatihan penyusunan soal aras tinggi, tentunya mutu soal USBN akan meningkat. Berikut disajikan tabel tentang pemberdayagunaan instruktur eksternal dalam kegiatan penulisan soal USBN.

Tabel 4.32 Pemberdayagunaan Instruktur Eksternal dalam Penyusunan Soal USBN

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	8	2	2	3	1
2. IPS	1	1	--	2	1
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	1	--	--	--	--
2. IPA	13	--	--	--	--
3. B. Indo	4	--	--	--	1
4. B. Ing	--	--	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	3	--	2	1	--
2. PJOK	3	--	2	1	--
3. SBK	--	--	--	--	--
4. Prakarya	--	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk



Dari Tabel 4.32 terlihat bahwa untuk MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat: hampir semua MGMP (sembilan dari 10 MGMP = 90 persen) memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN. Bahkan ada yang menggunakan 8 instruktur eksternal yaitu MGMP PKn Kota Bekasi, sedangkan yang lainnya memberdayakan minimal 1 instruktur eksternal. Ada satu MGMP yang tidak memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN yaitu MGMP IPS Kabupaten Flotim.

Untuk MGMP Mapel UN dan non UN lainnya: tercatat sebanyak 16 dari 20 MGMP (80 persen) MGMP Mapel UN dan 13 dari 19 (68,4%) MGMP Mapel non UN lainnya tidak memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN aras tinggi. Instruktur yang didayakan berkisar antara 1 hingga 13 instruktur eksternal. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam memberikan *block grant* juga tidak mempersyaratkan bahwa dalam menyusun soal USBN aras tinggi MGMP perlu melibatkan minimal sejumlah orang instruktur eksternal.

***d. Pemberdayaan instruktur internal dalam menyusun soal USBN***

Pemberdayaan instruktur internal juga akan meningkatkan mutu soal USBN yang disusun. Apalagi kalau instruktur nya sudah pernah mengikuti pelatihan penyusunan soal aras tinggi, tentunya mutu soal USBN akan meningkat.

Tabel 4.33 Pemberdayagunaan Instruktur Internal dalam Penyusunan Soal USBN

MGMP	Kabupaten/Kota				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	4	1	--	2	1
2. IPS	2	1	--	1	1
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	3	--	--	--	--
2. IPA	--	--	--	--	--
3. B. Indo	6	--	--	--	1
4. B. Ing	--	2	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	1	--	3	2	--
2. PJOK	1	--	3	2	--
3. SBK	--	--	--	1	--
4. Prakarya	--	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya di Kendari belum terbentuk

Dari Tabel 4.33 terlihat bahwa untuk MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat: hampir semua MGMP (delapan dari 10 MGMP = 80 persen) memberdayagunakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN. Jumlah instruktur yang digunakan berkisar dari satu hingga empat instruktur. Ada dua MGMP yang tidak memberdayagunakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN yaitu MGMP PKn dan IPS Kabupaten Flores Timur.

Untuk MGMP Mapel UN dan non UN lainnya: tercatat sebanyak 16 dari 20 MGMP (80%) MGMP Mapel UN dan 13 dari 19 (68,4%) MGMP Mapel non UN lainnya tidak memberdayakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN aras tinggi. Sisanya 31,6 persen memberdayakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN. Instruktur yang didayagunakan berkisar antara 1 hingga 6 instruktur. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam memberikan *block grant* juga tidak mempersyaratkan bahwa dalam menyusun soal USBN aras tinggi MGMP perlu melibatkan minimal sejumlah orang instruktur internal.

Dari dua paragraf terakhir tentang pemberdayagunaan instruktur dalam menyusun soal USBN, terlihat bahwa untuk MGMP Mapel UN, Mapel yang menjadi sorotan karena selama ini menjadi indikator mutu pendidikan kita, sebanyak 80 persen MGMP tidak memberdayakan instruktur baik eksternal maupun internal dalam menyusun soal USBN. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya mutu soal USBN yang dibuat. Rendahnya mutu soal USBN ini tentunya dapat memberikan dampak yang kurang positif pada upaya mempersiapkan siswa menghadapi UNBK yang sebagian soalnya aras tinggi. Ini yang menyebabkan siswa menjadi kurang siap menghadapi UNBK.

### **3. Penyiap Materi kegiatan Penyusunan soal USBN**

Informasi tentang penyiap materi yang diperlukan untuk menyusun soal USBN dapat memberikan sedikit gambaran

tentang mutu soal USBN yang dihasilkan. Tabel berikut menyajikan penyiap bahan atau materi untuk menyusun soal USBN di MGMP penerima *block grant* dari Pusat.

Tabel 4.34a Penyiap Materi untuk Penyusunan Soal USBN di MGMP Mapel Penerima *Block Grant* Pusat

Kab/ Kota	PKn	IPS
Kota Bekasi	Pengawas	Ketua MGMP, instruktur internal/eksternal, pengawas
50 Kota	Instruktur internal	Anggota MGMP, instruktur internal & eksternal
Flotim	Instruktur eksternal	Anggota MGMP
Kota Kendari	Instruktur internal & eksternal	Ketua MGMP
Kapuas Hulu	Ketua MGMP	Dinas Pendidikan

Dari Tabel 4.34a terlihat bahwa penyiap bahan/materi yang diperlukan untuk menyusun soal USBN di MGMP penerima bantuan *block grant* tidak dilakukan semata-mata oleh ketua MGMP tapi ada komponen/pihak berkepentingan lain yang juga membantu mempersiapkan bahan untuk penyusunan soal USBN yaitu instruktur internal dan eksternal, anggota MGMP, pengawas, dinas pendidikan dan sebagainya. Tentunya dengan melibatkan banyak pihak terutama instruktur akan meningkatkan mutu soal USBN yang dibuat. Dari tabel terlihat

lima dari 10 MGMP (50 Persen) melibatkan instruktur dalam menyiapkan materi untuk menyusun soal USBN.

Tabel 4.34b Penyiap Materi untuk Penyusunan Soal USBN di MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	Instruktur eksternal	Pengawas	Instruktur internal	Ketua & anggota MGMP
50 Kota	--	--	Ketua & anggota MGMP	Pengurus & anggota MGMP
Flotim	--	--	--	--
Kota Kendari	--	--	Ketua MGMP	instruktur eksternal
Kapuas Hulu	Ketua & anggota MGMP	--	Ketua & anggota MGMP	--

Dari aspek penyiap materi untuk menyusun USBN untuk MGMP Mapel UN, ternyata 10 dari 20 MGMP (50 persen) tidak mempersiapkannya dengan baik. Selanjutnya penyiap materi untuk penyusunan soal USBN dilakukan oleh aneka komponen/pihak berkepentingan di MGMP seperti pengurus MGMP, anggota MGMP, instruktur pengawas dan sebagainya. Di atas disebutkan bahwa instruktur sebagai penyiap materi untuk penyusunan soal USBN akan meningkatkan mutu soal USBN. Terlihat dari Tabel 4.6b. bahwa hanya di tiga dari 10

MGMP Mapel UN (30 persen) yang melibatkan instruktur untuk menyusun soal USBN. Uraian ini merupakan salah satu indikasi penyebab rendahnya mutu soal USBN, yang berakibat pada kurang maksimalnya upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi UNBK.

Tabel 4.34c Penyiap Materi untuk Penyusunan Soal USBN di MGMP Mapel Non UN Non Penerima *Block Grant* Pusat

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya*)
Kota Bekasi	Instruktur internal/ eksternal, pengawas	Instruktur internal & eksternal MGMP	--	Dinas Pendidikan
50 Kota	--	--	--	--
Flotim	Anggota MGMP	Anggota MGMP	Ketua & anggota MGMP, pengawas	--
Kota Kendari	Pengawas	pengawas	Pengawas	Belum terbentuk
Kapuas Hulu	Pengawas	Ketua MGMP	Pengawas	--

Dari Tabel 4.34c terlihat bahwa tujuh dari 19 (36,8%) MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat tidak mempersiapkan materi untuk menyusun soal USBN. Angka ini sedikit lebih baik daripada MGMP Mapel UN yang mencapai 50

persen. Sebelumnya disebutkan bahwa melibatkan instruktur dalam mempersiapkan bahan untuk menyusun soal USBN akan meningkatkan mutu soal USBN. Sayangnya hanya dua dari 12 (16,7%) MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* Pusat yang melibatkan instruktur dalam mempersiapkan materi untuk menyusun soal USBN.

#### **4. Lokasi kegiatan**

Lokasi pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu faktor penting dalam memotivasi anggota MGMP mengikuti kegiatan MGMP. Pengurus MGMP harus memberikan perhatian khusus dalam menetapkan lokasi kegiatan agar dapat meningkatkan kehadiran anggota. Penetapan lokasi kegiatan harus memberikan rasa adil kepada setiap anggota MGMP, sehingga bersedia mengikuti kegiatan MGMP. Sebagai contoh: Kabupaten Limapuluh Kota, wilayahnya mengelilingi Kota Payakumbuh. Agar adil dalam hal biaya transportasi mengikuti kegiatan maka tempat pelaksanaan kegiatan diadakan di tengah-tengah Kota Payakumbuh dengan menyewa gedung pertemuan. Dengan cara ini setiap anggota MGMP merasa diperlakukan secara adil karena sama-sama mengeluarkan biaya transportasi yang kurang lebih sama menuju ke lokasi pelaksanaan kegiatan.

Pada umumnya lokasi pelaksanaan kegiatan MGMP berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Ini sebenarnya adil juga namun untuk daerah tertentu tidak cocok. Yang pertama

dari segi letak geografi, sekolah yang satu letaknya terlalu jauh sehingga akan menyulitkan anggota MGMP tertentu untuk mengikuti kegiatan MGMP di sekolah tersebut. Contoh nyatanya di Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari pulau-pulau dan Kabupaten Kapuas Hulu yang luas wilayahnya sebesar Provinsi Jawa Barat. Untuk aspek geografis ini perlu dibuat Sub Rayon MGMP yang melingkupi beberapa sekolah di suatu wilayah tertentu sehingga menghemat biaya transportasi juga waktu, tenaga dan dana.

Selanjutnya dari aspek jumlah anggota MGMP, seperti Kota Bekasi yang jumlah anggota MGMP di atas 100 orang tentunya membutuhkan ruang besar seperti aula, dan tidak semua sekolah memiliki aula, dengan demikian pertemuan hanya terjadi di sekolah yang memiliki aula. Selanjutnya pertemuan atau kelas yang terdiri atas lebih dari 100 orang akan mengurangi daya serap peserta memahami materi yang disampaikan. Kegiatan menjadi kurang efektif. Guru dapat merasakan sendiri bagaimana guru harus menguasai sebuah kelas yang terdiri atas lebih dari 100 orang. Untuk itu maka perlu dipikirkan pula untuk membagi MGMP yang ada menjadi beberapa sub rayon MGMP untuk meningkatkan daya serap atau daya tangkap terhadap materi yang diajarkan oleh instruktur. Pada tabel berikut disampaikan informasi yang dapat menunjukkan konsistensi perencanaan kegiatan oleh MGMP terkait lokasi pelaksanaan kegiatan.



Tabel 4.35 Kesesuaian Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Dengan Rencana Awal

MGMP	Kab/kota dan kesesuaian lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2. IPS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	Sesuai	Sesuai	--	--	Sesuai
2. IPA	Sesuai	--	--	--	--
3. B. Indo	Sesuai	Sesuai	--	Sesuai	Sesuai
4. B. Ing	Sesuai	Sesuai	--	--	--
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	Sesuai	--	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2. PJOK	Sesuai	--	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3. SBK	--	Sesuai	--	Sesuai	Sesuai
4. Prakarya	Sesuai	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari

Dari Tabel 4.35 terlihat bahwa dua dari 10 MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat (20 persen) lokasi pelaksanaan kegiatannya berubah dari rencana awal. Perubahan ini sesungguhnya bukan karena perencanaan yang kurang matang, tapi alasannya lebih karena (i) di Kota Bekasi kegiatannya dilakukan di sekolah tertentu saja yang memiliki aula atau ruang pertemuan, sedangkan (ii) di Kabupaten Limapuluh Kota perubahan ini terjadi untuk memberikan rasa adil kepada

anggota MGMP dalam hal biaya transportasi karena dicarikan lokasi di tengah kota Payakumbuh yaitu kota yang dikelilingi Kabupaten Limapuluh Kota dengan menyewa ruang pertemuan. Setiap anggota MGMP yang mengikuti kegiatan MGMP mengeluarkan biaya transportasi serta tenaga dan waktu yang kurang lebih sama ketika datang ke lokasi kegiatan MGMP. Jadi perencanaan lokasi kegiatan yang dibuat oleh MGMP PKn dan IPS, boleh dikatakan masih sesuai dengan rencana awal.

Untuk MGMP Mapel UN, 10 dari 20 MGMP (50%) tidak membuat perencanaan yang matang mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan MGMP khususnya untuk penyusunan soal USBN. Sisanya 50 persen lainnya membuat perencanaan tentang lokasi kegiatan dan merealisasikannya. Selanjutnya mengenai MGMP Mapel non UN lainnya, sebanyak tujuh dari 19 MGMP (36,8%) tidak merencanakan dengan matang lokasi pelaksanaan kegiatannya. Jika dibandingkan dengan MGMP Mapel UN maka perencanaan lokasi pelaksanaan kegiatan di MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* Pusat sedikit lebih baik.

## **5. Metode penyampaian materi pelatihan**

Pemilihan cara penyampaian materi kegiatan yang tepat akan meningkatkan daya tarik dan daya tangkap peserta terhadap materi yang disampaikan. Tabel berikut menyajikan metode pelatihan yang diterapkan di MGMP penerima *block grant* dari Pusat.

Tabel 4.36a Metode Penyampaian Materi Kegiatan Penyusunan Soal USBN

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Kota Bekasi	Kerja kelompok	Diskusi + kerja kelompok
50 Kota	Kerja kelompok	Diskusi + kerja kelompok dan ceramah
Flotim	Kerja kelompok	Diskusi + kerja kelompok
Kota Kendari	Kerja kelompok	Diskusi + kerja kelompok
Kapuas Hulu	Kerja individu + kerja kelompok	Diskusi + kerja kelompok + kerja individu

Dari Tabel 4.36a terlihat bahwa MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat hampir semuanya menerapkan cara penyampaian materi kegiatan dengan metode atau cara kerja kelompok. Selain metode tersebut ada MGMP yang mengkombinasikannya dengan kerja individu. Khusus MGMP IPS cara penyampaian materi juga dilakukan melalui diskusi. Cara-cara seperti ini memang sangat diharapkan untuk diterapkan karena akan mencegah rasa kantuk sehingga peserta dapat meningkatkan daya serap atau daya tangkap terhadap materi yang disampaikan.

Tabel 4.36b Metode Penyampaian Materi di MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	kerja kelompok, ceramah	Diskusi, kerja kelompok	kerja kelompok	kerja kelompok
50 Kota	--	--	Diskusi, kerja kelompok/ individu	Diskusi
Flotim	--	diskusi dan kerja kelompok	--	--
Kota Kendari	--	--	Diskusi, kerja individu	Diskusi, kerja kelompok, ceramah
Kapuas Hulu	--	--	kerja kelompok	--

Dari Tabel 4.36b terlihat bahwa 10 dari 20 MGMP Mapel UN (50%) tidak menentukan metode penyampaian materi kegiatan penyusunan soal USBN. Di antara 10 MGMP yang menerapkan metode tertentu dalam penyampaian materi, delapan diantaranya (80%) menerapkan metode penyampaian materi kegiatan melalui kerja kelompok. Metode ini merupakan yang paling disukai karena dapat menghilangkan rasa kantuk peserta sehingga mampu meningkatkan daya tangkap peserta terhadap materi yang disampaikan. Ada pula MGMP yang mengkombinasikan metode ini dengan diskusi dan juga kerja individu dan ceramah. Metode diskusi juga banyak diterapkan.

Tabel 4.36c Metode Penyampaian Materi di MGMP Non Mapel  
UN Non-Penerima *Block Grant* Pusat

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya*)
Kota Bekasi	Diskusi dan kerja kelompok	Kerja kelompok	--	kerja kelompok
50 Kota	--	--	--	--
Flotim	Diskusi, kerja kelompok + ceramah	Diskusi	Diskusi, kerja kelompok/ individu	--
Kota Kendari	Kerja kelompok	Diskusi dan kerja kelompok	Kerja kelompok	Belum terbentuk
Kapuas Hulu	Kerja kelompok	Diskusi dan kerja kelompok	Kerja kelompok	--

Dari Tabel 4.36c terlihat bahwa sebanyak tujuh dari 19 MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat (36,8%) tidak menetapkan metode penyampaian materi kegiatan penyusunan soal USBN. Di antara 12 MGMP yang menerapkan metode tertentu, 11 diantaranya (91,7%) menerapkan metode penyampaian materi kegiatan melalui kerja kelompok. Metode ini merupakan yang paling disukai karena dapat menghilangkan rasa kantuk peserta sehingga dapat meningkatkan daya tangkap peserta terhadap materi yang disampaikan. Ada pula MGMP yang mengkombinasikan metode ini dengan diskusi dan juga kerja individu dan ceramah. Metode diskusi juga cukup banyak diterapkan.

## 6. Kesesuaian kompetensi instruktur Eksternal

Instruktur eksternal yang membantu menyusun soal USBN memang harus diupayakan yang kompeten di bidangnya sehingga mampu meningkatkan mutu soal USBN yang dibuat. Untuk itu MGMP harus memilih dan selektif dalam mengundang instruktur eksternal dengan menerapkan kriteria antara lain sudah pernah mengikuti pelatihan penyusunan soal aras tinggi dan sebagainya. Artinya instruktur yang didayagunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tabel berikut menyajikan kesesuaian kompetensi instruktur dengan kebutuhan MGMP.

Tabel 4.37 Kesesuaian Kompetensi Instruktur Eksternal dengan Kebutuhan

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Kompetensi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKN	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2. IPS	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	sesuai	--	--	--	--
2. IPA	sesuai	--	--	--	--
3. B. Indo	sesuai	--	--	sesuai	sesuai
4. B. Ing	sesuai	--	--	sesuai	sesuai
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	sesuai	--	sesuai	sesuai	sesuai
2. PJOK	sesuai	--	sesuai	sesuai	--
3. SBK	--	sesuai	--	sesuai	sesuai
4. Prakarya	sesuai	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari

Dari Tabel 4.37 terlihat bahwa pada MGMP penerima *block grant* dari Pusat yakni MGMP PKn dan IPS, ke 10 MGMP (100%) dalam menyusun soal USBN memberdayakan instruktur eksternal dan menurut para ketua MGMP, kompetensi para instruktur eksternal tersebut sesuai dengan kebutuhan penyusunan soal USBN tersebut.

Untuk MGMP Mapel UN, terlihat ada 12 dari 20 MGMP (60%) tidak memberdayakan instruktur eksternal dalam penyusunan soal USBN. MGMP Mapel UN di Kota Bekasi merupakan satu-satunya lokasi kajian yang memberdayakan instruktur eksternal untuk keempat Mapel UN, dan kompetensi mereka sesuai kebutuhan. Hal ini menjadi indikasi kuat mengapa Kota Bekasi menjadi lokasi dengan rerata Nilai UN tertinggi di antara kelima lokasi kajian. MGMP Mapel UN di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Flores Timur sama sekali tidak memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN. Meskipun demikian, kedua kabupaten tersebut berturut-turut mewakili daerah dengan perolehan rerata UN tinggi dan sedang. Dengan demikian, informasi ini memudahkan bukti bahwa pelibatan instruktur eksternal tidak menjadi jaminan bahwa rerata nilai UN menjadi lebih baik.

Contoh lainnya yang juga memudahkan bukti bahwa melibatkan instruktur dapat meningkatkan rerata nilai UN adalah bahwa Kota Kendari dan Kabupaten Kapuas Hulu meskipun

memberdayakan instruktur eksternal, yaitu masing-masing untuk dua MGMP Mapel UN namun justru kedua daerah ini menjadi perwakilan rerata nilai UN rendah dan sangat rendah. Artinya rerata UN di wilayah ini lebih rendah dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Flores Timur yang nota bene sama sekali tidak memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN. Selanjutnya MGMP yang memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN, seluruh ketuanya menyampaikan bahwa kompetensi instruktur yang diberdayakan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya terlihat bahwa untuk MGMP Mapel non UN non penerima block grant dari Pusat, sebanyak 9 dari 19 MGMP (47,4%) tidak memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN. Angka ini sedikit lebih rendah daripada MGMP Mapel UN yang mencapai 60 persen. Selanjutnya MGMP yang memberdayakan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN, ketuanya menyampaikan bahwa kompetensi instruktur yang diberdayakan sesuai dengan kebutuhan.

## **7. Kesesuaian kompetensi instruktur internal**

Pemberdayaan instruktur sebagaimana disampaikan sebelumnya harus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini menyusun soal USBN. Berikut disajikan tabel tentang kesesuaian kompetensi instruktur internal dengan kebutuhan.



Tabel 4.38 Kesesuaian Kompetensi Instruktur Internal dengan Kebutuhan

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Kompetensi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
<b>A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat</b>					
1. PKn	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2. IPS	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
<b>B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat</b>					
1. Mat	sesuai	--	--	--	--
2. IPA	sesuai	--	--	--	--
3. B. Indo	sesuai	tidak sesuai	--	sesuai	sesuai
4. B. Ing	sesuai	sesuai	--	--	--
<b>C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat</b>					
1. PA(I/K)	sesuai	--	sesuai	sesuai	sesuai
2. PJOK	sesuai	--	sesuai	sesuai	--
3. SBK	--	sesuai	--	sesuai	sesuai
4. Prakarya	sesuai	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari

Dari Tabel 4.38 terlihat bahwa pada MGMP penerima *block grant* dari Pusat yakni MGMP PKn dan IPS, kesepuluh MGMP (100 persen) dalam menyusun soal USBN memberdayakan instruktur internal dan menurut para ketua MGMP-nya kompetensi para instruktur internal sesuai dengan kebutuhan penyusunan soal USBN tersebut.

Terlihat bahwa untuk MGMP Mapel UN, ada 12 dari 20 MGMP (60%) tidak memberdayakan instruktur internal. MGMP Mapel UN di Kota Bekasi merupakan satu-satunya lokasi kajian yang memberdayakan instruktur internal untuk keempat Mapel UN, dan kompetensi mereka sesuai kebutuhan. Data ini menjadi indikasi kuat mengapa Kota Bekasi menjadi lokasi dengan rerata Nilai UN tertinggi di antara kelima lokasi kajian. MGMP Mapel UN di Kabupaten Flores Timur sama sekali tidak memberdayakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN. Meskipun begitu, kabupaten tersebut mewakili daerah dengan perolehan rerata nilai UN sedang.

Dengan demikian, data ini seolah membatalkan alasan/bukti bahwa pelibatan instruktur internal dalam penyusunan soal USBN memberikan semacam jaminan bahwa rerata nilai UN menjadi lebih baik. Batalnya bukti juga karena penjelasan berikut. Kota Kendari dan Kabupaten Kapuas Hulu memberdayakan instruktur internal pada salah satu MGMP Mapel UN, namun justru kedua daerah ini menjadi perwakilan rerata nilai UN rendah dan sangat rendah. Artinya rerata UN di wilayah ini lebih rendah dari Kabupaten Flores Timur yang sama sekali tidak memberdayakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN. Selanjutnya MGMP yang memberdayakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN, tujuh dari delapan ketua MGMP (87,5%) menyampaikan

bahwa kompetensi instruktur internal yang diberdayagunakan sesuai dengan kebutuhan.

Terlihat bahwa untuk MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat, sebanyak 8 dari 19 MGMP (42,1%) tidak memberdayagunakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN. Angka ini sedikit lebih rendah daripada MGMP Mapel UN yang mencapai 60 persen. Selanjutnya MGMP yang memberdayagunakan instruktur internal dalam menyusun soal USBN, seluruh ketua MGMP-nya menyampaikan bahwa kompetensi instruktur internal yang diberdayagunakan sesuai dengan kebutuhan.

### **Kendala dalam merealisasikan perencanaan penyusunan soal USBN**

Ketika mengimplementasikan suatu kegiatan terkadang kita menemukan hambatan. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan kegiatan penulisan soal USBN aras tinggi. Berikut disampaikan beberapa kendala yang dihadapi MGMP penerima *block grant* Pusat dalam mengimplementasikan kegiatan penulisan soal USBN.

Tabel 4.39a Kendala yang Dihadapi MGMP Mapel Penerima *Block Grant* dari Pusat

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Kota Bekasi	Waktu latihan soal HOTS tidak memadai	--
50 Kota	Kesulitan mengidentifikasi materi untuk level pendidikan	Tempat pelatihan kurang nyaman karena materinya banyak
Flotim	Tidak semua guru berlatar belakang pendidikan PKn	--
Kota Kendari	Banyak guru belum mampu menyusun soal HOTS	--
Kapuas Hulu	Guru kurang fokus karena harus mengajar sambil menyusun soal USBN	Banyak guru tidak mampu menyusun soal HOTS

Dari Tabel 4.39a terlihat bahwa MGMP penerima *block grant* dari Pusat juga mengalami kendala dalam merealisasikan kegiatan penyusunan soal USBN. Kendala yang dihadapi antara lain: (i) keterbatasan waktu untuk latihan soal aras tinggi, (ii) banyak guru masih belum mampu menyusun soal aras tinggi, (iii) guru kurang fokus mengikuti kegiatan karena harus diselingi dengan mengajar, dan (iv) tidak semua guru berlatar belakang pendidikan yang sama untuk menyusun soal aras tinggi meski sama-sama mengajar Mapel yang sama dan sebagainya.

Tabel 4.39b Kendala yang Dihadapi MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	--	Waktu pelatihan tidak memadai	belum semua guru mampu menyusun soal HOTS	--
50 Kota	--	--	Guru kesulitan menyusun soal HOTS	Guru belum terbiasa menyusun soal HOTS
Flotim	--	--	--	--
Kota Kendari	--	--	--	belum pernah mengikuti pelatihan menyusun soal HOTS
Kapuas Hulu	Waktu pelatihan tidak memadai	--	waktu tidak memadai karena harus mengajar juga	--

Dari Tabel 4.39b terlihat bahwa MGMP Mapel UN juga mengalami kendala dalam merealisasikan penyusunan soal USBN. Kendala yang dihadapi antara lain: (1) Banyak guru belum pernah mengikuti pelatihan menyusun soal aras tinggi, (2) banyak guru masih belum mampu menyusun soal aras tinggi, (3)

guru kurang fokus mengikuti kegiatan karena harus diselingi dengan mengajar, dan (4) terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan dan sebagainya.

Tabel 4.39c Kendala yang Dihadapi MGMP Non Mapel UN Lainnya

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya
Kota Bekasi	Waktu kegiatan kurang memadai, tempat juga kurang nyaman	--	--	Terbatasnya kosa kata untuk membuat soal HOTS dan banyak siswa tidak paham
50 Kota	--	--	--	--
Flotim	--	--	Kekurangan guru yang berlatar belakang seni	--
Kota Kendari	Siswa belum terbiasa berpikir aras tinggi	Waktu terlalu mendesak, terlalu mepet dengan USBN	Terbatasnya media pembelajaran	--
Kapuas Hulu	--	Jumlah anggota penyusun soal terbatas	--	--

Dari Tabel 4.39c terlihat bahwa MGMP Mapel non UN non penerima block grant dari Pusat juga mengalami kendala dalam merealisasikan penyusunan soal USBN. Kendala yang dihadapi antara lain: (1) tidak semua guru berlatar belakang pendidikan yang sama untuk menyusun soal aras tinggi meski sama-sama mengajar Mapel yang sama, (2) terbatasnya jumlah guru yang ditugaskan untuk menyusun soal aras tinggi, (3) terbatasnya kosa kata untuk membuat soal aras tinggi dan banyak siswa tidak memahaminya, dan (4) terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan dan sebagainya.

#### **D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN**

Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan soal tentunya adalah paket-paket soal yang diperlukan untuk pelaksanaan USBN. Selain itu dihasilkan pula kunci jawaban yang diperlukan untuk melakukan koreksi hasil ujian peserta didik. Ini merupakan hasil yang kelihatan. Hasil lainnya yang tak kelihatan adalah pemahaman peserta didik terhadap materi penyusunan soal aras tinggi, peningkatan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional setelah mengikuti kegiatan penulisan soal USBN aras tinggi, dan kemampuan guru untuk menyusun soal aras tinggi.

##### **1. Peserta memahami materi yang disampaikan**

Kegiatan penyusunan soal USBN umumnya menjadi tanggung jawab MGMP. Untuk merealisasikannya maka dinas pendidikan menerbitkan surat tugas untuk menugaskan beberapa anggota

MGMP guna menyusun soal USBN. Dinas pendidikan berkoordinasi dengan masing-masing ketua MGMP agar menentukan anggota MGMP yang berkompeten guna diseleksi dan ditugaskan menyusun soal USBN. Jadi tidak semua anggota MGMP dilibatkan menyusun soal USBN. Sebagai contoh di Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyusun soal USBN PKn, dinas pendidikan setempat hanya menugaskan 2 orang anggota MGMP PKn.

Dengan demikian, maka pertanyaan apakah peserta MGMP memahami materi penyusunan soal aras tinggi yang disampaikan, jawaban pertanyaan ini hanya berlaku untuk peserta penyusun soal USBN. Jika jawabannya seluruh peserta MGMP memahami itu bukan berarti sebagian besar anggota MGMP memahaminya, namun hanya mereka yang terlibat atau ditugaskan menyusun soal USBN. Berikut disajikan tabel tentang pemahaman peserta penyusun soal USBN aras tinggi untuk MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat.



Tabel 4.40a Pemahaman Peserta Penulisan Soal USBN atas Materi untuk Menyusun Soal Aras Tinggi di MGMP Penerima *Block Grant* dari Pusat

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Kota Bekasi	sebagian besar	seluruhnya
50 Kota	sebagian besar	sebagian besar
Flotim	sebagian besar	--
Kota Kendari	sebagian besar	sebagian besar
Kapuas Hulu	sebagian besar (karena cuma berdua)	sebagian kecil

Dari Tabel 4.40a terlihat bahwa umumnya ketua MGMP menyampaikan bahwa sebagian besar atau bahkan seluruh peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan penyusunan soal USBN. Terlihat 8 dari 10 (80%) ketua MGMP menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Satu dari 10 MGMP (10%) menyampaikan bahwa seluruh peserta penyusun soal USBN memahami materi yang disampaikan, dan ada satu orang ketua MGMP yang meragukan peserta penyusun soal USBN memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan menyusun soal USBN.

Tabel 4.40b Pemahaman Peserta Penulisan Soal USBN atas Materi untuk Menyusun Soal Aras Tinggi di MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	sebagian besar	sebagian besar	seluruhnya	seluruhnya
50 Kota	sebagian besar	--	seluruhnya	sebagian besar
Flotim	--	--	--	--
Kota Kendari	--	sebagian besar	sebagian besar	--
Kapuas Hulu	sebagian besar	--	sebagian besar	sebagian kecil

Dari Tabel 4.40b terlihat bahwa delapan dari 20 orang (40%) ketua MGMP Mapel UN menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk tujuan penyusunan soal tersebut. Tiga dari 20 orang (15%) ketua MGMP menyampaikan bahwa seluruh peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk tujuan penulisan soal USBN. Satu dari 20 orang (5%) ketua MGMP menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk penyusunan soal tersebut. Lebih lanjut tujuh dari 20 orang (35%) ketua MGMP meragukan peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk penulisan soal tersebut.

Tabel 4.40c Pemahaman Peserta Penulisan Soal USBN atas Materi untuk Menyusun Soal Aras Tinggi di MGMP Mapel Non UN Lainnya

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya
Kota Bekasi	sebagian besar	--	--	sebagian besar
50 Kota	--	--	sebagian besar	--
Flotim	seluruhnya	seluruhnya	--	--
Kota Kendari	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	--
Kapuas Hulu	sebagian besar	sebagiaian kecil	sebagian besar	--*)

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari

Dari Tabel 4.40c terlihat bahwa delapan dari 19 orang (42,1%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk tujuan penyusunan soal tersebut. Dua dari 19 orang (10,5%) ketua MGMP menyampaikan bahwa seluruh peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk tujuan penulisan soal tersebut. Satu dari 19 orang (5,3%) ketua MGMP menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil peserta penulisan soal USBN memahami materi yang disampaikan untuk penyusunan soal tersebut. Lebih lanjut tujuh dari 19 orang (36,8%) ketua MGMP meragukan peserta penulisan soal USBN

memahami materi yang disampaikan untuk penulisan soal tersebut.

## 2. Peningkatan kompetensi setelah mengikuti pelatihan

Tentunya setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN aras tinggi, kompetensi peserta penulisan soal diharapkan mengalami peningkatan. Dengan demikian maka program dapat dikatakan berhasil atau efektif karena tujuannya tercapai. Sebagaimana penyampaian sebelumnya peserta penulisan soal ini merupakan penugasan oleh dinas pendidikan sehingga hanya melibatkan sejumlah kecil anggota MGMP. Dengan demikian maka jika ketua MGMP menyampaikan bahwa seluruh peserta penulisan soal mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN aras tinggi; itu bukan berarti seluruh anggota MGMP mengalami peningkatan kompetensi tetapi mereka yang ikut kegiatan penyusunan soal USBN saja.

Tabel 4.41a Peningkatan Kompetensi Peserta Penulisan Soal USBN di MGMP Penerima *Block Grant* dari Pusat

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Kota Bekasi	sebagian besar	seluruhnya
50 Kota	sebagian besar	sebagian besar
Flotim	sebagian besar	sebagian besar
Kota Kendari	sebagian besar	sebagian besar
Kapuas Hulu	--	sebagian besar

Dari Tabel 4.41a terlihat bahwa sembilan dari 10 orang (90%) ketua MGMP Mapel penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar bahkan ada yang menyampaikan seluruh peserta penulisan soal USBN mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penulisan soal USBN. Untuk MGMP PKn Kabupaten Kapuas Hulu, ketua MGMP menyampaikan bahwa yang ditugaskan untuk menulis soal hanya guru tertentu saja yang sudah kompeten dalam menyusun soal-soal ujian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua ketua MGMP (100%) menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN mengalami peningkatan kompetensi setelah menyusun soal USBN.

Tabel 4.41b Peningkatan Kompetensi Peserta Penulisan Soal USBN di MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	sebagian besar	sebagian besar	seluruhnya	seluruhnya
50 Kota	--	--	seluruhnya	sebagian besar
Flotim	--	--	--	--
Kota Kendari	--	sebagian besar	sebagian besar	--
Kapuas Hulu	sebagian besar	--	seluruhnya	sebagian kecil

Dari Tabel 4.41b terlihat bahwa enam dari 20 orang (30 persen) ketua MGMP Mapel UN non penerima *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penulisan soal USBN. Selanjutnya ada empat dari 20 orang (20%) ketua MGMP Mapel UN menyampaikan bahwa seluruh peserta penulisan soal USBN mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penulisan soal USBN. Lebih lanjut ada satu dari 20 orang (5%) ketua MGMP Mapel UN menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil peserta MGMP yang mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penulisan soal USBN. Selanjutnya sebanyak sembilan dari 20 orang (45%) ketua MGMP yang meragukan telah terjadi peningkatan kompetensi pada guru-guru anggota MGMP yang ditugaskan untuk menyusun soal USBN.

Tabel 4.41c Peningkatan Kompetensi Peserta Penulisan Soal USBN di MGMP Mapel Non UN Lainnya

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya
Kota Bekasi	sebagian besar	--	--	sebagian besar
50 Kota	--	--	seluruhnya	--
Flotim	sebagian besar	sebagian besar	--	--
Kota Kendari	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	belum terbentuk
Kapuas Hulu	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	--

Dari Tabel 4.41c terlihat bahwa 10 dari 19 orang (52,6%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar guru anggota MGMP yang mendapat tugas menyusun soal USBN mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya ada satu dari 19 orang (5,3%) ketua MGMP Mapel non UN yang menyampaikan bahwa seluruh peserta penulisan soal USBN mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut sebanyak sembilan dari 19 (47,4%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* yang meragukan telah terjadi peningkatan kompetensi pada guru-guru anggota MGMP yang ditugaskan untuk menyusun soal USBN. Bahwa ada ketua MGMP yang meragukan telah terjadi peningkatan kompetensi guru setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN, ini juga terlihat ketika diadakan diskusi karena ketua MGMP mengungkapkan bahwa banyak anggota MGMP tidak dilibatkan dalam penyusunan soal USBN, sebab dinas pendidikan hanya menugaskan guru-guru berprestasi saja dalam menyusun soal USBN.

### **3. Kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi**

Menurut salah seorang ketua MGMP Bahasa Indonesia di Kota Palangkaraya, untuk menyusun soal USBN dibentuk tim yang beranggotakan guru Bahasa Indonesia. Tugas mereka mempersiapkan dan menyusun soal USBN sesuai standar yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order*

*thinking skills/HOTS*). Untuk itu maka perlu digali informasi bagaimana kemampuan guru-guru setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN.

Tabel 4.42a Kemampuan Menulis Soal USBN Aras Tinggi Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan pada MGMP Penerima *Block Grant* Pusat

Kab/Kota	MGMP	
	PKn	IPS
Kota Bekasi	sebagian besar	seluruhnya
50 Kota	sebagian besar	--
Flotim	sebagian besar	sebagian besar
Kota Kendari	seluruhnya	sebagian besar
Kapuas Hulu	seluruhnya	sebagian besar

Dari Tabel 4.42a terlihat enam dari 10 orang (60%) ketua MGMP penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN sudah memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi. Sebanyak tiga dari 10 orang (30%) ketua MGMP penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa seluruh anggota MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN sudah memiliki kemampuan untuk menyusun soal USBN aras tinggi.

Ada satu dari 10 orang (10%) ketua MGMP yang meragukan bahwa peserta penulisan soal USBN memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi. Dengan demikian dapat



dikatakan bahwa sebanyak 90 persen ketua MGMP Mapel PKn dan IPS selaku Mapel penerima bantuan *block grant* dari Pusat, atau dalam hal ini Ditjen GTK Kemendikbud menyampaikan bahwa guru-guru anggota MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN aras tinggi, sebagian besar atau seluruhnya menguasai cara menyusun soal aras tinggi.

Dengan demikian, guru-guru ini diharapkan dapat menjadi instruktur di MGMP-nya masing-masing dan mengajarkan kepada rekan sejawatnya bagaimana menyusun soal aras tinggi. Namun demikian, sebaiknya sebelum mereka ditetapkan sebagai instruktur mungkin mereka perlu dilatih lagi terlebih dahulu untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang soal aras tinggi, karena ternyata masih ada ketua MGMP yang meragukan kemampuan anggotanya menyusun soal aras tinggi. Ini lagi-lagi disebabkan karena dinas pendidikan hanya menugaskan guru-guru berprestasi saja dalam kegiatan penyusunan soal USBN. Lalu tidak ada langkah verifikasi dan validasi soal bahwa soal yang dibuat adalah soal aras tinggi.

Tabel 4.42b Kemampuan Menulis Soal USBN Aras Tinggi Peserta Setelah Ikut Kegiatan pada MGMP Mapel UN

Kab/Kota	MGMP			
	Mat	IPA	B. Indo	B. Ing
Kota Bekasi	--	sebagian besar	seluruhnya	seluruhnya
50 Kota	sebagian besar	--	seluruhnya	sebagian besar
Flotim	--	--	--	--
Kota Kendari	--	sebagian besar	sebagian besar	--
Kapuas Hulu	sebagian kecil	--	seluruhnya	sebagian kecil

Dari Tabel 4.42b terlihat enam dari 20 orang (30%) ketua MGMP mapel UN non penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN sudah memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi. Sebanyak empat dari 20 orang (20%) ketua MGMP Mapel UN non penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa seluruh anggota MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN sudah memiliki kemampuan untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Ada satu dari 20 orang (5%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil peserta penulisan soal USBN memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi. Lebih lanjut Sembilan dari 20 orang (45%) ketua MGMP Mapel UN non penerima *block grant* dari Pusat

meragukan kemampuan guru peserta penulisan soal USBN bahwa mereka sudah mampu membuat soal USBN aras tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baru sekitar 50 persen ketua MGMP Mapel UN sebagai salah satu kelompok MGMP non penerima bantuan *block grant* dari Pusat, menyampaikan bahwa guru-guru anggota MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN aras tinggi, sebagian besar atau seluruhnya menguasai cara menyusun soal aras tinggi. Dengan demikian, guru-guru ini diharapkan dapat menjadi instruktur di MGMP-nya masing-masing dan dapat menularkan ilmunya atau mengajarkan kepada rekan sejawatnya bagaimana menyusun soal aras tinggi. Namun demikian, sebaiknya sebelum mereka ditetapkan sebagai instruktur mungkin mereka perlu dilatih lagi terlebih dahulu untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang soal aras tinggi, karena ternyata masih ada sebagian ketua MGMP yang meragukan kemampuan anggotanya menyusun soal aras tinggi.

Tabel 4.42c Kemampuan Menulis Soal USBN Aras Tinggi Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan pada MGMP Mapel Non UN Lainnya

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya
Kota Bekasi	sebagian besar	--	--	sebagian besar
50 Kota	--	--	sebagian Kecil	--

Kab/Kota	MGMP			
	PA(I/K)	PJOK	SBK	Prakarya
Flotim	seluruhnya	sebagian besar	--	--
Kota Kendari	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	belum terbentuk
Kapuas Hulu	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	--

Dari Tabel 4.42c terlihat sembilan dari 19 orang (47,4%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar peserta penulisan soal USBN sudah memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi. Satu dari 19 orang (5,3%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima bantuan *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa seluruh anggota MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN sudah memiliki kemampuan untuk menyusun soal USBN aras tinggi. Selain itu, satu dari 19 orang (5,3%) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil peserta penulisan soal USBN memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi. Lebih lanjut delapan dari 19 orang (42,1%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat meragukan kemampuan guru peserta penulisan soal USBN bahwa mereka sudah mampu membuat soal USBN aras tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baru sekitar 52,6 persen ketua MGMP Mapel non UN sebagai salah satu kelompok

MGMP non penerima bantuan *block grant* dari Pusat, menyampaikan bahwa guru-guru anggota MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN aras tinggi, sebagian besar atau seluruhnya menguasai cara menyusun soal aras tinggi. Dengan demikian, guru-guru ini diharapkan dapat menjadi instruktur di MGMP-nya masing-masing dan dapat menularkan ilmunya atau mengajarkan kepada rekan sejawatnya bagaimana menyusun soal aras tinggi. Namun demikian, sebaiknya sebelum mereka ditetapkan sebagai instruktur sebaiknya mereka perlu dilatih lagi terlebih dahulu untuk menyamakan pemahaman dan persepsi yang sama tentang soal aras tinggi, karena ternyata masih ada sebagian ketua MGMP yang meragukan kemampuan anggotanya menyusun soal aras tinggi.

### **E. Diseminasi Hasil Kegiatan Penyusunan Soal USBN**

Guru setelah mengikuti suatu kegiatan semacam pelatihan misalnya tentang suatu metode pembelajaran yang baru dan sebagainya, guru tersebut bila perlu diwajibkan menularkan ilmunya tersebut kepada teman/rekan kerjanya minimal dengan rekannya yang sama-sama mengajar mata pelajaran yang sama. Dengan demikian, apa yang didapat guru ketika mengikuti pelatihan tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk rekannya yang lain yang tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Cara menularkan ilmu ke rekan sejawat ini lebih dikenal dengan istilah diseminasi hasil pelatihan. Ini merupakan salah satu kelebihan dari cara belajar yang murah

meriah untuk meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah tidak perlu melatih seluruh guru tetapi sebagian saja dan yang sebagian yang sudah dilatih ini mendiseminasikan ilmunya kepada rekannya. Dengan demikian pemerintah dapat menghemat biaya pelatihan. Apalagi dengan kehadiran MGMP yang hendak dioptimalisasikan perannya, guru yang sudah dilatih tentunya bisa menjadi instruktur di MGMP tempat dia menjadi anggota. Dengan demikian, seluruh anggota MGMP bisa belajar dari guru yang diundang untuk ikut pelatihan di LPMP atau P4TK. Untuk itu maka kepala sekolah perlu mendukung kegiatan diseminasi untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya khusus yang mengajar Mapel yang sama.

### **1. Dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan diseminasi hasil kegiatan penyusunan soal USBN**

Diseminasi hasil merupakan kegiatan yang sangat diperlukan untuk berbagi ilmu dengan teman yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Ini merupakan peluang bagi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu gurunya. Peluang ini harus dimanfaatkan betul oleh kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus mendukung pelaksanaan diseminasi hasil. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membuat kebijakan mewajibkan guru yang sudah ikut pelatihan agar mendiseminasikan hasil pelatihannya minimal satu minggu setelah pulang mengikuti pelatihan, sebaliknya guru yang

mengajar mata pelajaran yang sama agar diwajibkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi hasil pelatihan. Agar guru termotivasi maka kepala sekolah sebaiknya memfasilitasinya dengan menyediakan ruang dan waktu untuk diseminasi hasil secara terjadwal, dan memberikan dukungan nyata dengan pemberian *snack* atau makan siang khusus untuk kegiatan diseminasi. Dalam tabel berikut disajikan bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap diseminasi hasil kegiatan penyusunan soal USBN.

Tabel 4.43 Dukungan Kepala Sekolah terhadap Diseminasi Hasil Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Kab/Kota dan Kesenyaian Lokasi			
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat				
1. PKn	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung
2. IPS	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat				
1. Mat	mendukung	mendukung	--	--
2. IPA	mendukung	--	--	--
3. B. Indo	mendukung	mendukung	--	mendukung
4. B. Ing	mendukung	mendukung	--	mendukung
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat				
1. PA(I/K)	mendukung	--	mendukung	mendukung
2. PJOK	--	--	mendukung	mendukung
3. SBK	mendukung	mendukung	--	mendukung
4. Prakarya	mendukung	--	--	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari



Berdasarkan Tabel 4.43 terlihat bahwa semua responden ketua MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat yakni MGMP PKn dan IPS menyatakan bahwa kepala sekolah mendukung pelaksanaan diseminasi hasil program. Terlihat bahwa 10 dari 20 orang (50%) ketua MGMP Mapel UN, dan 12 dari 19 orang (63,2%) MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* Pusat juga menyampaikan bahwa kepala sekolah mendukung pelaksanaan diseminasi hasil. Dukungan kepala sekolah banyak bentuknya, salah satunya diberikannya surat tugas diseminasi, seperti pengakuan responden MGMP PKn Kota Kendari, “kepala sekolah mendukung yang ditandai dengan adanya surat tugas guru PKn yang dipercayakan”. Terlihat bahwa 10 dari 20 orang (50%) ketua MGMP Mapel UN, kemudian tujuh dari 19 orang (36,8%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat yang meragukan dukungan kepala sekolah terhadap diseminasi hasil kegiatan penyusunan soal USBN. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena seharusnya kepala sekolah mendukung kegiatan diseminasi hasil.

## **2. Antusiasme guru dalam mengikuti kegiatan diseminasi**

Diundang untuk mengikuti pelatihan di ibukota provinsi atau di daerah lain merupakan salah satu kebanggaan guru, karena selain mendapat ilmu juga menambah wawasan dan mengenal daerah lain lebih dekat atas biaya pemerintah. Untuk itu kepala sekolah harus bijaksana dalam menugaskan gurunya untuk

mengikuti suatu pelatihan di luar sekolah misalnya di ibukota provinsi. Jangan sampai hanya guru yang sama yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tetapi bergantian. Dengan begitu guru akan bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti diseminasi hasil kegiatan.

Tabel 4.44 Antusiasme Rekan Sejawat Mengikuti Diseminasi Hasil Kegiatan Penyusunan Soal USBN

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	Sebagian besar	Sebagian besar	Seluruhnya	Sebagian besar	Sebagian besar
2. IPS	Seluruhnya	Sebagian besar	--	Sebagian besar	Sebagian besar
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	Sebagian besar	Sebagian besar	--	--	--
2. IPA	Sebagian besar	--	--	--	--
3. B. Indo	Seluruhnya	Sebagian besar	--	Sebagian besar	Sebagian besar
4. B. Ing	Seluruhnya	Sebagian besar	--	--	Sebagian besar
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	--	--	Seluruhnya	Sebagian besar	Sebagian besar
2. PJOK	--	--	Sebagian besar	Sebagian besar	Sebagian besar

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
3. SBK	Sebagian besar	Sebagian besar	--	Sebagian besar	Sebagian besar
4. Prakarya	Sebagian besar	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari

Dari sisi teman sejawat, terlihat dari Tabel 4.44 bahwa teman sejawat untuk MGMP Mapel penerima *block grant* dari Pusat merasa antusias mengikuti diseminasi hasil program. Ini diungkapkan oleh hampir semua responden, kecuali responden MGMP IPS Kabupaten Flores Timur yang menyangsikan antusiasme rekan sejawat mengikuti diseminasi hasil program.

Terlihat 10 dari 20 orang (50%) ketua MGMP Mapel UN, kemudian delapan dari 19 orang (42,1%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat menyampaikan bahwa sebagian besar bahkan ada sampai menyatakan seluruh rekan sejawat guru sangat antusias dalam mengikuti kegiatan diseminasi hasil. Dari sini terlihat bahwa belum semua rekan sejawat antusias mengikuti kegiatan diseminasi hasil program. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran guru untuk meningkatkan kompetensinya. Terlihat 10 dari 20 orang (50%) ketua MGMP Mapel UN, kemudian 11 dari 19 orang (57,9%) ketua MGMP Mapel non UN non penerima *block grant* dari Pusat yang menyangsikan antusiasme rekan sejawat mengikuti

kegiatan diseminasi hasil program. Guru yang tidak antusias mengikuti kegiatan diseminasi adalah guru-guru yang pastinya berorientasi pada mengajar saja, tidak mengajar dan mendidik, karena jika si guru berorientasi pada mendidik juga maka dia pasti akan rela berkorban demi untuk mengembangkan kompetensinya misalnya dengan mengikuti kegiatan diseminasi hasil.

### **3. Saran untuk maksimalisasi diseminasi hasil**

Diseminasi hasil merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan dampak positif dari pelatihan. Untuk itu perlu ada saran dari pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat meningkatkan dampak positif tersebut.

Tabel 4.45 Saran untuk Memaksimalkan Diseminasi Hasil Program

MGMP	Kab/Kota dan Kesenuaian Lokasi			
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat				
1. PKn	Perlu adanya pendampingan secara kontinyu dari dinas pendidikan	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan MGMP tidak menggunakan hari efektif belajar</li> <li>• Peran pengawas perlu ditingkatkan</li> <li>• Dukungan dari para kepala sekolah sangat dibutuhkan</li> </ul>	--
2. IPS	Berikan penguatan/landasan hukum pemberlakuan iuran anggota	Perencanaan lebih terencana dengan sempurna sehingga pelaksanaannya sesuai dengan program	Semua rayon MGMP agar terwakili dalam menyusun soal USBN	Menyadarkan guru bahwa MGMP sebagai suatu kewajiban terutama sebagai wadah
				Seharusnya dalam sebulan diadakan 2-3 kali pertemuan MGMP

MGMP	Kab/Kota dan Kesiuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
				peningkatan profesionalisme guru	
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	--	--	--	--	--
2. IPA	Di sekolah kumpulkan semua Guru untuk mendengarkan	--	--	--	--
3. B. Indo	Membuat RTL dan membuat laporan hasil desiminasi	--	--	Perlu peningkatan potensi guru	--
4. B. Ing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memaksimalkan hasil diseminasi, harus ada tindak lanjut</li> </ul>	Pemerintah selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan MGMP berupa pemberian pelatihan/workshop	--	Tidak pernah mengikuti pelatihan penyusunan soal HOTS	Sering adakan pelatihan

MGMP	Kab/Kota dan Kesenyaan Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	Mengadakan pelatihan soal	--	--	Ada kerja sama dengan pihak sekolah agar melibatkan gurunya untuk ikut kegiatan MGMP	Perlu tambahan pelatihan di MGMP agar MGMP bisa lebih mantap
2. PJOK			Sebaiknya para ketua MGMP diberi pelatihan khusus Mapel Olahraga	Pelatihan di MGMP sebaiknya dilaksanakan 3 bulan sebelum penyusunan soal USBN	Sosialisasi lebih cepat dan perencanaan yang baik
3. SBK	--	--	--	Mohon peningkatan kualitas guru melalui pelatihan	Agar administrasi pengajuan proposal MGMP disederhanakan

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi			
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari
4. Prakarya	Diperlukan peningkatan kegiatan pelatihan yang kontinyu dan berkelanjutan	--	--	*) Belum terbentuk
				--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari



Dari saran-saran di atas dirangkum sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pendampingan secara kontinyu dari dinas pendidikan
- b. Dukungan dari para kepala sekolah dan pengawas sangat dibutuhkan
- c. Untuk memaksimalkan hasil diseminasi, harus ada tindak lanjut

## **F. Cara Mentransfer Hasil Program kepada Peserta Didik**

### **1. Kecukupan waktu guru untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik**

Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN aras tinggi adalah agar guru mampu menyusun soal aras tinggi dan melatihkannya atau mengajarkannya kepada siswa agar siswa siap menghadapi USBN dan UNBK yang sebagian soalnya merupakan soal-soal aras tinggi. Yang menjadi pertanyaan apakah setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN aras tinggi, guru memiliki waktu yang memadai untuk melatih soal aras tinggi kepada siswa.

Tabel 4.46 Ketersediaan Waktu untuk Melatihkan Siswa Soal  
Aras Tinggi

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	memadai	tidak memadai	memadai	memadai	memadai
2. IPS	tidak memadai	memadai	--	memadai	memadai
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	tidak memadai	tidak memadai	--	--	--
2. IPA	tidak memadai	--	--	--	--
3. B. Indo	memadai	memadai	--	memadai	tidak memadai
4. B. Ing	tidak memadai	memadai	--	--	memadai
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	--	--	memadai	tidak memadai	memadai
2. PJOK	--	--	memadai	memadai	memadai
3. SBK	--	memadai,	--	memadai	memadai
4. Prakarya	memadai	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk di Kota Kendari

Dari Tabel 4.46 Terlihat bahwa tujuh dari 10 orang (70%) MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat menyampaikan mereka memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer hasil pelatihan kepada peserta didik. Ada dua dari 10 orang (20 persen) ketua MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat yang

menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didik, yaitu MGMP PKn Kabupaten Lima Puluh Kota dan MGMP IPS Kota Bekasi; dan ada satu dari 10 orang (10 persen) ketua MGMP yang tidak yakin bahwa waktu yang tersedia memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik. Informasi ini menunjukkan bahwa waktu pelatihan penyusunan soal bagi sebagian MGMP terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan USBN sehingga mereka tidak memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik.

Untuk MGMP Mapel UN: hanya 5 dari 20 orang (25%) ketua MGMP Mapel UN menyampaikan bahwa mereka memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik. Sebanyak 10 dari 20 orang (50%) ketua MGMP Mapel UN yang tidak yakin memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik, kemudian ada 5 dari 20 orang (25%) ketua MGMP Mapel UN menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik. Informasi ini paling tidak dapat menjelaskan bahwa mengapa nilai UNBK SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pengaturan jadwal penyusunan soal USBN yang lebih awal misal sejak awal semester ganjil agar guru-guru memiliki waktu yang memadai untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didik, karena bagaimanapun tujuan akhir dari

pelatihan penyusunan soal USBN adalah bukan untuk membuat guru tambah pintar saja tapi bahwa guru yang dilatih harus dapat mentransfer ilmunya kepada peserta didik agar peserta didik siap menghadapi UNBK. Ini baru kondisi di sekolah yang ada gurunya mengikuti kegiatan menyusun soal USBN, bagaimana dengan nasib sekolah-sekolah yang tidak ada gurunya yang mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN. Pasti sekolah-sekolah ini lebih tidak siap mempersiapkan siswanya menghadapi UNBK. Semua ini yang mungkin bisa menjelaskan mengapa nilai UNBK SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Untuk MGMP Mapel non UN lainnya: sebanyak sembilan dari 19 orang (47,4%) ketua MGMP menyampaikan memiliki waktu memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta, dan hanya satu orang (5,3 persen) yang menyampaikan waktunya tidak memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik. Kemudian sebanyak sembilan dari 19 orang (47,4%) ketua MGMP yang tidak yakin bahwa ketersediaan waktu memadai untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik. Namun jika dibandingkan dengan MGMP Mapel UN, kondisi di MGMP Mapel non UN lainnya sedikit lebih baik.

## **2. Pemahaman peserta didik terhadap materi hasil program yang ditransfer guru**

Setelah guru mengikuti pelatihan penyusunan soal aras tinggi, guru harus dapat mentransfer ilmunya kepada siswa agar siswa

siap menghadapi USBN dan UNBK yang sebagian soalnya soal aras tinggi. Guru harus yakin bahwa apa yang diperoleh dari pelatihan dapat ditransfer kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan dirinya pada saat mengerjakan soal-soal aras tinggi. Yang jadi pertanyaan apakah memang guru yakin bahwa materi yang disampaikan kepada siswa dapat dipahami dengan baik.

Tabel 4.47 Pemahaman Siswa terhadap Materi yang Ditransfer Guru

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PKn	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar
2. IPS	sebagian kecil	sebagian kecil	--	sebagian kecil	sebagian kecil
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	sebagian besar	sebagian kecil	--	--	--
2. IPA	--	--	--	--	--
3. B. Indo	seluruhnya	sebagian besar	--	sebagian besar	sebagian besar
4. B. Ing	Sebagian kecil	sebagian kecil	--	--	sebagian besar
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	--	--	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
2. PJOK	--	--	sebagian besar	sebagian besar	sebagian besar
3. SBK	--	sebagian besar	-	sebagian besar	sebagian kecil
4. Prakarya	sebagian besar	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk

Dari Tabel 4.47 terlihat bahwa: untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat: untuk MGMP PKn, seluruh ketua MGMP menyampaikan bahwa sebagian besar siswa memahami materi hasil program yang ditransfer guru. Sedangkan untuk MGMP IPS empat dari lima MGMP menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang memahami materi hasil program yang ditransfer guru, ada satu dari lima MGMP IPS yang tidak yakin bahwa materi hasil program yang disampaikan guru dipahami oleh siswa. Jadi dari 10 MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, sebanyak 50 persen menyampaikan bahwa sebagian besar siswa memahami materi hasil program yang ditransfer guru, 40 persen menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang memahami materi yang ditransfer guru, dan 10 persen meragukan siswa memahami materi yang ditransfer guru. Menurut responden ketua MGMP IPS, hal ini dikarenakan: (1) peserta didik masih terbiasa dengan sistem yang sudah berjalan selama ini, (2) kemampuan peserta didik yang berbeda-beda.

Analisis ini menunjukkan bahwa program *block grant* yang diberikan tidak cukup efektif, karena baru 50 persen tercapai tujuannya yaitu sebagian siswa memahami materi yang ditransfer guru.

Untuk MGMP Mapel UN: Hanya lima dari 20 orang (25%) ketua MGMP menyampaikan bahwa materi yang ditransfer guru dipahami oleh siswa. Kemudian sebanyak 11 dari 20 orang (55%) ketua MGMP ternyata tidak yakin bahwa materi yang disampaikan/ditransfer guru dipahami oleh peserta didik, kemudian empat dari 20 orang (20%) ketua MGMP menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang memahami materi yang ditranfer oleh guru. Jadi secara keseluruhan banyak siswa belum memahami materi yang ditransfer guru. Data ini yang dapat menjelaskan mengapa nilai UNBK SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Untuk MGMP Mapel non UN lainnya: sebanyak 9 dari 19 orang (47,4%) menyampaikan bahwa materi yang ditransfer guru dipahami oleh siswa. Selanjutnya juga ada 9 dari 19 orang (47,4%) ketua MGMP meragukan bahwa materi yang ditransfer guru dipahami oleh siswa dan satu dari 19 orang (5,2%) ketua MGMP menyampaikan bahwa hanya sebagian kecil siswa memahami materi yang ditransfer guru. Secara keseluruhan kondisi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru di MGMP Mapel non UN lainnya sedikit lebih baik dari pada situasi di MGMP Mapel UN.

### **3. Saran untuk memaksimalkan pemahaman siswa terhadap materi yang ditransfer**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya tujuan akhir dari pelatihan penyusunan soal USBN adalah agar siswa mampu memahami dan mengerjakan soal-soal aras tinggi dalam USBN dan UNBK. Untuk diperlukan saran dari pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang ditransfer guru.



Tabel 4.48 Saran Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Materi yang Ditransfer Guru

MGMP	Kab/Kota dan Keresuaian Lokasi				Kendari	Kapas Hulu
	Bekasi	50 Kota	Flotim			
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat						
1. PKn	Memberikan pelatihan secara intensif kepada guru	Membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan latihan soal HOTS	Guru lebih banyak bertindak sebagai motivator, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pikirannya dalam diskusi kelompok	Dalam pembelajaran sebaiknya siswa diperkenalkan dengan materi tingkat tinggi		Perlu kegiatan les dan <i>try out</i>
2. IPS	Dilakukan pemilihan untuk materi yang perlu di kembangkan dengan berpikir aras tinggi	Dengan banyak pelatihan mengerjakan soal yang berpikir aras tinggi	--	Disarankan kepada guru agar membiasakan pemberian soal HOTS pada setiap tes yang diujikan kepada siswa		Perlu tambahan jam belajar

MGMP	Kab/Kota dan Kesenyaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	--	--	--	--	Perlu latihan soal-soal yang banyak dan efektif; Pemahaman materi yang lebih dalam
2. IPA	Ada waktu khusus buat siswa diberikan hasil pelatihan	--	--	--	--
3. B. Indo	Membiasakan peserta didik untuk selalu melatih diri dapat berpikir aras tinggi dalam pembelajaran sehari – hari	Didalam MGMP seharusnya dilatihkan pembuatan soal yang membutuhkan berpikir aras tinggi	--	Sebaiknya ada narasumber dari pusat supaya termotivasi	Perlu diadakan les

MGMP	Kab/Kota dan Kesiuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
4. B. Ing	Dilakukan pemilihan untuk materi yang perlu di kembangkan dengan berpikir aras tinggi	Latihkan soal – soal seperti itu sejak mulai pembelajaran di kelas VII, tidak hanya sewaktu anak sudah berada di kelas IX			Tingkatkan membaca dan memahami
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	--	--	--	--	Perlunya pembiasaan terhadap pola pikir aras tinggi
2. PJOK	--	--	--	Harus banyak latihan mengerjakan soal-soal ujian	--

MGMP	Kab/Kota dan Kesenuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapas Hulu
3. SBK	--	Pembiasaan peserta didik dengan soal soal aras tinggi	-	Sering berlatih dan berfikir kritis	Perlu ada waktu khusus untuk pemahaman jenis soal aras tinggi
4. Prakarya	Penggunaan kalimat dan tata bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami peserta didik dalam penyampaian materi	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk

Dari Tabel 4.48 dirangkum saran responden untuk memaksimalkan penguasaan peserta didik terhadap materi, antara lain: (i) memberikan pelatihan secara intensif kepada guru, (ii) membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan latihan soal HOTS, (iii) guru lebih banyak bertindak sebagai motivator, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pikirannya dalam diskusi kelompok, (iv) dalam pembelajaran sebaiknya siswa diperkenalkan dengan materi tingkat tinggi, (v) perlu kegiatan les dan *try out*, (vi) dilakukan pemilahan untuk materi yang perlu di kembangkan dengan berpikir aras tinggi, (vii) dengan banyak pelatihan mengerjakan soal yang berpikir aras tinggi, (viii) disarankan kepada guru agar membiasakan pemberian soal HOTS pada setiap tes yang diujikan kepada siswa, (ix) perlu tambahan jam belajar.

#### **4. Kendala yang dihadapi dalam transfer hasil program kepada peserta didik**

Dalam mentransfer hasil program kepada peserta didik guru terkadang menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut perlu diatasi agar hasil yang dicapai bisa maksimal.

Tabel 4.49 Kendala yang Dihadapi dalam Melakukan Transfer Materi kepada Peserta Didik

MGMP	Kab/Kota dan Kesenyaian Lokasi					Kendari	Kapas Hulu
	Bekasi	50 Kota	Flotim				
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat							
1. PKn	Pola pikir peserta didik yang kurang kritis	Sulitnya waktu luang untuk menstranfer hasil pelatihan kepada peserta didik karena guru lebih mengutamakan untuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai tuntutan kurikulum	Tidak semua siswa aktif	Masih ada sebagian kecil siswa belum mampu menyelesaikan soal-soal tingkat tinggi	--		
2. IPS	--	Wawasan peserta didik yang kurang luas dalam memahami soal berpikir aras tinggi	--	Pemahaman guru tentang penyusunan soal HOTS	Untuk Mapel Non-UN kurang perhatian		
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat							
1. Mat		--	--	--	Waktu kurang		

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
2. IPA	Tidak semua peserta didik mengajar di semua kelas	--	--	--	--
3. B. Indo	Tidak semua guru memiliki kemampuan/ kualifikasi kompetensi yang sesuai	Belum merata pengetahuan dan keterampilan guru dalam mentransfer hasil pelatihan kepada peserta didik	--	--	--
4. B. Ing	--	Kurangnya waktu, kemampuan siswa dan buku sumber	--	--	Kurangnya minat siswa
C. Mapel non UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. PA(I/K)	--	--	--	--	Mudahnya siswa lupa model soal

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
2. PJOK	--	--	--	Peserta didik kurang memahami soal	Siswa masih beradaptasi dengan cara dan pola yang baru
3. SBK	--	--	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurang konsentrasi</li><li>• Keterbatasan kemampuan guru</li><li>• Bakat siswa yang berbeda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk memaksimalkan anggaran (Kendala saat ini tidak ada anggaran)</li><li>• Untuk memaksimalkan perlu waktu khusus</li></ul>	Mudahnya siswa lupa model soal



MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
4. Prakerja	Teknis penyampaian materi yang kurang sistematis, efektif dan efisien	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakerja belum terbentuk

Dari Tabel 4.49 terlihat berbagai kendala yang dihadapi guru ketika mentransfer hasil program kepada peserta didik. Berikut rangkuman kendala saat guru mentransfer hasil pelatihan kepada peserta didik, antara lain: (i) pola pikir peserta didik yang kurang kritis, (ii) sulitnya waktu luang untuk menstransfer hasil pelatihan kepada peserta didik karena guru lebih mengutamakan untuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai tuntutan kurikulum, (iii) tidak semua siswa aktif, (iv) masih ada sebagian kecil siswa belum mampu menyelesaikan soal-soal tingkat tinggi, (v) wawasan peserta didik yang kurang luas dalam memahami soal berpikir aras tinggi.

## **5. Saran optimalisasi peran MGMP**

Kajian ini hendak mencari konsep bagaimana mengoptimalisasi peran MGMP dalam meningkatkan kualitas mengajar guru.

Tabel 4.50 Saran Responden untuk Optimalisasi Peran MGMP

MGMP		Kab/Kota dan Kesenyaan Lokasi				Kendari	Kapas Hulu
		Bekasi	50 Kota	Flotim			
A. Mapel penerima <i>block grant</i> Pusat							
1. PKn	Hendaknya seluruh kegiatan MGMP di dukung oleh <i>stakeholder</i> yang ada	--	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peran pengawas sekolah perlu dioptimalkan</li><li>• Mutu guru perlu ditingkatkan melalui wadah MGMP</li></ul>	Anggota MGMP sungguh-sungguh mengikuti kegiatan MGMP dan hasil dapat ditransfer kepada peserta didik dalam pembelajaran	--		
2. IPS	--	<ul style="list-style-type: none"><li>• MGMP melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi guru dengan materi tentang pembuatan</li></ul>	Pelatihan soal berpikir aras tinggi harus diikuti oleh minimal satu guru dari setiap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perintah daerah melalui Disdik agar mewajibkan setiap guru mengikuti</li></ul>	sekolah ikut membiayai agar MGMP bisa tetap berjalan aktivitasnya		

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
		soal berpikir aras tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>MGMP melaksanakan lomba-lomba bidang studi yang diikuti oleh siswa dengan soal berpikir aras tinggi</li> </ul>	kelompok MGMP	pertemuan MGMP <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala sekolah agar mendukung dalam hal pendanaan baik melalui dana BOS ataupun melalui pemotongan gaji untuk iuran MGMP</li> </ul>	
B. Mapel UN non penerima <i>block grant</i> Pusat					
1. Mat	--	--	--	--	--
2. IPA	Mengadakan pelatihan penyusunan di MGMP terutama guru pengajar kelas 9.	--	--	--	--

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapas Hulu
3. B. Indo	<ul style="list-style-type: none"> <li>MGMP diharapkan selalu dapat bersinergi dengan kepala sekolah (MKKS) dan dinas pendidikan untuk berjalan bersama meraih tujuan (saling mendukung)</li> </ul>	<p>MGMP harus membuat program – program yang mengarah pada kemampuan berpikir aras tinggi</p>	--	MGMP harus terlaksana secara terprogram baik ada bantuan maupun tidak ada bantuan dana	--
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas pendidikan sebagai pihak berwenang dapat memberikan regulasi yang mendukung program-program MGMP</li> <li>MGMP akan melaksanakan berbagai pelatihan bagi guru untuk dapat meningkatkan hasil UNBK, seperti: bedah SKL, pelatihan penyusunan RPP HOTS, pelatihan pembelajaran HOTS, pelatihan</li> </ul>				

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi			
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari
	penyusunan soal HOTS, pelatihan pembelajaran menggunakan IT			
4. B. Ing	--	MGMP harus memfasilitasi guru dengan mengadakan pelatihan/workshop penyusunan soal HOTS	--	Minimal ada satu anggota MGMP pernah mengikuti pelatihan penyusunan soal aras tinggi
				--
C. Mapel non	UN non penerima <i>block grant</i> Pusat			
1. PA(I/K)	Mengadakan pelatihan/workshop tentang soal HOTS	--	--	Perlu ada anggota MGMP yang ikut pelatihan khusus
				--

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapas Hulu
				membuat soal HOTS	
2. PJOK	--	--	--	Memperbanyak latihan dan ujicoba	Harus ada pertemuan rutin dalam MGMP
3. SBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertajam materi tentang HOTS, MOTS, LOTS di lingkungan guru</li> <li>• Guru menyusun teknik dan model pembelajaran yang me-mungkinkan guru untuk me-nerangkan metode paling sederhana untuk menyelesaikan soal-soal HOTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penyusunan soal untuk guru</li> <li>• Melakukan pelatihan soal aras tinggi pada siswa</li> </ul>	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengefektifkan pertemuan MGMP</li> <li>• Meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan</li> </ul>	Administrasi lebih sederhana

MGMP	Kab/Kota dan Kesesuaian Lokasi				
	Bekasi	50 Kota	Flotim	Kendari	Kapuas Hulu
4. Prakarya	Perlu adanya peningkatan sarana prasarana, anggaran yang memadai dan tentunya <i>support</i> yang tinggi dari pihak dinas pendidikan dan kepala sekolah	--	--	--*)	--

\*) MGMP Prakarya belum terbentuk



Tabel 4.50 menyajikan saran-saran responden bagaimana cara mengoptimalisasi peran MGMP dalam meningkatkan kualitas mengajar guru. Berikut ini rangkuman saran untuk optimalisasi peran MGMP:

- a. Hendaknya seluruh kegiatan MGMP didukung oleh *stakeholders* yang ada
- b. Peran pengawas sekolah perlu dioptimalkan
- c. Pendanaan rutin baik dari pusat maupun daerah
- d. Pemerintah daerah melalui Disdik agar mewajibkan setiap guru mengikuti pertemuan MGMP
- e. Kepala sekolah agar mendukung dalam hal pendanaan baik melalui dana BOS ataupun melalui pemotongan gaji untuk iuran MGMP
- f. Sekolah pun ikut membiayai kegiatan MGMP agar MGMP bisa berjalan secara kontinyu
- g. MGMP diharapkan selalu dapat bersinergi dengan kepala sekolah (MKKS) dan dinas pendidikan untuk berjalan bersama meraih tujuan
- h. Dinas pendidikan sebagai pihak berwenang dapat memberikan regulasi yang mendukung program MGMP
- i. MGMP harus terlaksana secara terprogram baik ada bantuan maupun tidak ada bantuan
- j. Mengefektifkan pertemuan MGMP
- k. Agar peran MGMP lebih optimal perlu adanya peningkatan sarana prasarana, anggaran yang memadai dan tentunya

*support* yang tinggi dari pihak dinas pendidikan dan kepala sekolah.

# 5

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Simpulan

#### 1. Profil MGMP

- a. Lama berdiri atau keberadaan MGMP: Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebagian besar MGMP yang ditunjuk untuk menyusun soal USBN keberadaannya sudah lebih dari atau sama dengan 5 tahun. Ketika dirinci lebih jauh: MGMP yang ditunjuk menerima *block grant* dari Pusat seluruhnya keberadaannya sudah lebih lama dari atau sama dengan lima tahun, untuk MGMP Mapel UN masih ada sebagian kecil yang keberadaannya kurang dari lima tahun, bahkan ada satu MGMP Mapel UN yang baru berdiri 1 tahun, sedangkan untuk MGMP Mapel non UN lainnya ada dua MGMP yang baru berdiri setahun ditunjuk untuk menyusun soal USBN menggunakan bantuan dari Pemerintah Daerah. Jadi, khusus untuk penunjukan MGMP Mapel UN dan Mapel non UN lainnya untuk menyusun soal USBN menggunakan dukungan dana dari Daerah, dinas pendidikan tidak menggunakan kriteria lama berdirinya MGMP.

- b. Jumlah sekolah yang terlibat dalam MGMP: Jumlah sekolah yang tergabung dalam MGMP penyusun soal USBN berkisar dari paling sedikit 3 sekolah saja sampai dengan 249 sekolah. Jumlah sekolah yang sangat besar memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu ketika dilakukan diseminasi hasil program akan langsung menjangkau banyak anggota sekaligus, sedangkan kelemahannya pembelajaran program menjadi kurang efektif apabila peserta yang ikut program mencakup seluruh atau sebagian besar anggota, karena instruktur tidak akan mudah mengecek apakah peserta program benar-benar memahami apa yang disampaikan. Jumlah sekolah yang terlibat dalam sebuah MGMP jika sangat besar, sebagai contoh di Kota Bekasi jumlah anggota MGMP PAI berasal dari 249 sekolah, ini menunjukkan jika dari setiap sekolah ada 1 orang guru saja yang menjadi anggota MGMP, maka jumlah anggota MGMP tersebut mencapai 249 orang. Tentunya untuk menyampaikan suatu materi pelatihan kepada kelompok yang besar ini menjadi kurang efektif karena jumlah pesertanya terlalu banyak, sehingga diperlukan suatu ruangan atau aula yang besar. Padahal untuk pembelajaran yang efektif jumlah pesertanya minimal 20 dan maksimal 32 orang sebagaimana yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimum.
- c. Keanggotaan MGMP yang terdaftar dan keaktifannya: jumlah anggota MGMP penyusun soal USBN berkisar dari paling

sedikit 3 orang hingga paling banyak 518 orang, dengan *range* persentase keaktifan anggota berkisar dari 20 hingga 100 persen dengan rerata keaktifan anggotanya adalah 70 persen. Jadi sebagian besar anggota MGMP aktif, maka analog dengan penjelasan tentang jumlah sekolah yang terlibat MGMP yaitu jika peserta program jumlahnya besar, maka pembelajaran program jadi kurang efektif. Ada salah satu praktek baik di Kota Bekasi yang dilakukan MGMP PJOK untuk mengaktifkan anggota yaitu mengadakan kegiatan MGMP dalam bentuk arisan. Dengan cara seperti ini mereka urunan untuk mengadakan kegiatan MGMP sambil berpiknik ke tempat-tempat rekreasi seperti Puncak Bogor dan sebagainya.

- d. Sumber dana: sumber dana MGMP yang terdata saat ini yang bisa dijadikan sumber dana rutin untuk membiayai kegiatan MGMP adalah iuran anggota, dana BOS dan iuran komite sekolah. Belum semua MGMP menarik iuran yang bisa dijadikan sumber dana MGMP tersebut. Iuran anggota MGMP dengan besarannya bervariasi tergantung kesepakatan. Iuran anggota berkisar dari Rp100.000 - Rp 600.000/tahun dengan reratanya Rp 224.000 per tahun atau setara dengan sekitar 19.000/bulan. Praktek baik tentang iuran anggota ini adalah kasus di Kabupaten Limapuluh Kota. Hampir semua MGMP di kabupaten ini menarik iuran anggota. Sumber dana lainnya yang bisa dirutinkan adalah

dana BOS. Praktek baiknya di Kabupaten Flores Timur; berkat negosiasi antar ketua MGMP dengan kepala sekolah, kepala sekolah bersedia mendanai kegiatan MGMP menggunakan dana BOS dengan formula adalah Rp 5.000,-/siswa per tahun. Selain itu ada sumber dana lain yang bisa dirutinkan yaitu iuran komite sekolah. Praktek baiknya juga di Flores Timur; berkat negoasiasi ketua MGMP dengan kepala sekolah maka kepala sekolah menyampaikan program sekolah tentang peningkatan kompetensi guru melalui forum MGMP kepada orangtua/wali murid dan komite menyetujui adanya iuran komite sekolah untuk peningkatan kompetensi guru sebesar Rp 500.000,-/tahun. Selanjutnya masih ada satu praktek baik di Flores Timur yaitu adanya sumber dana khusus dari kantor Kemenag kabupaten. MGMP PA-Katholik Flores Timur selalu mengusulkan pendanaan kegiatan MGMP ke kantor Kemenag dan selalu berhasil mendapat bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan MGMP dengan dana dari Kemenag sebesar 5 juta rupiah per kegiatan; dalam setahun bisa dua kali kegiatan.

- e. Pola pembiayaan kegiatan MGMP: pola pendanaan MGMP ternyata paling besar untuk konsumsi pertemuan diikuti di tempat kedua untuk transport peserta kegiatan dan di tempat ketiga adalah honor/insentif pengurus MGMP dengan besar porsinya berturut-turut 34 persen, 29 persen dan 10 persen.

- f. Struktur organisasi MGMP: umumnya struktur organisasi MGMP sampel sudah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal ada ketua, sekretaris dan bendahara.
- g. Kepemilikan perencanaan kegiatan tahun sebelumnya: MGMP Penerima *block grant* semuanya memiliki rencana kegiatan, MGMP Mapel UN 80 persen memilikinya, sedangkan MGMP Mapel non UN lainnya baru 50 persen memilikinya.
- h. Penyusun perencanaan kegiatan tahunan MGMP: umumnya penyusun rencana kegiatan MGMP adalah pengurus MGMP, meski masih ada satu dua MGMP yang mempercayakan penyusun rencana kegiatan adalah anggota baik anggota MGMP biasa atau anggota yang diangkat menjadi instruktur.
- i. Ketersediaan instruktur internal: sebanyak 80 persen MGMP penerima dana *block grant* Pusat, 65 persen MGMP Mapel UN dan 78,9 persen MGMP Mapel non UN lainnya memberdayakan instruktur internal untuk meluncurkan pelaksanaan kegiatan MGMP. Jumlah instruktur internal yang dimiliki berkisar antara 1 – 17 orang dengan rerata per MGMP 4 orang dan modusnya adalah 2 orang.
- j. Mekanisme pemilihan instruktur internal: Tidak ada mekanisme yang baku yang digunakan sebagai panduan dalam memilih dan menetapkan seorang anggota menjadi instruktur internal. Ada mekanisme yang sangat demokratis

yang perlu diikuti dalam pemilihan instruktur yaitu “dimusyawarahkan oleh anggota, kemudian calon terpilih diusulkan kepada kepala dinas lalu ditetapkan jadi instruktur”.

- k. Sarana prasarana yang dibutuhkan MGMP dan status kepemilikannya: MGMP masih menggunakan fasilitas sekolah seperti aula, *in-focus*, laptop, printer dan wifi dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk ruang pertemuan di lokasi tertentu disewa antara lain karena sekolah tidak memiliki aula atau karena aulanya tidak muat, namun juga karena jarak sekolah yang berjauhan satu dengan yang lain dan karena letak geografis wilayah seperti kasus kabupaten yang wilayahnya mengelilingi sebuah kota. Karena tuntutan administrasi sebaiknya MGMP perlu memiliki fasilitas sendiri seperti laptop dan printer serta wifi untuk memudahkan membuat berbagai laporan kegiatan MGMP.
- l. Jumlah pertemuan MGMP per tahun: Berpatokan pada standar tentang jumlah pertemuan MGMP maka baru sebagian kecil MGMP yang memenuhi standar 12 kali pertemuan per tahun.
- m. Lama Waktu Pertemuan: Ada pola yang menarik mengenai lama pertemuan per setiap kali pertemuan kegiatan MGMP yaitu 8 jam per pertemuan. Angka 8 jam ini adalah angka yang paling sering muncul (modus) baik di kelompok MGMP Mapel penerima maupun non penerima *block grant*.



- n. Pengawasan kegiatan MGMP: Sementara ini yang melakukan pengawasan kegiatan MGMP adalah kepala sekolah dan pengawas, namun masih ada sebagian kecil MGMP kegiatannya belum atau tak pernah diawasi.
- o. Pembuatan laporan keuangan: Belum semua MGMP membuat laporan keuangan, baik MGMP penerima maupun non penerima *block grant* Pusat.
- p. Transparansi laporan keuangan: Masih banyak laporan keuangan MGMP yang tidak terbuka untuk umum.

## **2. Perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN**

- a. Pembuatan perencanaan penyusunan soal USBN: Belum semua MGMP baik penerima maupun non penerima *block grant* Pusat membuat perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN aras tinggi. Sebanyak 20 persen MGMP penerima *block grant* Pusat, 45 persen MGMP Mapel UN, dan 36,8 persen MGMP non UN lainnya tidak membuat perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN.
- b. Unsur MGMP yang direncanakan akan membuat perencanaan penyusunan soal USBN: umumnya unsur yang direncanakan menyusun soal USBN adalah pengurus MGMP, namun ada sebagian kecil MGMP yang menugaskan anggota atau instruktur internal untuk menyusun rencana tersebut.

- c. Kapan perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN dibuat: Pembuatan rencana kegiatan penyusunan soal USBN 2017/2018 pada MGMP penerima *block grant* Pusat umumnya direncanakan pada awal semester genap, namun ada sebagian merencanakan pembuatannya pada akhir semester genap dan ada juga yang merencanakan pembuatannya pada awal semester ganjil. Pada MGMP Mapel UN dan MGMP Mapel non UN lainnya, waktu perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN tidak ditetapkan secara jelas.
- d. Isi rencana yang dibuat untuk kegiatan penyusunan soal USBN adalah tentang:
- 1) Jumlah anggota yang akan dilibatkan: Untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, Semua MGMP sampel merencanakan jumlah orang yang akan dilibatkan dalam menyusun soal USBN. Perencanaannya berkisar antara atau *range*-nya dari 2-50 orang dengan reratanya 19 orang, untuk MGMP Mapel UN: sebagian besar (75 persen), dan untuk MGMP Mapel non UN lainnya 47,4 persen tidak merencanakan jumlah anggota yang akan dilibatkan dalam menyusun soal USBN.
  - 2) Lama waktu direncanakan untuk menyusun soal USBN: untuk MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, semua MGMP sampel merencanakan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun soal USBN dan rerata direncanakan diperlukan 55 jam untuk menyusun USBN.

Untuk MGMP Mapel UN untuk MGMP Mapel UN: sebagian besar (75 persen), dan untuk MGMP Mapel non UN lainnya 47,4 persen tidak merencanakan jumlah anggota MGMP yang akan dilibatkan dalam menyusun soal USBN.

- 3) Jumlah instruktur eksternal yang akan dilibatkan dalam penyusunan soal USBN: Sebagian besar (80 persen) MGMP penerima *block grant* Pusat, sebagian kecil (15 persen) MGMP Mapel UN, dan juga hanya sebagian kecil (36,8) persen Mapel non UN lainnya merencanakan akan melibatkan instruktur eksternal dalam menyusun soal USBN.
- 4) Jumlah instruktur internal yang akan dilibatkan dalam penyusunan soal USBN: sebagian besar (70 persen) MGMP penerima *block grant* Pusat, sebagian kecil (15 persen) MGMP Mapel UN, dan juga sebagian kecil (36,8 persen) Mapel non UN lainnya merencanakan akan melibatkan instruktur internal dalam menyusun soal USBN.
- e. Siapa yang direncanakan sebagai penyiap materi kegiatan penyusunan soal USBN: Unsur MGMP yang direncanakan akan menjadi penyiap materi adalah instruktur internal/eksternal, namun ada sebagian kecil merencanakan ketua atau anggota MGMP sebagai penyiap materi untuk penyusunan soal USBN.

- f. Perencanaan lokasi pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN: Umumnya MGMP merencanakan lokasi pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN akan dilaksanakan di sekolah.
- g. Perencanaan metode/cara penyusunan soal USBN: metode/cara yang direncanakan akan diterapkan dalam penyusunan soal USBN adalah diskusi dan kerja kelompok, ada juga sebagian kecil yang merencanakan dengan kerja individu.

### **3. Realisasi rencana kegiatan penyusunan soal USBN**

- a. Pembuat rencana kegiatan penyusunan soal USBN: pembuat perencanaan kegiatan penulisan soal USBN tidak selalu dilakukan oleh ketua MGMP, karena ada unsur lain yang juga ternyata sebagai pembuat rencana penulisan soal USBN yaitu instruktur internal, anggota MGMP, jadi sesuai dengan rencana awal.
- b. Realisasi perencanaan kegiatan
  - 1) Jumlah peserta penyusun soal USBN: Pada umumnya jumlah anggota MGMP dilibatkan dalam penyusunan soal USBN sesuai dengan perencanaan awal.
  - 2) Lama waktu penyusunan soal USBN: untuk lama waktu penyusunan soal USBN ternyata faktanya waktunya yang dibutuhkan lebih lama dari perkiraan/perencanaan awal.

- 3) Jumlah instruktur eksternal/internal yang diberdayakan: umumnya rencana pemberdayaan instruktur baik eksternal maupun internal sesuai dengan rencana awal.
- c. Penyiap materi kegiatan penyusunan soal USBN: umumnya penyiap materi untuk penyusunan soal USBN adalah instruktur baik internal maupun eksternal sesuai dengan rencana awal.
- d. Lokasi pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN: umumnya lokasi pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN sesuai dengan rencana awal.
- e. Metode/cara penyusunan soal USBN: realisasi cara penyusunan materi sudah sesuai dengan rencana awal yaitu diskusi dan kerja kelompok. Namun karena pada sebagian MGMP, khususnya non penerima *block grant* Pusat, waktunya mepet yaitu sudah mendekati pelaksanaan USBN maka diterapkan pula kerja individu kemudian didiskusikan bersama untuk dijadikan soal USBN.
- f. Kesesuaian kompetensi instruktur internal/eksternal: pada umumnya kompetensi instruktur baik internal maupun eksternal yang didayagunakan untuk menyusun soal USBN sesuai dengan kebutuhan.
- g. Ada beberapa kendala dalam merealisasikan perencanaan penyusunan soal USBN:

- 1) Waktu penulisan soal HOTS tidak memadai.
- 2) Kesulitan mengidentifikasi materi untuk level Pendidikan.
- 3) Banyak guru belum mampu menyusun soal HOTS.
- 4) Guru kurang fokus karena harus mengajar sambil menyusun soal USBN.
- 5) Lokasi penyusunan soal USBN kurang nyaman karena materinya banyak.
- 6) Belum pernah mengikuti pelatihan menyusun soal HOTS.
- 7) Terbatasnya kosa kata untuk membuat soal HOTS dan banyak siswa tidak paham.

#### **4. Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN**

- a. Peserta memahami materi yang dikerjakan: Sebagian besar ketua MGMP menyampaikan bahwa seluruh atau sebagian besar peserta penulisan soal USBN memahami materi untuk menyusun soal USBN aras tinggi, namun 10 persen ketua MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, 35 persen ketua MGMP Mapel UN, dan 36,8 persen ketua MGMP Mapel non UN lainnya meragukan peserta penulisan soal USBN memahami materi yang dikerjakan dalam penyusunan soal USBN.
- b. Peningkatan kompetensi setelah mengikuti pelatihan: Sebagian besar ketua MGMP menyampaikan bahwa seluruh

atau sebagian besar peserta penulisan soal USBN mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penulisan soal USBN, namun sebanyak 10 persen ketua MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, 45 persen ketua MGMP Mapel UN, dan 42,1 persen ketua MGMP Mapel non UN lainnya meragukan peserta penulisan soal mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN.

- c. Kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi: Sebagian besar ketua MGMP menyampaikan bahwa seluruh atau sebagian besar peserta memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi setelah mengikuti kegiatan penyusunan soal USBN, namun sebanyak 10 persen ketua MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat, 45 persen ketua MGMP Mapel UN, dan 42,1 persen ketua MGMP Mapel non UN lainnya meragukan kemampuan peserta penulisan soal USBN mampu membuat soal aras tinggi.

## **5. Diseminasi hasil kegiatan penyusunan soal USBN**

- a. Dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan diseminasi hasil kegiatan penyusunan soal USBN: sebagian besar ketua MGMP menyampaikan bahwa kepala sekolah mendukung peserta penyusunan soal USBN melakukan diseminasi hasil kepada rekan sejawat di sekolahnya, namun sebanyak 50 persen ketua MGMP Mapel UN dan 36,8 persen meragukan

dukungan kepala sekolah terhadap diseminasi hasil kepada rekan sejawat di sekolahnya.

- b. Antusiasme guru dalam mengikuti kegiatan diseminasi: sebagian besar ketua MGMP menyampaikan bahwa rekan-rekan sejawat peserta penyusunan soal USBN antusias mengikuti diseminasi hasil kegiatan tersebut, namun sebanyak 10 persen ketua MGMP Mapel penerima *block grant* Pusat 50 persen ketua MGMP Mapel UN dan 42,1persen Mapel non UN lainnya meragukan antusiasme rekan sejawat mengikuti diseminasi hasil kegiatan tersebut.
- c. Saran untuk maksimalisasi diseminasi hasil:
  - 1) Perlu adanya pendampingan secara kontinyu dari dinas pendidikan.
  - 2) Dukungan dari para kepala sekolah dan pengawas sangat dibutuhkan.
  - 3) Untuk memaksimalkan hasil diseminasi, harus ada tindak lanjut.

## **6. Cara mentransfer hasil program kepada peserta didik**

- a. Kecukupan waktu guru untuk mentransfer hasil program kepada peserta didik: Untuk Mapel penerima *block grant* Pusat sudah sebagian besar (70 persen) ketua MGMP menyatakan waktu untuk transfer hasil program kepada peserta didik memadai, untuk MGMP Mapel UN baru



sebagian kecil (25 persen) ketua MGMP yang menyatakan bahwa waktu transfer hasil program ke peserta didik memadai, dan untuk Mapel non UN lainnya juga baru sebagian kecil (36,8 persen) ketua MGMP menyampaikan bahwa waktu untuk transfer hasil program ke peserta didik memadai.

- b. Pemahaman peserta didik terhadap materi hasil program yang ditransfer guru:

untuk Mapel penerima *block grant* Pusat baru separoh (50 persen) ketua MGMP menyatakan waktu sebagai besar peserta didik memahami hasil program yang ditransfer, untuk MGMP Mapel UN baru sebagian kecil (30 persen) ketua MGMP yang menyatakan bahwa peserta didik memahami hasil program yang ditransfer dan untuk Mapel non UN lainnya juga baru sebagian kecil (47,4 persen) ketua MGMP yang menyampaikan bahwa sebagian besar peserta didik memahami hasil program yang ditransfer.

- c. Saran responden untuk memaksimalkan pemahaman siswa terhadap materi yang ditransfer:
- 1) Memberikan pelatihan secara intensif kepada guru,
  - 2) Membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan latihan soal HOTS,

- 3) Guru lebih banyak bertindak sebagai motivator, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pikirannya dalam diskusi kelompok,
  - 4) Dalam pembelajaran sebaiknya siswa diperkenalkan dengan materi tingkat tinggi,
  - 5) Perlu kegiatan les dan *try out*,
  - 6) Dilakukan pemilahan untuk materi yang perlu dikembangkan dengan berpikir aras tinggi,
  - 7) Dengan banyak pelatihan mengerjakan soal yang berpikir aras tinggi,
  - 8) Disarankan kepada guru agar membiasakan pemberian soal HOTS pada setiap tes yang diujikan kepada siswa,
  - 9) Perlu tambahan jam belajar.
- d. Kendala yang dihadapi dalam transfer hasil program kepada peserta didik:

Berikut rangkuman kendala saat guru mentransfer hasil program kepada peserta didik, antara lain:

- 1) Pola pikir peserta didik yang kurang kritis.
- 2) Sulitnya waktu luang untuk menstransfer hasil program kepada peserta didik karena guru lebih mengutamakan untuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai tuntutan kurikulum.

- 3) Tidak semua siswa aktif.
  - 4) Masih ada sebagian kecil siswa belum mampu menyelesaikan soal-soal tingkat tinggi.
  - 5) Wawasan peserta didik yang kurang luas dalam memahami soal yang berpikir aras tinggi.
- e. Saran optimalisasi Peran MGMP. Berikut ini rangkuman saran responden untuk optimalisasi peran MGMP:
- 1) Hendaknya seluruh kegiatan MGMP di dukung oleh *stakeholders* yang ada.
  - 2) Peran pengawas sekolah perlu dioptimalkan.
  - 3) Pendanaan rutin baik dari pusat maupun daerah.
  - 4) Pemerintah daerah melalui Disdik agar mewajibkan setiap guru mengikuti pertemuan MGMP.
  - 5) Kepala sekolah agar mendukung dalam hal pendanaan baik melalui dana BOS ataupun melalui pemotongan gaji untuk iuran MGMP.
  - 6) Sekolah pun ikut membiayai kegiatan MGMP agar MGMP bisa tetap berjalan kontinu.
  - 7) MGMP diharapkan selalu dapat bersinergi dengan kepala sekolah (MKKS) dan dinas pendidikan untuk berjalan bersama meraih tujuan (saling mendukung).

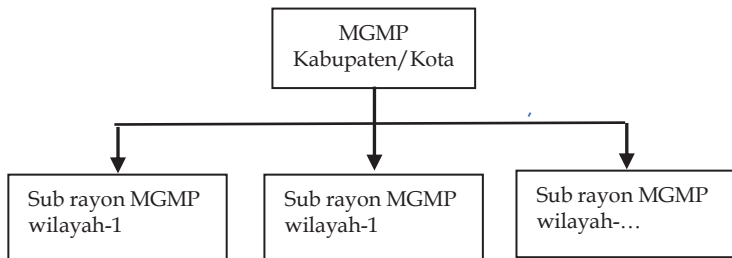
- 8) Dinas pendidikan sebagai pihak berwenang dapat memberikan regulasi yang mendukung program MGMP.
- 9) MGMP harus terlaksana secara terprogram baik ada bantuan maupun tidak ada bantuan.
- 10) Mengefektifkan pertemuan MGMP.
- 11) Agar peran MGMP lebih optimal perlu adanya peningkatan sarana prasarana, anggaran yang memadai dan tentunya support yang tinggi dari pihak dinas pendidikan dan kepala sekolah.

## **B. Rekomendasi Kebijakan**

1. Perlu pemekaran MGMP dalam beberapa sub-rayon MGMP. MGMP tingkat kabupaten tetap saja ada. Pertemuan MGMP tingkat kabupaten/kota diadakan minimal 1 kali per tahun untuk keperluan sosialisasi suatu kebijakan/program. Pertemuan ini dapat mengundang seluruh anggota MGMP dan dapat diadakan di suatu sekolah yang memiliki aula atau dengan menyewa ruang pertemuan.

Pemekaran MGMP menjadi sub rayon perlu dilakukan karena mengadakan pertemuan dengan jumlah peserta yang banyak hasilnya kurang efektif. Bandingkan dengan guru yang mengajar suatu kelas yang besar. Untuk itu perlu dibuatkan sub rayon MGMP dengan lingkungannya sekolah-

sekolah yang ada di suatu kecamatan atau bisa juga lintas kecamatan tergantung kemudahan akses untuk berkumpul. *Best practice* sudah ada yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar dan Kabupaten Flores Timur NTT. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu kabupaten yang sangat luas (faktanya luasnya seluas Provinsi Jawa Barat), sehingga perjalanan menuju ibukota kabupaten membutuhkan waktu bisa sehari dan biaya yang besar, dengan resiko kecelakaan yang tinggi karena harus menyeberang sungai dan melewati hutan, sedangkan Kabupaten Flores terdiri atas beberapa pulau kecil, sehingga untuk mengikuti kegiatan MGMP di ibukota kabupaten, guru harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar serta waktu yang tidak sebentar karena harus menyeberang sungai dan juga beresiko atau berbahaya karena menyeberang laut. Dengan demikian, maka dibentuk sub rayon MGMP. Selain itu di Kota Bekasi mulai ada wacana membuat sub rayon MGMP karena jumlah anggota MGMP-nya terlalu besar. Dalam membuat sub rayon MGMP perlu diterapkan jumlah anggota maksimal suatu sub rayon MGMP misalnya maksimal 28 orang per sub rayon (mengikuti persyaratan standar pelayanan minimal tentang besar rombel). Dengan demikian di tingkat kabupaten ada MGMP Mapel tertentu yang membawahi beberapa sub rayon MGMP sebagaimana ditunjuk dalam gambar berikut.



Gambar 5.1 Pemekaran MGMP Kabupaten/Kota Menjadi Beberapa Subrayon MGMP

2. Perlu adanya instruktur atau fasilitator untuk setiap kegiatan/program di setiap MGMP atau subrayon MGMP. Setiap anggota dapat dilatih untuk menjadi instruktur. Jadi tidak perlu orang yang sama yang terus dijadikan instruktur. Dengan demikian setiap anggota berkesempatan untuk mengikuti pelatihan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi atau bahkan tingkat nasional. Jadi pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan misalnya menyusun soal aras tinggi, setiap MGMP atau rayon MGMP agar diundang perwakilannya untuk ikut pelatihan menjadi instruktur. Banyak ketua MGMP yang mengeluh ditugaskan untuk menyusun soal USBN aras tinggi namun mereka belum pernah ikut pelatihan menyusun soal aras tinggi. Hal ini yang diduga telah menyebabkan rendahnya nilai Ujian Nasional SMP, karena gurunya saja belum tahu menyusun soal aras tinggi, tentunya siswa lebih parah atau lebih tidak tahu lagi,

sehingga mereka tidak dapat menjawab soal aras tinggi yang ada dalam soal UN.

3. Perlu adanya payung hukum untuk melegalkan penarikan iuran dari anggota MGMP: Selama ini kendala utama pelaksanaan kegiatan MGMP adalah ketiadaan dana. Perlu adanya payung hukum juga dihimbau oleh responden. Praktek baik yang sudah ada adalah di Kabupaten Limapuluh Kota di mana sebanyak sembilan dari 10 MGMP Mapel K-13 menarik iuran anggota untuk mendanai kegiatan MGMP. Namun demikian, diharapkan adanya payung hukum untuk mengaturnya sehingga dapat mempermudah pengurus dalam mengumpulkannya dan mempertanggungjawabkan pemanfaatannya. Selain itu sumber dana yang bisa dijadikan sumber dana rutin untuk pelaksanaan kegiatan MGMP adalah dari dana BOS. Di dalam panduan pemanfaatan dana BOS ada pos biaya untuk pengembangan diri guru. Untuk itu ketua MGMP agar kreatif untuk menegosiasi kepala sekolah agar menyisihkan dana BOS untuk membiayai kegiatan MGMP. Praktek baiknya adalah di Kabupaten Flores Timur. Kepala sekolah menyisihkan dana BOS per anak Rp 5.000,- per tahun untuk mendukung kegiatan MGMP. Tidak hanya itu berkat kreativitas pengurus MGMP yang mau berdialog dengan kepala sekolah dan orangtua murid tentang kesulitan MGMP membiayai kegiatannya, maka komite sekolah bersedia membantu biaya operasional MGMP sebesar

Rp500.000,- per tahun. Selain itu, MGMP PAI (K) perlu mencontoh bagaimana MGMP PA-Katholik Flores Timur mendapatkan dana dari kantor Kementerian Agama (Kemenag). Mereka berani bernegosiasi dengan pihak kantor Kemenag Kabupaten untuk mengadakan kegiatan MGMP. Maka oleh pihak Kemenag Kabupaten, MGMP diminta membuat proposal pengadaan kegiatan dengan biayanya tidak boleh dari Rp 5.000.000,-. Pengalaman mereka selama ini kantor Kemenag selalu mengabulkan proposal mereka, dan mereka bisa melaksanakan kegiatan MGMP 2 kali setahun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antara (2018). Mendikbud Jelaskan Kenapa Nilai Rata-rata Hasil UN SMP 2018 Turun dalam <https://nasional.tempo.co/read/1092395/mendikbud-jelaskan-kenapa-nilai-rata-rata-hasil-un-smp-2018-turun>, diunduh pada 15 Juni 2018.
- Artha, U. Y. (2018). Nilai Rata-Rata Ujian Nasional 2018 Turun, Ini 2 Biang Keladinya dalam <https://news.okezone.com/read/2018/05/08/65/1896034/nilai-rata-rata-ujian-nasional-2018-turun-ini-2-biang-keladinya>, diunduh pada 16 Juni 2018.
- Atriana, R. (2018). Rata-rata Nilai UNBK SMP 2018 Turun, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4038027/rata-rata-nilai-unbk-smp-2018-turun>, diunduh pada 15 Juni 2018.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), (2018). Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Berstandar Nasional (POS USBN).
- Bertema.com (2018). Cara Menyusun Soal USBN dengan *Higher Order Thinking Skills*, dalam <https://bertema.com/soal-usbn-dengan-higher-order-thinking-skills>, diunduh pada 16 Juni 2018.

- Bina Informatika, (2017). Peran Guru Dalam Penyusunan Soal UNBK Tahun Pelajaran 2017/2018, dalam <http://smkbinainformatika.sch.id/peran-guru-dalam-penyusunan-soal-unbk-tahun-pelajaran-20172018/> diunduh pada 14 Juni 2018.
- BSNP (2009). Pelatihan Penulisan Soal UASBN dalam <http://bsnp-indonesia.org/2009/04/21/pelatihan-penulisan-soal-uasbn/>, diunduh pada 10 September 2018.
- Darodjat dan Wahyudhiana, M. (2015). Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Islamadina*, Volume XIV, Nomor 1, Maret 2015, hlm.1-28.
- Dharmawan A. (2014). Landasan Hukum MGMP, Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Revitalisasi KKG dan MGMP, dalam <http://mgmpkwugunkid.blogspot.com/2014/01/landasan-hukum-mgmp.html>, diunduh pada 13 Juni 2018.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud. (2017). Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada KKG/MGMP.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional (2010). Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP.

Ditjen GTK (2017). Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nomor 01554/B/GT/2017 tentang Bantuan Pemerintah bagi KKG/MGMP/MKKS.

Firman (2016). Peranan MGMP dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA di Kota Balikpapan. *Jurnal Sains Terapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan* Nomor 1 Volume 2, Juni 2016, hlm 27-33.

Husna, F. (2016). Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI: Studi Kasus MGMP PAI SMP Negeri Kabupaten Kediri. *Jurnal Didaktika Religia* Volume 4, NoMor 2 Tahun 2016, hlm. 205-224.

Idhom, A.M. (2017a). Biaya Pembuatan Soal, Kementerian Kucurkan Dana 595 Juta dalam <http://korankito.com/2017/02/07/biaya-pembuatan-soal-kementerian-kucurkan-dana-595-juta.html>, diunduh pada 14 Juni 2018.

Idhom, A.M. (2017b). Pelatihan Pembuatan Soal USBN Akan Habiskan Rp320 Miliar dalam <https://tirto.id/pelatihan-pembuatan-soal-usbn-akan-habiskan-rp320-miliar-ckg7>, diunduh pada 14 Juni 2018.

Kemendikbud (2017). Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Jakarta.

- Kementerian Pendidikan Nasional (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta.
- Mahmud, I. (2013) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru SMA di Kota Batu. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Mangkunegara, A. P. (2009). Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novauli, F. M. (2015). Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar pada SMP Negeri Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 45-67.
- Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018). Panduan Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

- Putri, Z. A. (2018). Kemendikbud: Nilai Rata-rata UN SMP 2018 Alami Penurunan dalam <https://news.detik.com/berita/4042222/kemendikbud-nilai-rata-rata-un-smp-2018-alami-penurunan>, diunduh pada 15 Juni 2018.
- Republik Indonesia (2003). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia (2005). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
- Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah (PP) Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta.
- Rusman (2012). Seri Manajemen Sekolah Bermutu: Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tayibnafis, F.Y. (2000). Evaluasi Program. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Wardani, I. S. (2014). Guru sebagai Pemimpin Pendidikan. Jurnal Buana Pendidikan, Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun X, Nomor 18, April 2014, hlm. 27-31.















Guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, salah satunya melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP. MGMP sudah dilibatkan dalam penyusunan soal-soal USBN aras tinggi sejak 2017, sehingga seharusnya guru sudah melakukan pembelajaran dengan mengedepankan penyelesaian persoalan menggunakan daya nalar sedang hingga tinggi. Namun kenyataannya hasil USBN terus mengalami penurunan. Tujuan umum kajian yaitu menghasilkan rekomendasi dan opsi kebijakan pemberdayagunaan MGMP untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran. Untuk mencapainya maka perlu diketahui profil dan keaktifan MGMP dalam penyusunan soal USBN, perencanaan penyusunan soal USBN, realisasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan, diseminasi hasil penyusunan, dan transfer hasil pelatihan kepada siswa dalam pembelajaran. Sampel lokasi dilakukan berdasarkan pengelompokan kabupaten/kota tertinggi, tinggi, sedang, rendah dan terendah pada capaian hasil UNBK. Satuan pendidikan dan MGMP yang menjadi sasaran adalah tingkat SMP. Analisis data dilakukan secara univariat atau bivariat terhadap data kuantitatif dan analisis deskriptif dilakukan terhadap data kualitatif. Hasil kajian antara lain belum semua MGMP membuat perencanaan penyusunan soal USBN aras tinggi; realisasinya umumnya sesuai dengan rencana awal hanya waktu yang dibutuhkan lebih lama dari yang direncanakan. Masih ditemui berbagai kendala dalam pembelajaran, salah satunya adalah wawasan berpikir, keaktifan, dan kurangnya pemikiran kritis peserta didik yang membuat mereka sulit memahami soal-soal aras tinggi. Rekomendasi antara lain adalah maksimalisasi dukungan baik regulasi, kerja sama, peningkatan sarpras dan pendanaan, serta perlu pemekaran MGMP dalam beberapa subrayon yang difasilitasi dengan instruktur dan fasilitator agar kegiatan dan hasilnya lebih efektif.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2019

ISBN 978-602-0792-16-3

